

## Investasi Agribisnis di Timor-Leste: Pedoman Mendukung Hasil Sama-Sama Untung

memiliki sebuah program pariwisata yang berkelanjutan.<sup>53</sup> Ada pula skema sertifikasi untuk industri perikanan lepas pantai, dan *Marine Stewardship Council* menawarkan sebuah program sertifikasi untuk kegiatan-kegiatan penangkapan ikan komersial berkelanjutan.<sup>54</sup>



Sejauh ini, pengalaman sertifikasi internasional telah bervariasi. Informasi Bank Dunia menunjukkan bahwa dalam hal produksi minyak kelapa sawit, misalnya, untuk mana sertifikasi kini dimungkinkan melalui Meja Bundar tentang Minyak Kelapa Sawit Berkelaanjutan (RSPO), menerapkan kriteria hak-hak tanah masyarakat 'untuk operasi yang sebenarnya menjadi sulit dan kontroversial'. Program-program sertifikasi lain, terutama *Forest Stewardship Council*, tampaknya memperoleh sukses yang jauh lebih besar. Fitur utama yang tercatat dalam studi Bank Dunia adalah bahwa agar program-program sertifikasi menjadi berarti, mereka harus mencantumkan ketentuan-ketentuan untuk 'verifikasi independen atas kepatuhan' sesuai standar-standar (Deiningger et al. 2010, 15, 97-98).

Sertifikasi Industri Sukarela ini masih dalam masa pertumbuhan dan pada sisi positif, sedang diambil tindakan-tindakan untuk memberikan pengakuan kepada skema-skema yang telah terbukti kuat. Organisasi yang mengesahkan para pemberi sertifikasi termasuk Akreditasi Sosial dan Lingkungan Internasional yang relatif baru dan Aliansi Pemberian Label /*Labelling Alliance* (ISEAL)<sup>55</sup> dan Organisasi Standar Internasional.<sup>56</sup> Pemberi sertifikasi pertama, ISEAL, sampai saat ini telah menerima sepuluh skema sertifikasi sebagai 'anggota penuh', dengan anggota-anggota tambahan lain sebagai 'asosiasi' dan 'afiliasi'.

Munculnya skema sertifikasi sukarela dan meningkatnya penggunaan skema-skema ini oleh industri memberikan kepada pemerintah negara-negara berkembang pilihan untuk memperkenalkan sertifikasi wajib dengan skema yang sesuai untuk jenis-jenis investasi tertentu (mungkin skema-skema yang melebihi luas lahan yang ditentukan atau tingkat modal yang telah ditentukan). Bahkan jika Pemerintah Timor-Leste memutuskan untuk tidak memerlukan sertifikasi dengan skema-skema sertifikasi industri internasional, para investor masih akan bijaksana untuk mempertimbangkan sertifikasi, tidak hanya sebagai sarana menunjukkan komitmen untuk aspek-aspek manajemen sosial dan lingkungan tetapi juga berpotensi untuk memaksimalkan pilihan-pilihan ekspor untuk produk mereka.

Kamar Dagang dan Industri Timor-Leste



<sup>53</sup> Lihat <http://www.rainforest-alliance.org/tourism.cfm?id=main>

<sup>54</sup> Lihat <http://www.msc.org/>

<sup>55</sup> Lihat <http://www.isealliance.org>



Julio Alvaro

Presiden CCI-TL

Kata Pembuka Disarankan oleh Dewan Presiden Kamar Dagang Dan Industri Timor-Leste

Timor-Leste adalah sebuah negara yang memiliki banyak kesempatan untuk para investor, khususnya di daerah-daerah pedesaan dimana kebanyakan dari masyarakat kami tinggal. Agribisnis, pada kenyataannya, telah diidentifikasi oleh pemerintah Timor-Leste sebagai prioritas utama dalam Rencana Strategi Pembangunan yang dipublikasikan baru-baru ini. Kendati demikian, hal ini dapat menjadi sebuah lingkungan kerja yang srat tantangan. Pada Kamar Dagang dan Industri Timor-Leste, kami berkomitmen untuk membantu para investor dalam mengatasi beberapa tantangan ini dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk para investor demi kepentingan rakyat kami.

Pedoman-pedoman ini telah dikembangkan melalui kerjasama dengan ahli-ahli internasional, para investor dan partner-partner pemerintah serta memanfaatkan pengalaman investasi-investasi sukses dan solusi yang menguntungkan bagi pihak investor dan masyarakat di Timor-Leste.

Pedoman pedoman ini adalah sebuah pedoman yang sangat praktikal “How to” bagi investor yang berkeinginan untuk berbisnis di area agribisnis di Timor-Leste. Pedoman mencakup informasi tentang kondisi lokal (Proses pemerintah, tingkah laku pertanian itu sendiri dan bagaimana masyarakat pedesaan kami diorganisir) dan memberikan saran-saran praktikal tentang pencegahan masalah yang disebabkan oleh kurang baiknya komunikasi dan harapan yang sesat. Adalah harapan kami bahwa pedoman ini dapat digunakan para investor yang tertarik untuk menjelajahi kesempatan berinvestasi yang ditawarkan oleh Timor-Leste.

Julio Alvaro



Julio Alvaro  
Presiden CCI-TL

Kata Pembuka Disarankan oleh Dewan Presiden Kamar Dagang Dan Industri Timor-Leste

Timor-Leste adalah sebuah negara yang memiliki banyak kesempatan untuk para investor, khususnya di daerah-daerah pedesaan dimana kebanyakan dari masyarakat kami tinggal. Agribisnis, pada kenyataannya, telah diidentifikasi oleh pemerintah Timor-Leste sebagai prioritas utama dalam Rencana Strategi Pembangunan yang dipublikasikan baru-baru ini. Kendati demikian, hal ini dapat menjadi sebuah lingkungan kerja yang srat tantangan. Pada Kamar Dagang dan Industri Timor-Leste, kami berkomitmen untuk membantu para investor dalam mengatasi beberapa tantangan ini dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk para investor demi kepentingan rakyat kami.

Pedoman-pedoman ini telah dikembangkan melalui kerjasama dengan ahli-ahli internasional, para investor dan partner-partner pemerintah serta memanfaatkan pengalaman investasi-investasi sukses dan solusi yang menguntungkan bagi pihak investor dan masyarakat di Timor-Leste.

Pedoman pedoman ini adalah sebuah pedoman yang sangat praktikal "*How to*" bagi investor yang berkeinginan untuk berbisnis di area agribisnis di Timor-Leste. Pedoman mencakup informasi tentang kondisi lokal (Proses pemerintah, tingkah laku pertanian itu sendiri dan bagaimana masyarakat pedesaan kami diorganisir) dan memberikan saran-saran praktikal tentang pencegahan masalah yang disebebkan oleh kurang baiknya komunikasi dan harapan yang sesat. Adalah harapan kami bahwa pedoman ini dapat digunakan para investor yang tertarik untuk menjelajahi kesempatan berinvestasi yang ditawarkan oleh Timor-Leste.

9/2  
\_\_\_\_\_  
Julio Alvaro

Timor-Leste, Government of. MAF (Ministry of Agriculture and Fisheries) and MTCI (Ministry of Tourism, Commerce and Industry). 2009a. "Conference Proceedings: 1<sup>st</sup> International Conference on 'Cafe Timor,'" Hotel Timor, Dili, Timor-Leste, April 3–4.

Timor-Leste, Government of. MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries). 2004. "Policy and Strategic Framework." MAFF, Dili, Timor-Leste.

Timor-Leste, Government of. MED (Ministry of Economy and Development). 2008. "State of the Nation Report Volume IV: Sector Status Reports." National Commission for Research and Development, MED, Dili, Timor-Leste.

Timor-Leste, Government of. 2009b. "The Strategic Framework for Rural Development in Timor-Leste (2010-2020)." Dili, Timor-Leste.

Vermeulen, Sonja, and Lorenzo Cotula. 2010. *Making the Most of Agricultural Investment: A Survey of Business Models that Provides Opportunities for Smallholders*. London: Food and Agriculture Organization and International Institute for Environment and Development, available at <http://pubs.iied.org/pdfs/12566IIED.pdf>.

Weber, Max. 1915. "The Social Psychology of the World Religions." Reprinted with introduction in *From Max Weber: Essays in Sociology*, trans. and ed. H. H. Gerth and C. Wright Mills, 267–301. New York: Oxford University Press, 1976.

———. [1922] 1978. *Economy and Society*. Vol. 1. Guenther Roth and Claus Wittich, eds. Berkeley: University of California Press.

World Bank. 2006. "Strengthening the Institutions of Governance in Timor-Leste." World Bank, Washington, DC, available at <http://siteresources.worldbank.org/INTTIMORLESTE/Resources/Strengthening-Institutions-Full-report.pdf>.

World Bank. 2011. "Timor-Leste: Expanding Near-Term Agricultural Exports." World Bank Diagnostic Trade Integration Study (DTIS), World Bank, Washington, DC.

Wurm, Stephen A., and Shiro Hattori, eds. 1981. *Language Atlas: Pacific Area*. Canberra: The Australian Academy of the Humanities in collaboration with the Japan Academy.

Young, Philip, Nunos Santos, and Shobha Shetty. 2010. "Timor-Leste: Raising Agricultural Productivity: Issues and Options." Policy Note, Report 50276, World Bank, Washington, DC.

## Daftar Isi

Ringkasan Prinsip-prinsip Utama .....	iii
Pendahuluan .....	1
1. Pedoman Investasi Agribisnis di Timor-Leste .....	1
Perbedaan-perbedaan dalam Pandangan Dunia dan Harapan-Harapan .....	1
1.1 Konsultasi dan Pengambilan Keputusan Bijaksana .....	3
Tingkat Nasional .....	3
Dalam Distrik .....	3
1.2 Evaluasi dan Manajemen Resiko .....	8
Sifat Rapuh dari Keberadaan Subsistensi .....	8
Menetapkan Kelayakan Pendekatan .....	9
Penilaian Dampak .....	10
Manajemen Resiko .....	10
1.3 Komunikasi dan Manajemen Investor .....	11
Bahaya-bahaya Rantai Komunikasi yang Panjang dan Tidak Langsung .....	12
Kesehatan dan Keselamatan Kerja .....	12
1.4 Distribusi Keuntungan .....	14
Membuat Partisipasi Bermanfaat untuk Petani .....	14
Pentingnya Pembayaran Langsung dan Adil kepada Peserta Anggota Masyarakat .....	15
Membayar Perempuan untuk Pekerjaan Mereka .....	16
Memberi Manfaat kepada Masyarakat Luas .....	16
1.5 Manajemen Sengketa .....	17
2. Pembangunan Desa di Timor-Leste dan Sektor Swasta .....	18
2.1 Ekonomi Pedesaan Timor-Leste .....	18
Pentingnya Investasi Sektor Swasta .....	19
2.2 Pertanian dan Tanah di Timor-Leste .....	20
Konteks Timor-Leste .....	20
Mengakses Lahan Pertanian di Timor-Leste .....	21
Sebuah Undang-undang Pertanahan Masa Depan .....	22

Lampiran : Investasi Agribisnis di sebuah Negara Berkembang .....	24
Kekhawatiran mengenai "Perampasan Tanah' di Negara Berkembang .....	24
Prinsip-Prinsip dan Kode Etik .....	24
Skema Sertifikasi Industri Sukarela .....	26
Penekanan pada Petani Kecil.....	28
Referensi-referensi .....	29
Perlu Informasi Tambahan atau Bantuan? .....	32

- |
- Lampiran : Investasi Agribisnis di sebuah Negara Berkembang ..... 24  
Kekhawatiran mengenai "Perampasan Tanah' di Negara Berkembang ..... 24  
Prinsip-Prinsip dan Kode Etik ..... 24  
Skema Sertifikasi Industri Sukarela ..... 26  
Penekanan pada Petani Kecil..... 28  
Referensi-referensi .....
- Perlu Informasi Tambahan atau Bantuan? ..... 32
- 24  
24  
26  
28  
29  
32
- Fox, James. 1988. "The Historical Consequences of Changing Patterns of Livelihood on Timor." In *Contemporary Issues in Development*, ed. Deborah Wade-Marshall and Peter Loveday, 259–79. Darwin: Australian National University.
- Funk, McKenzie. 2010. "Will Global Warming, Overpopulation, Floods, Droughts and Food Riots Make this Man Rich? Meet the New Capitalist of Chaos." *Rolling Stone*, May 27.
- Gunn, Geoffrey C. 1999. *Timor Loro Sae: 500 Years*. Macau: Livros do Oriente.
- ICG (International Crisis Group). 2010. "Managing Land Conflicts in Timor-Leste." Asia Briefing 110, ICG, Brussels.
- Landman, J. R., and H. T. Plant. 1948. "Notes on Portuguese Timor." Pts. 1–3. *South Pacific (Journal of the Australian School of Pacific Administration)* 2 (11): 225–31; 3 (1): 1–8; 3 (2): 34–39.
- Meitzner Yoder, Laura Suzanne. 2005. "Custom, Codification, Collaboration: Integrating the Legacies of Land and Forest Authorities in Oecusse Enclave, East Timor." PhD diss., Yale University.
- Metzner, Joachim K. 1981. "Innovations in Agriculture Incorporating Traditional Production Methods: The Case of Amarsi (Timor)." Special issue, *Applied Geography and Development* 17: 89–110.
- Nixon, Rod. 2007. "Challenges for Managing State Agricultural Land and Promoting Post-Subsistence Primary Industry Development in East Timor." In *Crisis in Timor-Leste: Understanding the Past, Imagining the Future*, ed. Dennis. Shoesmith, 101–15. Darwin: Charles Darwin University Press.
- . 2008. "Integrating Indigenous Approaches into a 'New Subsistence State': The Case of Justice and Conflict Resolution." PhD diss., Charles Darwin University.
- . 2009. "Contracts, Land Tenure and Rural Development in Timor-Leste." Justice for the Poor Briefing Note 3, no. 3, World Bank, Washington, DC.
- Ormeling, Ferdinand J. 1957. *The Timor Problem: A Geographical Interpretation of an Underdeveloped Island*. Jakarta: J.B. Wolters.
- Palmer, Robin. 2010. "Would Cecil Rhodes Have Signed a Code of Conduct: Reflections on Global Land Grabbing and Land Rights in Africa." Paper presented at the African Studies Association of the UK Biennial Conference, Oxford, September 16–19.
- Silva, Carlos Arthur B. da. 2005. "The Growing Role of Contract Farming in Agric-food Systems Development: Drivers, Theory and Practice." FAO Agricultural Management, Marketing and Finance Service Paper, Food and Agriculture Organization, Rome, available at [http://www.fao.org/ag/ags-division/publications/publication/en/?dyna\\_lef%5Buid%5D=39612](http://www.fao.org/ag/ags-division/publications/publication/en/?dyna_lef%5Buid%5D=39612).
- Simmons, Phil. 2002. "Overview of Smallholder Contract Farming in Developing Countries." ESA Working Paper 02-04, Food and Agriculture Organization, Rome, available at <http://www.fao.org/docrep/007/ae023e/ae023e00.HTM>.

## Referensi-referensi

- Archer, C. H., "Report on Portuguese Timor." In *Australian Archives, "Relations with Portuguese Timor, Appointment of Commonwealth Representative, Occupation of Portuguese Timor, 1940-1941,"* Series A816 n° 19/301/822.
- Barrow, Christopher J. 2000. *Social Impact Assessment: An Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Borrás, Saturnino M. Jr., and Jennifer Franco. 2010. "Towards a Broader View of the Politics of Global Land Grab: Rethinking Land Issues, Reframing Resistance." Initiatives in Critical Agrarian Studies (ICAS) Working Paper Series 001, Transnational Institute, Amsterdam.
- Boxer, Charles R. 1960. "Portuguese Timor: A Rough Island Story: 1515-1960." *HistoryToday* 10 (5): 349–55.
- Braun, Joachim von, and Ruth Meinzen-Dick. 2009. "'Land Grabbing' by Foreign Investors in Developing Countries: Risks and Opportunities." International Food Policy Research Institute Policy Brief 13, IFPRI, Washington, DC.
- Clarence-Smith, W. G., 1992. "Planters and Small Holders in Portuguese Timor in the Nineteenth and Twentieth Centuries." *Indonesia Circle*, no. 57, London, available at <http://www.gov.east-timor.org/MAFF/ta000/TA051.pdf>.
- Cotula, Lorenzo, and Rebeca Leonard, eds. 2010. "Alternatives to Land Acquisition: Agricultural Investment and Collaborative Business Models." International Institute for Environmental Development, London, available at <http://pubs.iied.org/12567/IED.html>.
- Davidson, Katharine G. 1994. "The Portuguese Colonisation of Timor: The Final Stage, 1850 – 1912." PhD diss., University of New South Wales.
- Deininger, Klaus, Derek Byerlee, Jonathan Lindsay, Andrew Norton, Harris Selod, and Mercedes Stickler. 2010. *Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?* Washington, DC: World Bank.
- Doria, Marta. n.d. "Contract Farming: Legal Considerations on Contractual Design and Enforcement." Food and Agriculture Organization, Rome, available at [http://www.fao.org/fileadmin/user\\_upload/contract\\_farming/Brief\\_1\\_legal\\_aspects\\_of\\_contract\\_farming.pdf](http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/contract_farming/Brief_1_legal_aspects_of_contract_farming.pdf).
- Eaton, Charles S. 1988. "Directed Smallholder Farming in Fiji." M. Phil. thesis, University of the South Pacific, Suva. Unpublished.
- . Forthcoming. "Training Manual on Planning and Structuring Contract Farming Operations."
- Eaton, Charles S., and Andrew W. Shepherd. 2001. "Contract Farming: Partnerships for Growth." FAO Agricultural Services Bulletin 145, Food and Agriculture Organization, Rome.
- Elson, Dominic. 2008. "Forest Governance, Markets and Trade: Implications for Sustainability and Livelihoods." Department for International Development, London, available at [http://www.illegal-logging.info/item\\_single.php?it\\_id=916&it=document](http://www.illegal-logging.info/item_single.php?it_id=916&it=document).
- FAO (Food and Agriculture Organization). 2009. "Towards Voluntary Guidelines on Responsible Governance of Tenure of Land and Other Natural Resources." Land Tenure and Management

## Ringkasan Prinsip-prinsip Utama

	<b>Aspek</b>
<b>Konsultasi dan Mengambil Keputusan Bijaksana</b>	<p>Apakah anda telah mengkonsultasi dan memberi tahu lembaga-lembaga penting dan individu-individu mengenai usulan proyek anda di semua tingkat (nasional, sub-distrik dan suco)?</p> <p>Apakah pihak-pihak dengan siapa anda berencana untuk bekerjasama di tingkat suco sungguh-sungguh memahami pembagian tanggung jawab dan keuntungan yang berhubungan dengan proyek yang diusulkan?</p> <p>Apakah semua lahan yang berhubungan dengan proyek yang diusulkan secara fisik telah dikunjungi bersama para pemimpin masyarakat, para pemilik tanah dan para pemilik tanah di sekitarnya?</p> <p>Apakah sudah berkonsultasi dengan jumlah wanita yang signifikan dan representatif apakah mereka sudah setuju dengan proyek yang diusulkan?</p> <p>Apakah sudah melakukan negosiasi mengenai peran wanita di dalam proyek dan hal yang berhubungan dengan pelatihan dan aspek pembagian manfaat?</p> <p>Apakah aspek-aspek kunci dari proyek (siapa yang menyediakan bahan-bahan tertentu; siapa yang menerima manfaat yang mana dan bagaimana semua manfaat didistribusikan ke seluruh masyarakat) dijelaskan secara tuntas dalam bahasa yang sesuai? Apakah salinan persetujuan telah didistribusikan kepada anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proyek?</p> <p>Apakah telah diberikan perhatian kepada kegiatan komunikasi yang berkelanjutan supaya bisa dapat menyelesaikan keluhan dan kesalahpahaman sebelum berkembang menjadi perselisihan?</p> <p>Apakah sifat dan kemungkinan jumlah proyek telah dikomunikasikan kepada non-peserta dan anggota masyarakat tetangga untuk memastikan adanya pemahaman akurat mengenai sifat dari proyek dan untuk menghindari munculnya harapan yang tidak realistik?</p>
<b>Evaluasi dan Penilaian Resiko dan Manajemen</b>	<p>Apakah anda telah mencari informasi yang relevan untuk menginformasikan pendekatan anda dari semua sumber yang berpotensi, seperti Kementrian Pertanian dan Perikanan dan operator agribisnis lainnya?</p> <p>Apakah anda telah mencoba proses produksi anda sehingga anda tidak menempatkan mata pencarian anggota masyarakat (dan investasi anda sendiri) pada resiko yang tidak diinginkan pada saat anda memulai produksi berskala penuh? (Perhatikanlah bahwa program percobaan biasanya lebih produktif daripada lahan garapan para petani).</p> <p>Apakah anda telah mengevaluasi kapasitas anggota masyarakat local sehingga anda dapat mengukur kebutuhan-kebutuhan pengembangan kapasitas/pelatihan dan tingkat aktivitas esktensi yang diperlukan?</p> <p>Apakah proyek yang diusulkan memiliki ukuran atau sifat tertentu yang memerlukan suatu penilaian dampak sosial/lingkungan? jika demikian, apakah sudah diidentifikasi peluang-peluang untuk memaksimalkan dampak-dampak positif, dan juga cara-cara untuk meringankan atau menghilangkan dampak-dampak negatif? Apakah sudah dipertimbangkan dampak-dampak sosial/lingkungan tertentu untuk perempuan dalam wilayah proyek tersebut?</p> <p>Apakah peserta anggota masyarakat telah diarjurkan untuk mempertahankan kelanjutan produksi sebagai jaring keamanan apabila proyek gagal untuk diwujudkan sesuai dengan hasil yang diharapkan?</p> <p>Apakah anda memiliki kemampuan teknis dan manajerial memadai untuk mengelola proyek yang diusulkan?</p>
<b>Komunikasi</b>	Apakah anda telah merancang sebuah program komunikasi dan penyuluhan

<b>Penyalahan</b>	<p>yang akan memperlancar komunikasi dua arah secara langsung antara anggota masyarakat dan wakil-wakil perusahaan, dan penyampaian tingkat dukungan penyuluhan yang memadai?</p> <p>Apakah gambaran program komunikasi/penyuluhan memperhitungkan kebutuhan konsultasi dengan perempuan dan pemberian pelatihan kepada perempuan, dan apakah telah direncanakan untuk melibatkan para anggota perempuan dalam tim penyuluhan?</p> <p>Apakah staf komunikasi/penyuluhan memiliki akses ke fasilitas transport (contohnya sepeda bermotor) dan bahan bakar yang cukup untuk melakukan pekerjaan mereka?</p> <p>Apakah sudah ada program pemantauan untuk meyakinkan bahwa staf komunikasi/penyuluhan menjalankan tugas mereka?</p> <p>Apakah aspek bahasa dan tingkat melek huruf sudah diperhitungkan sehubungan dengan desain program komunikasi dan penyuluhan dan perekrutan staf?</p> <p>Apakah ada ketentuan-ketentuan khusus untuk memungkinkan anggota masyarakat perorangan untuk mengadu/keluhan kepada manajemen senior jika diperlukan?</p>
<b>Distribusi Keuntungan</b>	<p>Apakah kerjasama memiliki nilai yang cukup kepada peserta anggota masyarakat bahwa mereka akan tetap berkomitmen terhadapnya?</p> <p>Apakah kerjasama yang ada memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat untuk mengakses pengembahan dan keterampilan baru, teknologi dan bantuan lain, dan pasar?</p> <p>Apakah telah dirancang sarana-sarana untuk memberi kompensasi secara langsung kepada peserta proyek perorangan?</p> <p>Apakah peserta perempuan akan menerima kompensasi secara langsung atas kontribusi mereka terhadap proyek?</p> <p>Apakah pertimbangan telah diberikan kepada sarana-sarana dengan mana manfaat-manfaat tambahan dari kerjasama dapat mengalir ke masyarakat?</p> <p>Apakah upacara-upacara adat akan didukung secara berskala untuk mempertahankan niat baik di antara masyarakat?</p>
<b>Manajemen sengketa</b>	<p>Pertemuan rutin antara seorang investor dan anggota masyarakat dapat memfasilitasi pertukaran informasi dan menghindari berkembangnya kesalahpahaman dan sengketa. Apakah telah dilakukan pengaturan luas untuk pertemuan yang telah dibuat?</p> <p>Apakah telah diidentifikasi model dasar penyelesaian sengketa (non-pengadilan) dan telah disepakati antara investor dan anggota masyarakat termasuk perempuan?</p>

### Penekanan pada Petani Kecil

Sebuah hasil lebih lanjut dari meningkatnya kekhawatiran tentang dominasi korporasi pertanian dan marginalisasi masyarakat dari lahan pertanian telah meningkatkan minat dalam bentuk pertanian komersial yang tidak mengusur masyarakat dan di mana petani memiliki sebuah peran.<sup>57</sup> Dari perspektif investor, ini belum tentu merugikan kinerja ekonomi, karena sementara pertanian rakyat mungkin kurang produktif dibandingkan peternakan skala besar secara keseluruhan, bisa lebih efisien dalam hal biaya pengeluaran (Deininger et al. 2010, 24).

**Gambar 15: Petani wanita di Oecusse (Foto: Rod Nixon)**

Sebagai sarana memajukan pertanian komersial dengan masuknya petani penggarap kecil, kontrak pertanian telah menjadi pusat perhatian.<sup>58</sup> Pengaturan pertanian kontrak dapat mengambil berbagai bentuk yang berbeda, dari pengaturan informal ke perkembangan perkebunan inti yang kompleks,<sup>59</sup> dan sejumlah publikasi memberikan analisis tentang manfaat dan risiko masing-masing untuk pengaturan pertanian kontrak dari perspektif-perspektif para investor dan para petani (Eaton dan Shepherd 2001; Silva 2005; Vermeulen dan Cotula 2010).



<sup>57</sup> Lihat, misalnya, Vermeulen dan Cotula (2010) dan Cotula dan Leonard (2010).

<sup>58</sup> Seperti yang didefinisikan dalam Tabel 1 dokumen ini, pengaturan pertanian biasanya melibatkan suatu pengaturan di mana investor memberikan input (secara potensial berupa bibit tanaman, pupuk, dan pemberian mesin atau perlakuan) dan petani mengolah hasil pertanian untuk dijual kepada investor. Harganya sering disetujui sebelum produksi dan kuota-kuota dan spesifikasi-spesifikasi agak spesifik harus ditetapkan. Pembayaran kelebihatannya akan dilakukan pada masa pengumpulan hasil panen, lalu dikurangi dengan biaya input-input yang disediakan oleh investor.

<sup>59</sup> Variasi-variasinya digambarkan secara rinci dalam Eaton dan Shepherd (2001).

**Pendahuluan**  
Timor-Leste membutuhkan investasi sektor swasta di bidang agribisnis. Tingkat produktifitas di Timor-Leste sangat rendah untuk standar dunia dan terdapat ruang bagi sektor swasta untuk memainkan peran penting dalam memperkenalkan teknologi-teknologi baru, menyediakan akses ke pasar dan menginvestasikan modal untuk intensifikasi produksi. Untuk alasan-alasan yang sama bahwa negara itu membutuhkan pembangunan pertanian, para investor harus memahami bahwa kehidupan di desa Timor-Leste sulit, dan didefinisi oleh pola-pola pertanian subsistensi yang mengalami transformasi minimal selama periode kolonial Portugis yang berakhir pada 1975 dan periode pendudukan Indonesia berikutnya yang berlangsung sampai 1999, dan dengan menganut beberapa prinsip utama bisa membuat perbedaan antara sebuah kerjasama sukses yang memberi manfaat kepada investor dan anggota masyarakat, dan proyek yang gagal hanya gagal menghasilkan keuntungan tetapi juga menempatkan mata pencarian petani dalam resiko dan menghambat mereka untuk terlibat dalam kerjasama di masa mendatang dengan aktor-aktor dari luar.

Pedoman ini menggambarkan sejumlah prinsip utama sebagai bahan pertimbangan untuk para investor agribisnis, yang terlibat dalam kerjasama industri primer di daerah pedesaan Timor-Leste. Prinsip-prinsip tersebut berdasarkan pada suatu analisa pembangunan desa dan kinerja pertanian di Timor-Leste yang bersumber dari beberapa kerjasama antara investor-investor dengan anggota masyarakat selama dekade terakhir, sejak negara itu memperoleh kemerdekaannya. Analisa itu juga bersumber dari suatu tinjauan mengenai kemajuan-kemajuan dalam pemikiran internasional tentang investasi agribisnis di negara-negara berkembang dan juga pembangunan dalam konteks lokal. Dokumen ini dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama menyajikan pedoman yang dimaksudkan untuk membantu semua yang menginvestasi di bidang agribisnis di Timor-Leste atau mempertimbangkan untuk melakukan investasi seperti demikian, bagian kedua menyediakan informasi dasar tambahan yang berhubungan dengan pembangunan desa dan sektor swasta di Timor-Leste. Beberapa pertimbangan relevan untuk investasi dalam agribisnis di sebuah negara berkembang tercantum dalam sebuah Lampiran.

## 1. Pedoman Investasi Agribisnis di Timor-Leste

Penelitian yang sudah dilakukan di Timor-Leste telah mengidentifikasi sejumlah pertumbangan utama untuk kerjasama yang sukses antara para investor dan anggota masyarakat. Pengalaman dalam konteks Timor-Leste dan dalam konteks yang serupa di tempat lain menunjukkan bahwa perhatian kepada bidang-bidang ini bisa membuat perbedaan antara suatu kerjasama yang sukses dan kerjasama ini tidak hanya gagal menghasilkan bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga menghambat anggota masyarakat untuk bekerjasama dengan investor-investor pada kesempatan mendatang. Pertumbangan-pertumbangan kunci ini, yang mendapat perhatian lebih jauh di bawah, mencakup (1) konsultasi dan pengambilan keputusan yang bijaksana (2) Evaluasi dan Manajemen Resiko, (3) Komunikasi dan Penyaluan, (4) Distribusi Keuntungan, dan (5) Manajemen Sengketa.

## Perbedaan-perbedaan dalam Pandangan Dunia dan Harapan-Harapan

Sebagai catatan pendahuluan sebelum membahas tema-tema yang telah diuraikan di atas, para investor agribisnis yang bermaksud bekerjasama dengan masyarakat pedesaan dalam proyek agribisnis harus sadar bahwa perbedaan-perbedaan pandangan dunia yang terdapat di antara para anggota masyarakat petani yang bercocok tanam hanya untuk kebutuhan sehari-hari dan dengan siapa mereka akan bekerjasama di pedesaan Timor-Leste. Meskipun para pengusaha secara pribadi sangat antusias untuk mencoba inisiatif baru, namun anggota masyarakat desa cenderung memberi nilai tinggi untuk pendekatan-pendekatan terdahulu dalam suatu situasi yang sulit. Seperti dalam masyarakat tradisional generasi-generasi terdahulu dalam suatu situasi yang sulit. Seperti dalam masyarakat tradisional yang lain, para leluhur dianggap memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Para

hak untuk mengekspor selama terjadi krisis pangan  
nasional akut.'

Meskipun ditentang oleh beberapa komentator karena berbagai alasan, termasuk tetapi tidak terbatas pada sifat sukarela mereka,<sup>49</sup> kode etik dan prinsip-prinsip investasi agribisnis diyakini digunakan dalam 'mengingatkan negara dan investor-investor atas tanggung jawab mereka dan dalam menarik perhatian terhadap situasi-situasi di mana mereka tidak berlaku (Deininger et al. 2010, x). Masalah kode etik atau prinsip-prinsip juga mengundang perhatian terhadap berbagai skema sertifikasi industri sukarela yang telah dikembangkan selama beberapa dekade terakhir. Ini mendapat perhatian di bawah ini.

## Skema Sertifikasi Industri Sukarela

Munculnya gerakan konsumen etis dan perubahan legislatif di negara-negara maju telah menghasilkan pembentukan berbagai skema sertifikasi industri sukarela. Skema-skema ini biasanya mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk mematuhi praktik sosial dan lingkungan internasional yang baik, di mana pun mereka beroperasi, jika mereka ingin mencapai dan mempertahankan akreditasi. Dalam beberapa sektor, terutama hasil-hasil hutan, sertifikasi dengan skema-skema yang diakui menjadi penting bagi perusahaan yang berniat untuk mengakses pasar-pasar Barat yang menguntungkan.<sup>50</sup>

Sertifikasi industri mensyaratkan bahwa seorang operator dan/atau proyek memenuhi standar sosial dan lingkungan tertentu, idealnya sebagaimana diverifikasi oleh auditor eksternal, untuk akreditasi dengan sebuah skema industri tertentu yang harus dicapai dan dipertahankan. Sekarang ada berbagai skema yang disesuaikan untuk industri tertentu. Contoh-contoh skema sertifikasi industri utama termasuk Dewan Pengawasan Hutan/*Forest Stewardship Council* (FSC), yang dirancang untuk mempromosikan manajemen perkebunan kayu<sup>51</sup> yang berkelanjutan dan program Jaringan Pertanian Berkelaanjutan (SAN) dari Rainforest Alliance, yang memiliki standar-standar yang sesuai untuk berbagai hasil panen termasuk kopi, buah tropis dan produk lainnya.<sup>52</sup> Skema-skema sertifikasi industri tidak hanya terbatas pada tanaman dan perkebunan, dan *Rainforest Alliance* juga

<sup>49</sup> Borras dan Franco (2010, 9-12,32), yang meperdebatkan kebutuhan untuk mempertanyakan "akar fundamental perolehan tanah...(antara lain)...pola industrial produksi dan konsumsi makanan dan energi yang ada yang dikontrol oleh TNCS," membuat daftar alasan-alasan mengapa mereka menentang kode etik. Sebagai tambahan kemungkinan peran kode etik dalam menyokong dan memperlucas "kompleks industri agri-makanan dan energi global yang ada," ini meliputi kemungkinan peran keprihatinan-keprihatinan mengenai aspek-aspek hak-hak kepemilikan, keprihatinan-keprihatinan mengenai apakah transparansi yang urusan-urusan tanah akan cukup untuk produksi hasil bagi orang miskin, dan keprihatinan-keprihatinan tentang ciri sukarela kode etik. Para penulis juga mengungkapkan keprihatinan tentang kemampuan kemitraan antara para investor agribisnis dan para petani untuk "mencapai skenario hasil sama-sama untung." Sementara itu, para penulis menegaskan bahwa hasil tersebut telah gagal diwujudkan "dari waktu ke waktu dan dalam beragam situasi," namun mereka tidak mengacu kepada contoh-contoh dan juga tidak mengutip sumber-sumber. Untuk pembahasan lebih jauh tentang tema ini lihat juga Palmer (2010).

<sup>50</sup> Sebagai contoh, diikuti amandemen pada tahun 2008, US *Lacey Act* kini melarang impor dan perdagangan produk hutan (termasuk kayu) kayu ilegal di setiap negara berdaulat. Dalam menanggapi perkembangan ini (dan pengaruh pasar konsumen informasi yang mendukung undang-undang tersebut), bisnis berurusan dalam produk hutan berada di bawah tekanan untuk menunjukkan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan standar sosial dan lingkungan internasional. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Elson (2008) dan Deininger et al. (2010, 97).

<sup>51</sup> Lihat [www.fscus.org](http://www.fscus.org)

<sup>52</sup> Lihat <http://www.rainforest-alliance.org/>

akan mencatat bahwa berbagai aspek sebagaimana dimaksud dalam tabel tercemin dalam pedoman untuk investasi agribisnis di Timor-Leste yang termasuk dalam dokumen ini.

**Tabel 3: Pedoman Sukekela untuk Investasi Agribisni yang Bertanggungjawab (transkripsi)**

Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional ‘Elemen-elemen penting dari sebuah kode etik untuk akuisisi tanah asing’ <sup>47</sup>	Bank Dunia <sup>48</sup> Prinsip-Prinsip untuk agro-investasi yang bertanggungjawab
1. ‘Transparansi dalam negosiasi. Pemilik lahan lokal yang ada harus diinformasikan dan dilibatkan dalam negosiasi-negosiasi transaksi tanah. Persetujuan bebas, yang diberikan sebelumnya , dan berdasarkan informasi merupakan standar untuk ditetapkan. Upaya khusus diperlukan untuk melindungi hak-hak masyarakat pribumi dan kelompok-kelompok etnis terpinggiran. Media dan masyarakat madani dapat memainkan peran kunci dalam membuat informasi tersedia bagi publik.	1. Menghormati hak atas tanah dan sumberdaya alam Hak-hak tanah yang ada dan sumber daya alam terkait diaukui dan dihormati. <b>2. Menjamin keamanan pangan.</b> Investasi tidak boleh membahayakan keamanan pangan tetapi memperkuatnya. <b>3. Menjamin transparansi, pemerintahan yang baik, dan lingkungan yang kondusif.</b> Proses untuk memperoleh lahan tanah dan sumberdaya lainnya kemudian membuat investasi-investasi terkait secara transparan, dipantau dan menjamin pertanggung-jawaban semua pihak yang berkepentingan secara legal, sesuai peraturan dan lingkungan bisnis yang tepat.
2. Menghormati hak-hak tanah yang ada, termasuk tanah tradisional dan hak-hak milik umum. Bagi mereka yang telah kehilangan tanah harus diberi kompensasi dan direhabilitasi untuk memperoleh kehidupan yang setara. Standar dari Komisi Dunia untuk Bendungan menyediakan contoh mengenai kebijakan-kebijakan tersebut.	<b>4. Konsultasi dan partisipasi.</b> Semuanya yang terkena dampak dikonsultasi, dan persetujuan dari konsultasi dicatat dan ditegakkan. <b>5. Agro-investasi yang bertanggung jawab.</b> Investor memastikan bahwa proyek-proyek menghormati aturan hukum, mencerminkan praktik terbaik industri, layak secara ekonomi dan menghasilkan pembagian hasil yang bertahan lama.
3. Berbagi manfaat. Masyarakat setempat harus mendapat manfaat, tidak rugi, dari investasi asing di bidang pertanian. Sewa lebih disukai daripada kompensasi yang dibayar sekaligus karena mereka memberikan aliran pendapatan yang berkelanjutan ketika lahan yang diambil untuk keperluan lain. Pertanian kontrak atau skema-skema out-grower bahkan lebih baik karena mereka membiarkan petani kecil memegang kontrol atas tanah mereka namun tetap memberikan hasil panen kepada investor luar. Langkah-langkah eksplisit diperlukan untuk mendorong penggunaan sumber daya yang berkelanjutan sambil mengurangi risiko dampak-dampak negatif.	<b>6. Kelangsungan Sosial.</b> Investasi menghasilkan dampak-dampak social dan distribusi yang diinginkan dan tidak boleh menambah kerentanan. <b>Kelestarian Lingkungan.</b> Dampak-dampak lingkungan dari sebuah proyek diukur dan langkah-langkah diambil untuk mendorong penggunaan sumber daya yang berkelanjutan sambil mengurangi risiko dampak-dampak negatif.
4. Kelestarian Lingkungan. Evaluasi dampak lingkungan dan pemantauan yang teliti diperlukan untuk memastikan praktik-praktek produksi pertanian yang baik dan berkelanjutan yang menjaga terhadap penipisan tanah, hilangnya keanekaragaman hayati penting, peningkatan emisi gas rumah kaca, atau pengalihan signifikan air dari penggunaan lain bagi manusia atau lingkungan .	<b>5. Patuh terhadap kebijakan perdagangan nasional.</b> Apabila keamanan pangan nasional menghadapi resiko (misalnya, apabila terjadi kemarau panjang), persediaan pangan dalam negeri harus menjadi prioritas. Investor-investor asing tidak mempunyai

anggota masyarakat senior tertentu dianggap dapat berkomunikasi dengan dunia gaib, dan acara adat melibatkan para leluhur sudah merupakan suatu kebiasaan. Nenek moyang mewakili suatu pengaruh konservatif dalam arti positif, memperkuat legitimasi pola-pola praktek-praktek yang bisa membahayakan kelangsungan hidup generasi sekarang dan mendatang. Dari sudut pandang para anggota masyarakat, para leluhur mungkin tidak responsif terhadap perubahan, tetapi seperti anggota generasi selanjutnya akan perlu (melalui acara adat) diberi informasi mengenai logika pendekatan-baru yang diusulkan para investor.<sup>1</sup>



**Gambar 1: Rumah adat seperti yang satu ini di Aileu, adalah bukti kekuatan kepercayaan lokal yang bertahan di Timor-Leste (Foto: Rod Nixon)**  
Selain itu, tampaknya kontak utama dengan lembaga pembangunan dari luar yang telah dilakukan oleh banyak anggota masyarakat di masa lalu adalah melalui dukungan donor, NGO atau proyek pembangunan pemerintah (misalnya program Povo Kuda Governo Sosa atau Rakyat Menanam Pemerintah membeli).



**Gambar 2-3: Patung mantan gubernur Portugis Jose Celestino da Silva memandangi fasilitas-fasilitas perkembunan kopi SAPT yang didirikannya pada akhir abad 19. (Foto: Rod Nixon)**

<sup>1</sup> Berdasarkan diskusi dengan pemimpin-pemimpin ritual dan pemimpin-pemimpin masyarakat, terutama di distrik-distrik Oecuse dan Aileu pada periode 2002-2003. . Untuk bacaan dasar mengenai konservatisme masyarakat tradisional lihat Weber (1976[1915], 283; 1978, 227).

<sup>47</sup> Dikutip di dalam Braun dan Meinzen –Dick (2009, 3-4). Perhatikan bahwa yang original menggunakan bullet point bukan angka-angka.

<sup>48</sup> Dikutip di dalam Deiningger (2010, x).

Jadi, konsep melibatkan diri dalam hubungan dagang timbal balik tanpa disubsidi oleh orang luar mungkin adalah sesuatu yang baru. Karena itu, para investor diminta untuk berhati-hati ketika menjalaskan bahwa mereka adalah pengusaha dan harus mendapat keuntungan agar bisa bertahan dalam bisnis dan terus memberikan keuntungan untuk semua anggota masyarakat yang bekerjasama dengan mereka. Dengan demikian direkomendasikan agar para investor memastikan untuk menyampaikan secara tepat mengenai tingkat pengembangan yang dimaksud dan tidak memberi ruang untuk harapan-harapan yang tidak realistik yang dapat menyebabkan ketidakpuasan. Lebih jauh, khususnya di sektor kopi, perusahaan-perusahaan mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah Portugis dan Indonesia masing-masing adalah *Sociedade Agrícola Pátria e Trabalho* (SAPT) dan P.T.Salazar. Perusahaan-perusahaan sekutu negara ini dirasa telah mempekerjakan banyak tanaga kerja, dan anggota masyarakat mungkin telah mendapat pengharapan yang tidak realistik tentang keuntungan yang dihasilkan dari kerjasama dengan sebuah perusahaan.

## Hindari memberi harapan yang tidak realistik kepada masyarakat partner

### 1.1 Konsultasi dan Pengambilan Keputusan Bijaksana

#### Tingkat Nasional

Masyarakat agribisnis di Timor-Leste relatif sangat kecil dan pendatang baru di sektor tersebut akan memperoleh manfaat apabila dihubungkan dengan operator-operator yang ada dan belajar dari pengalaman mereka tentang apa yang bekerja dan apa yang tidak.<sup>2</sup> Tidak kalah penting, operator-operator baru harus berbuat sesuatu yang dapat diterima oleh departemen pemerintah yang relevan, khususnya Kementerian Pertanian dan Perikanan (MAF), Kementerian Ekonomi dan Pembangunan, Kementerian Pariwisata, Perdagangan dan Industri (MTCI), dan Kementerian Kehakiman yang membawahi Direktorat Nasional Pertanahan dan Jasa Pendaftaran Tanah. Walaupun bekerja dengan Pemerintah di Timor-Leste dapat memakan waktu yang sangat lama dan kemampuan kepegawaian negara masih berada di tahap awal pengembangan, jika semakin luas investor berhubungan dengan pejabat-pejabat relevan maka pejabat-pejabat tersebut akan banyak belajar tentang proyek, bagaimana proyek itu membawa manfaat untuk masyarakat, dengan demikian semakin banyak bantuan dan pemahaman yang mungkin diterima investor selama masa-masa sulit. Sebagai tambahan, apabila pengembangan kapasitas dilakukan terus-menerus, pegawai MAF dan lembaga-lembaga lain semakin berkemampuan untuk menyampaikan informasi teknis dan ekonomi yang akan bermanfaat untuk para investor.

#### Dalam Distrik

Di tingkat sub-nasional akan sangat penting bagi para investor untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan proyek mereka kepada administrator distrik dan para administrator sub-distrik di semua sub-distrik di mana mereka merencanakan akan bekerja. Secara historis, melihat kembali periode paska-pasifikasi ke awal abad ke-20, tingkat administrasi sub-distrik telah memainkan sebuah peran penting sebagai penghubung antara negara dan organisasi sosial tradisional suco (lihat di bawah). Secara signifikan, generasi pertama para administrator sub-distrik yang dipilih pada masa

## Lampiran : Investasi Agribisnis di sebuah Negara Berkembang

### Kekhawatiran mengenai "Perampasan Tanah" di Negara Berkembang

Ketika investasi agribisnis sensitif dapat menghubungkan para petani ke pasar-pasar baru dan memfasilitasi transfer pengetahuan, keterampilan, dan teknologi baru, agribisnis yang tidak sensitif dapat menelantarkan masyarakat dan menghancurkan mata pencarian. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian yang lebih besar telah difokuskan pada laporan-laporan, yang sering tidak diverifikasi, mengenai tingkat peningkatan 'perampasan tanah' yang dilakukan para oleh investor-investor asing (termasuk pemerintah, kadang-kadang bertindak dalam kemitraan dengan aktor-aktor sektor swasta) di negara berkembang, dan dampak potensial pada keamanan pangan bagi masyarakat lokal. Sebuah makalah 2009 oleh Institute Penelitian Kebijakan Pangan Internasional (Braun and Meinzen-Dick 2009, 3-4) merujuk ke 'berkembang-biaknya akuisisi lahan pertanian di negara-negara berkembang oleh negara-negara lain yang berusaha untuk memastikan persediaan makanan mereka' dan merujuk ke laporan-laporan berita mengenai areal lahan pertanian yang luas yang dikatakan telah diperoleh di negara-negara berkembang pada periode 2006 - 2009. Namun, makalah ini juga mencatat, bahwa 'contoh-contoh yang didokumentasi baik masih langka, rincian tentang transaksi yang sering keruh, dan beberapa laporan yang bertentangan satu sama lain.'

Pada bulan September 2010 Bank Dunia merilis sebuah laporan yang mencakup analisis yang lebih rinci mengenai data yang sama. Berdasarkan pada laporan berita tentang akuisisi tanah yang terungkap antara Oktober 2009 dan Agustus 2009, para penulis<sup>45</sup> telah mengembangkan sebuah 'database 464 proyek, dengan informasi daerah 203 yang dengan total 46, 6 juta ha.' Meskipun para penulis menyatakan bahwa permintaan terkini untuk lahan pertanian telah sangat 'besar' berdasarkan 'perluasan tahunan rata-rata lahan pertanian global kurang dari 4 juta hektar sebelum 2008', mereka juga melaporkan perbedaan nyata antara niat investor dan hasil:

Sangat berbeda dari niat-niat yang dilaporkan, menurut laporan media sebagian besar proyek yang terdaftar baik tidak memperoleh tanah atau gagal menggunakan tanah yang telah mereka peroleh seperti yang dimaksudkan. Kenyataanya, hampir 30 persen masih dalam tahap penjajakan (yaitu, mereka belum memperoleh persetujuan pemerintah); 18 persen telah disetujui tetapi belum dimulai, lebih dari 30 persen berada pada tahap pengembangan awal, dan hanya 21 persen telah memulai ... Kegiatan pertanian yang sebenarnya, sering pada skala yang lebih kecil daripada yang dimaksudkan.

Apapun realitas empiris mengenai 'perampasan tanah' oleh orang asing di negara-negara berkembang, meningkatnya perhatian pada area telah menghimbau untuk memenuhi standar yang bertujuan untuk memastikan hasil yang baik bagi anggota masyarakat serta investor sehubungan dengan investasi agribisnis.

### Prinsip-Prinsip dan Kode Etik

Sebagai sarana menjaga kesejahteraan masyarakat, sejumlah organisasi internasional telah mengusulkan pengembangan kode etik, menentukan prinsip-prinsip, atau pedoman-pedoman yang harus diterapkan untuk pengembangan agribisnis di negara-negara berkembang. Tabel 3 (di bawah) menguraikan masukan yang relevan ke dalam pengembangan pedoman sukarela yang disediakan masing-masing oleh Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional dan Bank Dunia.<sup>46</sup> Pembaca

<sup>45</sup> Perhatikan beberapa perubahan kecil pada format saat reproduksi.

<sup>46</sup> Lebih jauh, pedoman sukarela terperinci mengenai "pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap kepemilikan tanah dan sumber daya alam lain," berada dalam proses pengembangan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan organisasi-organisasi partnernya. Semua ini dimaksudkan agar konsisten dengan 26 kesepakatan internasional yang relevan mengenai pemerintahan yang baik dan akses terhadap tanah dan sumberdaya-sumberdaya alam. Untuk informasi lebih jauh, lihat FAO (2009).

<sup>2</sup> Untuk informasi mengenai aktor-aktor agribisnis yang ada, hubungi Kamar Dagang dan Industri Timor-Leste atau lihat database Peace Dividend Trust (PDT) di <http://timor.buildingmarkets.org/>

hukum dapat membentuk suatu kerangka kerja yang dapat mengatur berbagai aspek yang terkait dengan keterlibatan antara investor dan masyarakat termasuk kewajiban konsultasi, pemberian hak penggunaan kepada pihak ketiga, pertimbangan sosial, lingkungan dan manajemen kekayaan alam, dan aspek-aspek penyelesaian sengketa. Untuk menghindari penundaan yang tidak perlu berkaitan dengan pengembangan berskala kecil, undang-undang dapat membentuk sistem yang terhuyung atau berjenjang di mana kewajiban investor sehubungan dengan berbagai aspek ini meningkat secara proporsional dengan ukuran pembangunan. Seperti telah dibahas di atas, satu opsi kebijakan untuk memastikan pematuhan terhadap aspek sosial dan lingkungan dalam kaitannya dengan investasi skala besar adalah agar Pemerintah Timor-Leste menuntut akreditasi wajib dengan sebuah skema sertifikasi internasional industri sukarela (lihat Lampiran di bawah) Ini bisa menjadi sarana untuk memastikan pematuhan terhadap prinsip-prinsip praktik yang baik yang diajui secara internasional dalam jangka pendek, sementara negara Timor-Leste melanjutkan proses yang lebih berlari-larut dalam mengembangkan kapasitas pemantauan dan penegakan hukum sendiri.

kemerdekaan Timor-Leste tampaknya memiliki kekuasaan ritual dalam sistem tradisional serta posisi dalam administrasi negara yang baru.<sup>3</sup> Sebagai pejabat di atas tingkat *soco*, bukan tidak biasa bagi para pejabat administrasi sub-distrirk dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara *soco* yang berbeda (Nixon 2008, 343), mereka juga dapat diharapkan untuk memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang masyarakat lokal termasuk pemahaman mengenai distribusi penduduk dari berbagai *soco* di dalam sub-distrirk tersebut. Ini sangat penting, karena pola pemukiman masyarakat *soco* biasanya berpencar dan mungkin tidak konsisten dengan batas-batas formal *soco* seperti yang digambarkan dalam peta-peta administratif.<sup>4</sup> Peran-peran historis para pejabat sub-distrirk di masyarakat berarti bahwa para investor harus yakin untuk bekerja erat dengan mereka dalam berhubungan dengan investasi-investasi agribisnis.

#### Kotak 1: Organisasi Sosio Politik Timor-Leste

Organisasi sosio politik formal di Timor-Leste terdiri dari tingkat nasional, 13 distrik dan 65 sub-distriks. Karena negara itu belum didesentralisasi, maka para administrator distrik dan sub-distrirk adalah termasuk pejabat-pejabat pemerintah pusat. Di bawahnya, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang 3/2009 tentang Kepemimpinan Masyarakat dan Pemilihan Mereka<sup>5</sup> ada ‘struktur-struktur kepemimpinan masyarakat’ yang terkait dengan 442 suco resmi (desa-desa berdirikan pola pemukiman yang tersebar).<sup>6</sup> Struktur-struktur kepemimpinan masyarakat’, dikelola oleh *chefs de suco*, yang secara teknis bukan bagian sistem administrasi negara<sup>7</sup> meskipun kenyataannya dua ronde pemilihan lokal telah dilakukan sejak kemerdekaan untuk memilih *concelhos de suco* (dewan suco). *Sucos* sendiri terdiri dari berbagai (mungkin tujuh atau delapan) *aldeias* (dusun), di mana setiap *aldeias* terdiri dari sejumlah *Uma Kain* (rumah tangga atau sanak saudara) yang memiliki hak mereka sendiri atas tanah, kadang-kadang melalui keanggotaan *Uma Knua* (lineage/descent) groups spread throughout the *aldeias*). Meskipun status mereka semi-formal, *sucos* tentu saja masih merupakan tingkatan dasar dari organisasi sosial-politik di Timor-Leste.

#### Tingkat *Suco*

*Suco* adalah tingkat di mana konsultasi-konsultasi paling detail akan dilakukan karena di tingkat inilah seorang investor akan bekerjasama dengan semua orang yang bekerja langsung di dalam proyek. Diskusi kemungkinan akan mulai (mungkin difasilitasi dengan perkenalan oleh administrator sub-distrirk) dengan pertemuan-pertemuan dengan *chefe de suco*, para anggota dewan suco, dan individu-individu senior (katusas) yang secara tradisional bertanggungjawab atas pertanian, alokasi tanah dan air.<sup>8</sup> Diskusi melalui orang-orang akan sangat penting bagi kesuksesan setiap proyek,

<sup>3</sup> Biasanya, sama halnya dengan pemimpin-pemimpin ritual, orang-orang ini adalah bekas anggota *Concelho Nacional da Resistência Timorense* (Dewan Resistensi Nasional Timorese atau CNRT) dari zaman perlawanan yang memiliki administrasi bayangan yang mencerminkan pembagian negara di era-Indonesia ke dalam 13 distrik, 62 sub-distrirk dan 442 desa. Untuk informasi lebih jauh lihat Nixon (2008, 77, 156-174,227-231).

<sup>4</sup> Metzner (1981) membahas tema ini sehubungan dengan Amara si di Timor Barat Indonesia. Baru-baru ini, di Timor-Leste issu ini telah diberikan sejumlah perhatian antara lain oleh UNDevelopment Program, beserta yang lain.

<sup>5</sup> RDTL (2009a).

<sup>6</sup> Informasi mengenai jumlah resmi subdistrirk dan suco diberikan oleh Faustino Cardoso Gomes (pers. Comm., 23 Oktober 2010) dari *Comissão Nacinal de Eleições* Timor-Leste (Komisi Pemilihan Umum Nasional ). Sebagaimana ditunjukkan pada website Kementrian Administrasi Negara dan Pengelolaan Wilayah Timor-Leste (lihat <http://estatal.gov.tl/English/Municipal/main.html>) ada juga suco tidak resmi di beberapa sub-distrirk.

<sup>7</sup> Sebagaimana diuraikan dalam Artikel 2 Undang-Undang kepemimpinan masyarakat (RDTL 2009a), “para pemimpin masyarakat tidak termasuk bagian Administrasi Negara dan Keputusan mereka tidak mengikat Negara.”

<sup>8</sup> Untuk pembahasan mengenai distribusi mengenai pertanggung jawaban terhadap manajemen sumber daya alam sehubungan dengan Dawan dari distrirk Oecusse, lihat Meitzner Yoder (2005, 149-150) dan Nixon (2008, 331).

tidak bersifat diskriminatif dan menghargai kesamaan gender,” untuk mempromosikan ‘kesinambungan lingkungan dan kelanjutan sosial-budaya dalam menggunakan sumber daya alam dan cara hidup tiap-tiap masyarakat local”, dan untuk melindungi “harta tidak bergerak dalam masyarakat dari spekulasi real estate.”

Draf Undang-undang Tanah Timor-Leste versi 5.

namun para investor juga harus pasti untuk bertemu dan bernegosiasi, tepatnya, secara langsung dengan semua orang yang akan terlibat di dalam proyek tersebut setiap hari. Syarat-syarat dan kondisi pengaturan yang diusulkan harus diklarifikasi dan disetujui di tingkat ini bersama peserta-peserta aktual, beserta referensi untuk setiap bantuan pertanian di mana baik investor maupun anggota masyarakat sepakat untuk menyediakannya. Beberapa model yang mungkin tepat (mungkin dalam bentuk yang dihibriddasi) sesuai konteks Timor-Leste, diuraikan dalam Tabel 1 dibawah. Dalam hal manajemen kontrak atau pengaturan kontrak pertanian, pembayaran atau pengaturan pembagian keuntungan juga harus ditetapkan sebelum memulai aktivitas. Jika diusulkan bahwa keuntungan kepada para petani akan disesuaikan dengan fluktuasi pasar (ke salah satu arah), maka parameter-parameter realistik dari fluktuasi ini dan faktor-faktor yang akan menentukan harga akhir harus dijelaskan dengan jelas.<sup>9</sup>

Akhirnya, harus dilakukan usaha-usaha untuk membagi informasi mengenai proyek kepada anggota masyarakat yang tidak dilibatkan dalam proyek tersebut dan juga anggota masyarakat di sekitarnya. Ini sangat penting untuk memastikan pemahaman masyarakat lokal atas sifat dan jangkauan proyek dan untuk mencegah harapan mengenai manfaat-manfaat potensial yang bisa mengalir dari proyek agar tidak menjadi tidak realistik.

**Tabel 1: Contoh-contoh Kemungkinan Model-model Agribisnis di Timor-Leste<sup>10</sup>**

Model	Deskripsi	Komentar-komentar
Pasar-pasar tunai/spot markets	Petani memproduksi di atas lahan mereka sendiri untuk dijual kepada pembeli. Tidak melibatkan kontrak dan tidak ada bantuan pertanian yang disediakan lebih dahulu oleh suatu sponsor. <sup>11</sup>	Ini adalah bentuk agribisnis yang dominan di Timor-Leste. Tidak adanya bantuan pertanian atau lain-lain dari investor merupakan faktor yang memberi anil kepada berlanjutnya tingkat produktifitas yang rendah.
Menggunakan program-program sertifikasi	Seorang investor membayar biaya sertifikasi tanaman yang ditanam oleh masyarakat tertentu. Program sertifikasi mungkin. Misalnya diarahkan untuk produksi organik atau <i>fairtrade labelling</i> .	Investasi dalam sertifikasi dapat memperkuat hubungan antara anggota masyarakat dan investor. Karena keadaanya bisa memperoleh keuntungan dari telah meningkatnya nilai pasar produk yang sudah disertifikasi. Namun, pengaturan ini tidak harus meningkatkan produktifitas tanaman secara keseluruhan.
Periode-Tetap Kesepakatan penggunaan tanah dan menyewa tenaga kerja	Investor menyewa tanah dari para masyarakat sebuah bertanggung jawab sepenuhnya atas penanaman dan manajemen produksi. Investor membayar tenaga kerja lokal untuk mengolah tanah tersebut sebagai karyawan. Masyarakat pemilik tanah mendapat keuntungan dari pembayaran sewa oleh investor dan pekerja individu mendapat keuntungan dari upah kerja.	Kesepakatan penggunaan tanah, walaupun berukuran kecil, kelihatannya sangat penting digunakan sebagai model percobaan pertanian terutama sebelum pengembangan (contohnya dalam hubungan dengan proyek pertanian kontrak). Namun, dalam beberapa kasus, pendekatan bisnis mungkin terpusat secara keseluruhan pada pengolahan pertanian pada tanah sewaan.

<sup>9</sup> Indeks Pasar dilaporkan (Eaton and Shepherd 2001:14-15) sebagai ciri beberapa pengaturan pertanian kontraktan.

<sup>10</sup> Lihat juga Vermeulen and Cotula (2010: 87-97) untuk sebuah diskusi mengenai "model-model inklusif untuk investasi agribisnis," yang memandang bahwa "apa yang bisa berfungsi lebih baik secara lokal ketika masih menarik untuk para investor adalah sangat spesifik dengan konteks, dan masih tergantung pada pemilik tanah, kebijakan, budaya, sejarah dan juga pertimbangan-pertimbangan biofisik dan demografi."

<sup>11</sup> Lihat Simmons (2002, 3-4) untuk referensi-referensi dari aspek-aspek karakteristik pasar primer.



**Gambar 14: Sawah di Aileu (Foto: Rod Nixon)**

dekat area sawa. Dengan demikian, sawa itu telah memberikan dasar yang rapuh bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan tanaman dan kegiatan pengelolaan, dan akses ke situs tersebut hanya mungkin setelah negosiasi yang rumit dan panjang dengan anggota masyarakat yang membahas syarat-syarat keterlibatan, aspek-aspek ketentuan kerja dan kepemilikan tanah. Pada tahun 2011 perusahaan telah merehabilitasi sekitar 25 hektar perkebunan dan memulai kegiatan rehabilitasi kurang intensif pada sekitar 70 hektar lebih dari area sawa. Menariknya, fakta bahwa sawa itu dikeluarkan oleh negara tampaknya telah bertindak sebagai faktor penghambat bagi sejumlah petani penggarap yang tertarik untuk berpartisipasi dalam proyek tetapi khawatir bahwa partisipasi dapat membahayakan klaim mereka atas tanah di lokasi sawa.<sup>43</sup>

Meskipun dalam beberapa situasi sawa atas tanah 'negara' barangkali adalah pilihan yang layak, mungkin sebagai bagian dari paket langkah-langkah, setiap keterlibatan yang sukses antara agribisnis dan masyarakat mungkin memerlukan konsultasi dan negosiasi dengan anggota masyarakat (seperti telah dibahas dalam Bagian 1). Para investor harus berhati-hati untuk memastikan bahwa perkembangan agribisnis yang diusulkan tidak akan mengganggu produksi tanaman pangan, akses ke air, atau panen hasil hutan, makanan liar atau obat-obatan. Perempuan maupun laki-laki harus dikonsultasi mengenai masalah pertanian, sebagai perempuan mungkin menjadi pengguna utama tanah di sekitar lokasi proyek yang diusulkan. Sebagaimana telah dibahas pada bagian Evaluasi dan Manajemen Risiko dari pedoman ini, penting dalam konteks subsistensi di Timor-Leste, untuk kelangsungan pendekatan agribisnis tertentu untuk diuji dan disetel dengan baik sebelum produksi ditingkatkan. Melakukan uji coba lapangan yang cukup juga akan memungkinkan kapasitas petani lokal untuk dinilai, dengan demikian memfasilitasi kebutuhan pelatihan dan tingkat dukungan ekstensi yang akan ditentukan. Jika berbagai kegiatan evaluasi akan dilaksanakan oleh investor, maka akses ke setidaknya beberapa hektar tanah melalui perjanjian penggunaan lahan dengan masyarakat pemilik lahan mungkin diperlukan, bahkan jika tahap perluasan proyek ini dimaksudkan untuk dilakukan atas dasar pertanian kontrak. Pada waktunya, (mungkin tergantung pada skala pengembangan) perjanjian penggunaan tersebut dapat tunduk kepada ketentuan tanah komunitas dari hukum tanah yang akan datang.

#### **Sebuah Undang-undang Pertanahan Masa Depan**

Telah diantisipasi bahwa sebuah Undang-Undang Pertanahan akan disetujui, setelah satu dekade dalam perumusan dan diskusi. Undang-undang pertanahan yang akan datang yang mengatur tanah masyarakat dapat memfasilitasi demarkasi zona perlindungan masyarakat dan areal kekayaan masyarakat dan dengan demikian memberikan dasar untuk melindungi kekayaan masyarakat dari kemungkinan pengambilan tanah secara paksa.<sup>44</sup> Yang terpenting bagi investor dan juga masyarakat,

<sup>43</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Timor Global antara 2009 dan 2011 dan penelitian lapangan dilakukan oleh J4P melalui kerjasama dengan Fundasaun Haburas pada tahun 2010. Lihat juga Nixon 2009.

<sup>44</sup> Lihat khususnya Bab V Rancangan Undang-Undang Pertanahan Timor-Leste (RDTL 2010) mengenai 'Zona Perlindungan dan Kekayaan Masyarakat.' Pasal 22 Rancangan itu memberikan tanggungjawab kepada Negara untuk memastikan bahwa "Semua praktik kebiasaan adat sesuai dengan Konstitusi dan lebih partisipatoris,

	<p>model-model lain). Namun pendekatan itu masih bisa digunakan sebagai suatu pengenalan atas metode-metode penanaman yang lebih intensif.</p> <p>Bagi para investor, mengamankan hak guna atas tanah pertanian akan membutuhkan negosiasi dengan masyarakat pemilik tanah (lihat Bagian 2).</p>
<b>Manajemen Kontrak</b>	<p>Sebuah pengaturan di mana investor mengelola tanah pertanian (masyarakat) melalui pengaturan yang dinegosiasi dengan masyarakat pemilik tanah. Pengalaman di tempat lain menunjukkan bahwa kontrak-kontrak manajemen mungkin dapat melibatkan suatu pengaturan pembagian-keuntungan dari pada pembayaran yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>41</sup> Dalam hal ini, pengaturan manajemen kontrak dapat dilihat seolah-olah mirip dengan pengaturan bagi-hasil.<sup>13</sup></p>
<b>Pertanian Kontrakan</b>	<p>Sebuah pengaturan di mana seorang investor menyediakan bantuan pertanian (seperti bibit unggul, pupuk, penyediaan mesin dan perlakuan) dan petani menanam produk untuk dijual kepada investor. Pada umumnya harga selalu disetujui di muka sebelum produksi dan kuota agak spesifik serta spesifikasinya ditetapkan sebelum penanaman. Pembayaran kemungkinan dilakukan pada saat pengumpulan hasil panen, dikurangi biaya bantuan pertanian yang disediakan oleh investor.<sup>14</sup></p>

tempat tujuan dibandingkan dengan negara-negara Afrika dengan bidang besar lahan produktif, mungkin menampilkan ciri dataran sungai luas yang diperkaya per tahun oleh endapan lumpur (Funk 2010, 61). Walaupun investor diketahui telah mendekati pemerintah dalam kaitan dengan proposal pembangunan dengan skala besar sebagaimana dibuktikan Nota Kesepahaman 2008 antara pemerintah dan sebuah perusahaan agribisnis tentang sewa 50 tahun yang dapat diperbaharu untuk 100.000 hektar 'lahan tidak produktif'<sup>41</sup>, tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa setiap usulan telah melampaui tahap yang paling awal. Pengalaman di negara-negara yang didominasi pertanian subsistensi di kawasan itu menunjukkan bahwa usaha-usaha untuk mendirikan proyek-proyek agribisnis berskala besar tanpa persetujuan dari anggota masyarakat akan menghadapi perlawanan yang besar, dan tingkat kewaspadaan yang dilakukan di Timor-Leste oleh lembaga-lembaga internasional dan organisasi-organisasi masyarakat madani dapat membantu dalam memastikan bahwa setiap proposal agribisnis skaia besar terkena pengawasan ketat. Namun, ada kekhawatiran kurangnya kejelasan hukum mengenai lahan mana yang secara potensial dapat dihibahkan oleh Pemerintah Timor-Leste untuk para investor, dan pemerintah dianggap 'berencana untuk mempercepat pengembangan tanah negara, termasuk melalui pemukiman kembali keluarga-keluarga dan pengambilalihan' (ICG 2010, 16).

#### Mengakses Lahan Pertanian di Timor-Leste

Untuk mempraktekkan pertanian, para investor harus memiliki akses terhadap tanah atau mereka harus terlibat dengan mereka yang memiliki akses terhadap tanah. Di Timor-Leste, keterlibatan dengan anggota masyarakat sangat penting untuk usaha pertanian sukses karena alas-an-alasan historis. Selama masa Portugis dan Indonesia, hanya sebagian kecil dari tanah itu digunakan untuk tujuan pertanian intensif dan kurang dari lima persen lahan di negara itu tampaknya sudah pernah terdaftar atau secara definitif telah ditransfer dari kepemilikan adat (Nixon 2007). Dengan demikian, ekonomi desa secara keseluruhan berdasarkan pada pertanian subsistensi dan kepemilikan adat dan/atau klaim penggunaan tanah kemungkinan tetap berlaku atas sebagian besar lahan pertanian. Bahkan tanah yang secara teknis milik negara, seperti lahan perkebunan misalnya yang sebelumnya disewakan untuk usaha, dapat berada di bawah kepemilikan adat dan/atau klaim menggunakan tanah baik sebelum atau setelah tanggal tanah itu awalnya ditransfer dari kepemilikan adat.<sup>42</sup> Pengalaman dari satu perusahaan yang dijamin sewa atas tanah perkebunan dari negara menunjukkan bahwa dalam dan dari dirinya sendiri, sewa atas tanah 'negara' dapat memberikan dasar yang tidak cukup untuk investasi agribisnis. Dalam hal ini (lihat Kotak 6 di bawah) sewa itu gagal memberikan kepemilikan atas tanah kosong karena tanah tersebut diiduki dan digunakan oleh anggota masyarakat.

#### Kotak 5: Mengapa Menyewa Lahan Pertanian 'Negara' Bukan Merupakan Solusi

Kasus sewa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Timor-Leste kepada seorang investor di tahun 2005 untuk 3000 hektar lahan perkebunan kopi tua di Fatubesi (Ermera) mengilustrasikan alas-an-alasan mengapa para investor harus berhati-hati tentang menyewa tanah pertanian 'negara'. Meskipun tanah negara secara resmi ber inklusi sejarah di perkebunan *Sociedade Agricola Patria e Trabalho* (SAPT) yang terkenal, sewa ini dikeluarkan oleh negara tanpa konsultasi dengan anggota masyarakat dari daerah yang disewa. Terbukti bahwa tanah itu tunduk pada kedua klaim baik hak pemanfaatan maupun klaim kepemilikan atas tanah kosong kepada klaim lain (penggunaan) oleh mereka yang telah memanen hasil sejak waktu itu.

<sup>41</sup> Lihat <http://www.laohamutuk.org/Agri/08Agrofuels.htm#sugarcane>

<sup>42</sup> Contoh, studi dari Clarence-Smith (1992, 11) mengenai pertanian petani penggarap kecil di Timor-Leste menunjukkan bahwa beberapa lahan perkebunan kopi awal terdiri dari areal yang telah dibangun oleh petani lokal sebelum diambil alih oleh pengusaha perkebunan Portugis yang memiliki sedikit minat untuk memperkenalkan cara pengolahan sedikit lebih maju. Tuntutan adat masih berlaku hingga atas areal ini. Sebagai tambahan, kebanyakan perkebunan sewaan ditinggalkan oleh pemilik/manajer pada 1975 (lihat Nixon 2007), dan ada kemungkinan tunduk kepada klaim lain (penggunaan) oleh mereka yang telah memanen hasil sejak waktu itu.



**Area Lahan**

Sistem-sistem pemilikan tanah di Timor-Leste rumit dan melibatkan sejumlah hak kepemilikan dan hak guna. Hak-hak ini meliputi hak masyarakat, hak keluarga, dan hak individu. Juga bukan tidak biasa bahwa tanah yang dilaporkan telah ditransfer kepemilikannya dari kepemilikan tradisional selama zaman Portugis dan Indonesia untuk tetap berada dibawah kepemilikan tradisional. Untuk menghindari kesalahpahaman, kunjungi secara fisik dan mengukur lahan tanah yang diusulkan

<sup>12</sup> Untuk definisi dan informasi lebih jauh lihat Vermeulen dan Cotula (2010, 29-33).

<sup>13</sup> Penelitian yang dilakukan pada tahun 2010 di Timor-Leste oleh J4P bekerjasama dengan Fundasaun Haburas telah mendokumentasi sebuah contoh mengenai seorang investor agribisnis yang bereksperimen dengan menggunakan versi pendekatan ini.

<sup>14</sup> Lihat juga online Sumber Pusat Kontrak Pertanian dari Organisasi Internasional untuk Pertanian dan Bahan pangannya (FAO) di <http://www.fao.org/ag/agc/contract-farming/index-cf/en/>

untuk gunakan sebagai lahan proyek. Lakukan ini bersama pemimpin-pemimpin masyarakat, pemilik tanah, dan lebih baik bersama pemilik tanah dari tempat-tempat terdekat. Perhatikan bahwa Timor Leste belum memiliki sebuah kerangka legislatif lengkap yang mengatur tanah. Hal ini dibahas lebih lanjut dalam Bagian 2.

**Gambar 4: Memeriksa penanda batas yang disengketakan dekat Citrana, Oecusse (Foto: Rod Nixon)**

#### **Pentingnya Konsultasi dengan Perempuan dan Melibatkan Perempuan**

Sangat penting bagi investor untuk melakukan konsultasi dan negosiasi dengan semua pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut, tidak hanya dengan kepala keluarga laki-laki yang mungkin bukan peserta. Seperti alasannya yang telah dibahas dalam pedoman-pedoman ini, mungkin perempuan menjadi kunci suksesnya proyek karena peran mereka dalam aktifitas pertanian, dan harus dilakukan segala usaha untuk melibatkan mereka dalam tahap-tahap konsultasi, negosiasi, pelatihan, pelaksanaan dan distribusi keuntungan (dibahas dibawah).<sup>15</sup>

Untuk menarik partisipasi perempuan di dalam konsultasi dan aktifitas lain diperlukan usaha ekstra dari para investor, misalnya melakukan pengaturan pengasuhan anak agar memungkinkan perempuan menghadiri pertemuan-pertemuan.

**Gambar 5: Para pesera wanita dalam kemitraan agribisnis, Baucau (Foto: Carlos Alves)**



#### **Mendokumentasikan Kesepakatan**

Setelah disepakati dengan autoritas lokal dan para peserta, syarat-syarat kesepakatan harus diuraikan dalam kesepakatan tertulis dengan bahasa yang sesederhana dan sejelas mungkin (diperbaharui sesering mungkin seperlunya) serta sediakan salinan dalam bahasa yang sesuai (Tetum atau Bahasa Indonesia). Kontrak-kontrak itu harus ditandatangani oleh petani-petani individu, termasuk perempuan, dan juga para wakil petani dan individu-individu lain yang relevan. Apabila investor bermaksud untuk memotong sejumlah uang dari pembayaran terakhir sebagai tebusan atas bantuan pertanian yang telah diberikan, ini harus secara jelas disebutkan di dalam kesepakatan.<sup>16</sup> Perhatian ekstra harus diambil untuk memastikan bahwa salinan ganda kesepakatan dibagi-bagi , sebaiknya ditaruh dalam map plastik dan disimpan di tempat yang aman seperti di kantor atau rumah *chefe de suco*, kantor administrator sub-distrirk, dan tempat tinggal ketua kelompok tani. Meskipun persiapan dan distribusi kesepakatan tertulis penting, namun kunci penting untuk mengembangkan suatu hubungan kerjasama yang baik antara para investor dan anggota masyarakat adalah membangun dan memelihara saluran komunikasi yang penuh arti yang dapat diakses. Bagian ini dijelaskan lebih jauh pada Komunikasi dan Penyuluhan (dibawah).

untuk gunakan sebagai lahan proyek. Lakukan ini bersama pemimpin-pemimpin masyarakat, pemilik tanah, dan lebih baik bersama pemilik tanah dari tempat-tempat terdekat. Perhatikan bahwa Timor Leste belum memiliki sebuah kerangka legislatif lengkap yang mengatur tanah. Hal ini dibahas lebih lanjut dalam Bagian 2.

menunjukkan bahwa sektor swasta dapat memainkan peran yang berharga dalam memperkenalkan teknologi baru, menghubungkan para petani ke pasar, dan menanam modal pada intensifikasi pertanian. Namun untuk saat ini meskipun banyak aktor sektor swasta aktif di Timor-Leste, hanya sedikit investasi sektor swasta dalam intensifikasi pertanian yang telah terjadi, meliputi tidak lebih dari beberapa ratus hektar.<sup>38</sup>

Salah satu rintangan utama bagi investasi sektor swasta dalam intensifikasi menyangkut kurangnya sarana yang telah dibangun lewat mana para investor dapat terlibat dengan anggota masyarakat dalam usaha-usaha yang produktif, karena jelas bahwa baik kesepakatan penggunaan lahan maupun kontrak tidak berperan penting dalam agribisnis di Timor-Leste. Dengan tidak adanya mekanisme kontrak yang memungkinkan para investor untuk berinvestasi dalam peningkatan produksi melalui penyediaan bahan-bahan seperti bibit, pupuk, irigasi, atau pelatihan, sektor agribisnis swasta di Timor-Leste cenderung ditandai oleh sekelompok kecil pembeli yang bersaing satu sama lain untuk bagian dari pemanfaatan yang terbatas, dan berkang menurut beberapa laporan. Dengan pengecualian dari perusahaan Cooperative Cafe Timor (CCT) dan satu inisiatif sektor swasta berskala kecil (Timor Global), hampir tidak ada investasi sektor swasta dalam perluasan produksi agribisnis atau perbaikan kualitas.<sup>39</sup>

Seperti dijelaskan dalam studi Diagnostik Integrasi Perdagangan Bank Dunia (2011, 44), kurangnya investasi dalam intensifikasi terutama jelas dalam subsektor kopi, di mana sejumlah kecil perusahaan bersaing untuk memberi bagian dari 'output kopi yang stagnan' dari para petani untuk eksport:

(Salah satu) hambatan utama adalah kurangnya dukungan penyuluhan dari sektor swasta kepada para petani karena potensi masalah parasitisme/pedagang pra tunai. Ada sedikit insentif bagi sektor swasta untuk memberikan saran ekstensi kepada para petani karena manfaatnya dapat direbut oleh pesaing.

Salah seorang pedagang kopi<sup>40</sup> mengatakan bahwa 'hasil per hektar saat ini sangat rendah dan apabila ada kecenderungan untuk turun, bisa mengurangi industri kopi kami menjadi tidak relevan dalam perdagangan internasional. Sebagaimana diuraikan dalam Studi Diagnostik Perdagangan Bank Dunia sektor Kopi Timor-Leste, yang terdiri lebih dari 50.000 hektar areal perkebunan, telah menjadi sumber uang tunai untuk kira-kira 67.000 keluarga diperkirakan sebesar sekitar 30 persen dari populasi (Bank Dunia 2011, 41, 46). Karena itu, jika produktivitas kopi menurun akan berdampak negatif pada pendapatan kas hampir sepertiga dari populasi. Sementara itu, investasi dalam strategi manajemen yang baik, seperti penanaman kembali dan pemangkasan diperkirakan memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas kopi di Timor-Leste sekitar antara tiga dan empat kali, dengan aliran- manfaat kepada para anggota penduduk desa.

## **2.2 Pertanian dan Tanah di Timor-Leste**

### **Konteks Timor-Leste**

Investasi agribisnis di negara-negara berkembang merupakan sebuah bidang yang terus sukses mengikat para investor dan para petani dalam suatu hubungan yang saling mengutungkan, berdasarkan pada bonus yang bisa dibayar oleh investor untuk produksi dari lahan untuk mana urus sertifikasi organiknya. Dalam hal ini, para petani menjual kepada investor di luar kepentinaan yang membeli tanpa kontrak, karena mereka tidak akan bisa mendapat harga yang sama dari pembeli lain.

<sup>38</sup> Terutama, beberapa contoh dari kesuksesan investasi melibatkan skema sertifikasi organik yang kelihatan sukses mengikat para investor dan para petani dalam suatu hubungan yang saling mengutungkan, berdasarkan pada bonus yang bisa dibayar oleh investor untuk produksi dari lahan untuk mana urus sertifikasi organiknya. Dalam hal ini, para petani menjual kepada investor di luar kepentinaan yang membeli tanpa kontrak, karena mereka tidak akan bisa mendapat harga yang sama dari pembeli lain.

<sup>39</sup> Untuk informasi lebih dalam lihat Nixon (2009).

<sup>40</sup> Bobby Lae, dikutip di dalam Timor-Leste (2009a, 29).

Saat ini, mayoritas penduduk Timor-Leste bertahan dengan budidaya tanaman subsistensi. Selain itu, produktivitas pertanian ‘sangat rendah menurut standar dunia dan regional’, dengan hasil tanaman pangan sekitar 20 sampai 35 persen dari yang dicapai di berbagai Negara Asia.<sup>34</sup> Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas termasuk rotasi tanaman minimal, petani memiliki pengetahuan teknis yang terbatas, kurangnya akses kepada varietas hasil tinggi dan bantuan seperti pupuk (Young, Santos, and Shetty 2010, 15). Selain itu, rendahnya tingkat produktivitas diperparah oleh kerugian pasca panen yang berasal dari praktik penyimpanan makanan yang buruk (Timor-Leste 2008, 17).



Gambar 11-13: Kayu cendana masih bisa ditemukan di Timor-Leste. Sebagaimana ditunjukkan oleh gambar-gambar dari distrik Covalima ini, banyak keluarga menanam kayu jati sebagai sumber kayu dan uang tunai, dan sejak periode pendudukan Indonesia. (Gambar: Rod Nixon)

Saat ini, inisiatif-inisiatif seperti proyek Benih Kehidupan<sup>35</sup> didukung AusAid memainkan peran penting dalam mempromosikan komoditas utama yang berpenghasilan lebih tinggi untuk meningkatkan mata pencarihan. Akan tetapi prospeknya masih tetap buruk, di mana satu evaluasi menyimpulkan bahwa ‘tidak ada peningkatan signifikan dalam produksi makanan’ terjadi selama periode 2000-2007.<sup>36</sup> Analisis lain memprediksi bahwa meskipun tingkat produksi akan meningkat, namun peningkatan produksi dapat dilampaui oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi ... yang diharapkan terjadi dalam jangka menengah” (Timor-Leste 2008, 33).

#### Pentingnya Investasi Sektor Swasta

Besarnya tantangan pembangunan pertanian di Timor-Leste, dan tantangan-tantangan yang berhubungan dengan pengembangan sebuah layanan extension pertanian publik yang efektif,<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Menurut Young, Santos, dan Shetty (2010, 15), produksi tanaman pangan di tahun 2007 mendekati 70,000 ton jagung, 50,000 ton ubi kayu, 45,000 ton beras, and 34,000 ton kentang. Lihat juga RDTL (2009b, 12-14).

<sup>35</sup> Lihat <http://www.seedsoffitmor.org/>. Perhatikan bahwa proyek memberikan perhatian khusus terhadap jagung, beras, kentang, ubi kayu dan kacang tanah.

<sup>36</sup> Lihat Young, Santos, dan Shetty (2010, 2), yang mengacu pada data Dana Moneter Internasional/International Monetary Fund (IMF) dan FAO.

<sup>37</sup> Menurut dokumentasi pemerintah (Timor-Leste 2008, 15) “MAF telah mengidentifikasi keterbatasan-keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan dan penyebarluaran mereka, dan tidak adanya sebuah sistem monitoring kinerja yang efektif sebagai kendala utama terhadap kemampuan MAF untuk mengimplementasikan program-program berprioritas tinggi di lapangan dan pelayanan kepada para petani sesuai waktu yang ditentukan.” Kesimpulan ini juga tercermin dalam hasil penelitian terbaru dari Studi Diagnostik Integrasi Perdagangan (DTIS) yang telah diselenggarakan oleh Bank Dunia (2011, 73).

#### Evaluasi Terlebih Dahulu

Akhirnya, meskipun konsultasi dan negosiasi dengan pemimpin-pemimpin masyarakat dan semua yang lain yang kemungkinan akan dilibatkan dalam sebuah proyek agribisnis sangat penting, namun para investor diingatkan untuk tidak mengusulkan sebuah proyek yang di definisi dengan baik berskala penuh hingga evaluasi yang memadai atas lingkungan fisik dan sosial telah dilakukan. Lebih dikehendaki agar kelayakan pendekatan yang dimaksud diuji selama diimplementasikan melalui percobaan dan kemudian disempurnakan secara tepat. Hal ini dijelaskan dibawah pada bagian Evaluasi dan Penilaian Resiko dan Manajemen .

#### 1.2 Evaluasi dan Manajemen Resiko

Pengalamanki di juridiksi-juridiksi lain menunjukkan bagaimana kegagalan melakukan percobaan menanam yang cukup dan aktifitas evaluasi yang luas, seperti penilaian terhadap kapasitas lokal, dapat menyebabkan gagal panen dan ketidakpuasan. Hal ini dapat mengelikkan hati anggota masyarakat untuk bekerjasama lebih jauh dengan para investor, kemungkinan untuk waktu yang lama. Sebagai contoh, Eaton menyebutkan sebuah kasus program pertanian kontrakran pisang yang gagal di Fiji dimana faktor-faktor yang memberi kontribusi terhadap kegagalan termasuk tanah yang tidak cocok,<sup>17</sup> dan di mana kegagalan proyek tersebut meninggalkan suatu kesan negatif kepada semua yang terlibat dan bertahan selama 40 tahun. Karena kebutuhan akan intensifikasi pertanian di Timor-Leste, dan juga keinginan supaya semua pihak mendapat keuntungan melalui usaha pembangunan desa, maka penting sekali bahwa para investor mencoba pendekatan yang mereka maksudkan untuk memastikan kelayakannya dengan konteks sosial dan lingkungan. Apabila tidak melakukan hal ini sebelum perluasan artinya menghadapkan bukan hanya investasi mereka sendiri terhadap risiko, tetapi juga terhadap mata pencarihan anggota masyarakat yang terlibat dalam proyek tersebut dan kesedian anggota bisa belajar pendekatan-pendekatan baru di masa yang akan datang.

Pastikan untuk mengevaluasi pendekatan anda sebelum melakukan perluasan dan tidak mendatangkan risiko tidak hanya terhadap investasi anda, tetapi juga terhadap mata pencarihan anggota masyarakat dan kesedian anggota masyarakat untuk bekerjasama dengan aktor-aktor dari luar di masa yang akan datang

#### Sifat Rapuh dari Keberadaan Subsistensi

Seperi sudah dilihat, sifat subsistensi ekonomi pedesaan, teknologi pertanian dasar yang sedang dipakai saat ini, tingkat produktivitas pertanian yang rendah dan sifat konservatif dari penduduk desa berarti bahwa perhatian khusus harus diberikan untuk evaluasi proyek-proyek di dalam konteks Timor-Leste. Paling penting untuk dicatat adalah bahwa petani-petani subsistensi di Timor-Leste memiliki suatu keberadaan yang rapuh dengan sedikit ruang untuk membuat kesalahan, karena itu mereka tidak mampu untuk menginvestasikan upaya-upaya dalam usaha pertanian yang tidak dipertimbangkan secara matang. Karena waktu dan lahan yang terbatas, partisipasi dalam proyek-proyek agribisnis berarti kemungkinan bisa mengurangi investasi untuk penanaman tanaman pangan tradisional. Karena itu, jika proyek agribisnis gagal, para petani bisa menghadapi resiko hebat terhadap mata pencarihan mereka. Walaupun transfer pendekatan-pendekatan pertanian yang baru kepada semua anggota masyarakat desa merupakan sebuah prioritas penting, namun

<sup>17</sup> Informasi terkini mengenai studi kasus ini (Eaton berikutnya) menunjukkan bahwa pupuk yang diberikan kepada para petani untuk melawan tanah tandus yang menonjol yang berhubungan dengan studi kasus ini sudah dijual untuk mendapatkan uang.

kemampuan masing-masing investor dan petani-subsistensi untuk bertahan beberapa siklus panen yang gagal sangat berbeda, karena apa yang dialami hanya sebagai kerugian keuangan atau margin keuntungan yang dikorbankan bagi seorang investor dapat mendorong sekelompok petani subsistensi ke tepi jurang (lihat bagian manajemen resiko di bawah).

#### **Menetapkan Kelayakan Pendekatan**

Untuk memaksimalkan peluang sukses dan mengurangi sejauh mungkin tingkat resiko untuk semua pihak yang berhubungan dengan pengaturan usaha bersama, maka merupakan tanggung jawab investor untuk memastikan, dengan menanggung resiko dan biaya sendiri, bahwa pendekatannya yang dimaksud layak. Ini harus dicapai dengan mencari sifat lingkungan fisik dan melakasankan percobaan-percobaan awal sebelum melibatkan petani dalam jumlah yang besar dalam sebuah usaha. Dalam membuat kesimpulan tentang kelayakan pendekatan berdasarkan pada percobaan-percobaan tersebut, para investor harus memiliki pengalaman internasional yang menunjukkan bahwa hasil-hasil dari program-program percobaan biasanya lebih besar daripada hasil-hasil kebun petani.<sup>18</sup>

## Percobaan pertanian harus digunakan untuk mengukur kapasitas lokal dan kebutuhan-kebutuhan pelatihan, dan juga kecocokan metode-metode produksi yang dimaksud

Percobaan tidak hanya menguji dan menyempurnakan aspek-aspek pertanian secara teknik tetapi juga mengukur tingkat kapasitas anggota masyarakat (melalui, misalnya, mempekerjakan anggota masyarakat setempat dalam aktifitas percobaan pertanian) untuk memungkinkan suatu penilaian pelatihan dan kebutuhan penyuluhan.



**Gambar 6:** Sebagaimana ditunjukkan oleh gambar pengeringan kopi di Ermara, skala kecil di mana produksi dan pemrosesan untuk pasar-pasar komersial berlangsung sampai saat ini berarti bahwa para investor harus berhati-hati dalam menilai tingkat pelatihan yang dibutuhkan (Foto: Edio Guterres)

Dalam hubungan dengan evaluasi kelayakan pendekatan-pendekatan pertanianlah kebutuhan akan lahan, walaupun hanya beberapa hektar, di mana investor bisa mengontrol secara langsung menjadi sebuah masalah yang sangat penting. Sementara dalam beberapa kasus tanah pemerintah yang kosong mungkin tersedia untuk tujuan ini. Ada kemungkinan bahwa dalam kebaruan kasus negosiasi untuk mendapat akses kepada tanah untuk percobaan atas dasar sewa jangka pendek harus dilakukan dengan anggota masyarakat. Sebagaimana telah didiskusikan pada bagian Pembangunan Desa di Timor-Leste dan Sektor Swasta (di bawah), undang-undang masa mendatang

<sup>18</sup> Lihat Eaton dan Shepherd (2001, 31).

melibatkan seorang facilitator yang mendengarkan cerita dari kedua belah pihak dan kemudian memberikan keputusan yang mengikat, mungkin tidak memadai; sebagai gantinya model mediiasi mungkin lebih cocok. Dalam hal ini, seorang mediator yang disetujui oleh kedua belah pihak kemudian akan mendorong masing-masing pihak untuk memahami posisi orang lain sehingga hasilnya disepakati sesuai dengan kebutuhan semua pihak.

Kontrak antara pihak-pihak yang membuat sebuah kesepakatan agribisnis bisa memasukkan hal-hal berikut:

- Pihak-pihak harus mengakui sifat sukarela dari kemitraan dan pentingnya bagi kedua belah pihak untuk bekerja keras guna mencegah dan menyelesaikan kesalahpahaman melalui dialog.
- Identifikasi sebuah model dasar resolusi sengketa untuk digunakan apabila masalah-masalah yang disengketakan tidak bisa diselasaikan melalui dialog. Ini bisa melalui model mediasi yang difasilitasi oleh individu atau juri yang disetujui oleh kedua belah pihak. Untuk menghindari mengorbankan komitmen para pihak untuk menyelesaikan kesalahpahaman melalui dialog, Disarankan agar fasilitator hanya bisa diidentifikasi apabila mereka dibutuhkan bukan mengidentifikasi mereka terlebih dahulu.
- Bahwa akan menggunakan pengadilan sebagai pilihan terakhir, atau yang berhubungan dengan masalah-masalah serius atau kriminal.

## 2. Pembangunan Desa di Timor-Leste dan Sektor Swasta

### 2.1 Ekonomi Pedesaan Timor-Leste

Timor-Leste dikenal pada masa lampau dengan sumberdaya-sumberdayanya yang kaya, dan sejarah menggambarkan bagaimana pulau Timor pada awalnya memikat perhatian para penjajah Eropa karena reputasinya sebagai sumber kayu cendana yang banyak diminati.<sup>31</sup> Meluasnya industri kopi pada abad ke-19 juga merupakan sebuah prestasi yang luar biasa, walaupun awal yang sulit dan sekarang perlu untuk rehabilitasi (dibahas di bawah).<sup>32</sup> Meskipun gambaran industri utama dari masa lampau ini, berbagai bentuk geografis pulau Timor secara historis memberikan tantangan. Tantangan-tantangan ini meliputi pola curah hujan yang tidak dapat diprediksi dan sifat aquifer alami yang dapat berubah. Berkaitan dengan karakteristiknya, kecenderungan kekeringan untuk mengakibatkan kekurangan pangan (Ormeling 1957, 21, 239–40), dan telah diamati pula bahwa untuk para penghuni awal, pola hidrologi Timor mengharuskan ‘bentuk pemukiman dan budidaya tanaman yang tersebut.’ (Fox 1988, 262).<sup>33</sup>

mencapai proporsi-proporsi yang “luar biasa” dari waktu ke waktu (Bank Dunia 2006, 19). Oleh karena itu, sangat penting mengidentifikasi saluran penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebelum mulai melakukan sebuah kesepakatan yang melibatkan investor dan anggota masyarakat. Di Timor-Leste, karena alasan-alasan seperti sifat pola pemukiman penduduk dan organisasi soso-politik, jangkauan pemerintah secara historis terbatas, kurang percaya terhadap sistem pengadilan di masa pendudukan pemerintah Indonesia dan tidak adanya akses dan tidak biasa ke pengadilan bagi banyak orang, jadi forum pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui *suco* masih dipakai secara luas di negara ini. Forum-forum suco ini cenderung menekankan pada tiga hal seperti (1) klarifikasi masalah original dan kesalahan (melalui pengujian “cerita” lengkap yang berhubungan dengan sengketa), (2) negosiasi untuk kompensasi, dan (3) rekonsiliasi antara semua pihak.

<sup>31</sup> Seperti sejarawan Charles Boxer (1960, 350) mengamati, ‘jauh sebelum Vasco da Gama mengelinlingi Tanjung Harapan Baik, Timor dikenal oleh orang Cina sebagai sumber suplai kayu cendana terbaik mereka.’

<sup>32</sup> Untuk membaca lebih jauh tentang pengembangan industri kopi di paruh kedua abad 19, lihat Clarence-Smith (1992), Gunn (1999, 160–163) dan Davidson (1994, 8,90-95).

<sup>33</sup> Menurut sebuah laporan Kementrian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (MAFF), pulau Timor juga “memiliki tanah yang secara relatif tidak produktif, kesuburan rendah, dan rapuh” (Timor-Leste 2004, 1).

para investor akan mendukung acara tradisional berkala untuk memastikan suksesnya kerjasama agribisnis tersebut.

## Setidaknya, investor diharapkan untuk mendukung acara tradisional untuk memastikan sukses kerjasama agribisnis tersebut

Menyediakan keuntungan untuk masyarakat merupakan sesuatu yang penting dan memperkerjakan anggota masyarakat sebagai pekerja ekstensi atau anggota personel yang lain adalah hal yang biasa dalam agribisnis. Bagaimanapun, pengalaman di tempat lain mengenai kontrak pertanian telah menunjukkan ‘suatu tendensi bagi pengembangan ketergantungan secara bertahap pada perusahaan yang melakukan kontrak untuk hal-hal non-pertanian’ (Silva 2005, 18), dan pengembangan hubungan ketergantungan yang berlebihan antara masyarakat dan investor harus dihindari.



Gambar 8-10: Seperti dalam kasus event di Baucau ini, penting bagi kerjasama agribisnis untuk dirayakan dengan pesta tradisional . (Fotos: Carlos Alves)

### 1.5 Manajemen Sengketa

Sebagaimana telah dibahas di atas pada bagian Konsultasi, Negosiasi, dan Komunikasi dan Perluasan, pengalaman di tempat lain menunjukkan bahwa cara terbaik untuk mencegah sengketa tanpa menganggu kemitraan antara investor dan anggota masyarakat adalah dengan melakukan pertemuan-pertemuan rutin yang memungkinkan para petani bertemu dengan para utusan investor. Pertemuan rutin memberikan kesempatan bertukar informasi antara para petani dan investor dan mencegah timbulnya kesalahpahaman yang bisa mengarah kepada sengketa. Penting bagi kedua belah pihak untuk mengakui bahwa kemitraan agribisnis pada dasarnya merupakan *kemitraan sukarela* antara kedua belah pihak dan itu semua tergantung kepada kedua belah pihak untuk membuat kemitraan tersebut berjalan dengan baik. Kedua belah pihak harus sadar bahwa apabila mereka tidak bisa menyelesaikan jenis kesalahpahaman atau sengketa di antara mereka, maka pada kenyataannya hal ini bisa tidak terselesaikan dan kemitraan itu tidak bisa dilanjutkan.

Apabila sengketa berkembang di mana tidak bisa diatasi melalui dialog antara pihak-pihak utama, atau mungkin melibatkan pihak baru, disarankan agar sistem pengadilan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir<sup>30</sup> dan bahwa para pihak menyepakati model dasar penyelesaikan sengketa yang

<sup>30</sup> Sehubungan dengan kontrak kerjasama pertanian, pengalaman internasional menunjukkan bahwa investor agribisnis dan petani jarang sekali membawa kasus mereka ke pengadilan mengenai pelanggaran kesepakatan, meskipun hal ini sama sekali tidak meniadakan pentingnya menjelaskan secara detail sifat dasar kesepakatan diantara pihak-pihak (Eaton and Shepherd 2001, 62; Doria n.d.). Dalam konteks Timor-Leste, peluang bagi satu pihak untuk menuntut pihak yang lain ke pengadilan sama sekali tidak ada kemungkinannya karena sifat sistem hukum formal yang baru didirikan dan kecenderungan menunda kasus-kasus sebelum pengadilan

bisa memfasilitasi pembatasan zona perlindungan masyarakat dan areal kepemilikan masyarakat dan menetapkan suatu kerangka untuk mengatur kerjasama antara investor-investor dari luar dan anggota masyarakat di semua daerah ini.

### Penilaian Dampak

Di mana sebuah pengembangan yang diusulkan memiliki ukuran atau sitat sedemikian sehingga ada kemungkinan terjadi dampak-dampak lingkungan dan/atau sosial yang signifikan (termasuk potensi untuk memicu sengketa tanah atau bentuk-bentuk sengketa yang lain), investor harus membentuk sebuah penilaian dampak independen baik diwajibkan maupun tidak oleh hukum. Penilaian dampak harus mengevaluasi sejauh mana perempuan dan laki-laki menggunakan areal lahan yang diusulkan untuk proyek untuk tujuan seperti tanaman pangan, akses air, panen hasil-hasil dari hutan, makanan atau obat-obatan alami. Anggota masyarakat yang menggunakan lahan untuk tujuan-tujuan tersebut kemungkinan bukan anggota kelompok-kelompok pemilik tanah utama di areal yang dimaksud tetapi kebutuhan mereka juga masih harus diperhatikan dalam rancangan proyek dan sisakan sebagian tanah kepada masyarakat untuk melanjutkan penggunaannya. Proses penilaian dampak harus mencantumkan komponen gender untuk mengevaluasi dampak potensial proyek terhadap para perempuan di dalam masyarakat. Proses penilaian dampak harus dipandang sebagai suatu kesempatan bukan hanya untuk menghilangkan atau mengurangi dampak negatif potensial tetapi juga untuk mengidentifikasi sarana-sarana di mana proyek dapat memaksimalkan dampak-dampak positif untuk anggota masyarakat, sehingga memberi kontribusi kepada pengembangan kehendak baik dan kepercayaan antara investor dan anggota masyarakat.

### Manajemen Resiko

Sukses suatu usaha agribisnis komersial bisa terancam oleh perkembangan-perkembangan termasuk kegagalan suatu hasil bumi untuk dijual di pasar, investor bankrupt atau keadaan lain yang tidak terduga. Untuk menghindari situasi-situasi di mana kesejahteraan atau stabilitas anggota masyarakat yang terlibat di dalam suatu hubungan kerjasama agribisnis dengan seorang investor dihadapkan pada suatu resiko serius melalui pengembangan semacam itu, maka para investor dan pihak-pihak lain (seperti lembaga-lembaga pemerintah atau organisasi masyarakat madani) harus benar-benar mendorong anggota masyarakat yang bekerjasama dengan seorang investor untuk mempertahankan suatu tingkat minimum produksi subsistensi. Tingkat produksi subsistensi ini harus cukup untuk mendukung mata pencarian dan stabilitas peserta proyek dan tanggungan mereka apabila terjadi kegagalan proyek.<sup>19</sup>

Gambar 7: Panen padi di Viqueque (Foto: Rod Nixon)



Asuransi hasil bumi untuk para petani kelihatan tidak tersedia di Timor-Leste untuk kurung waktu lama tetapi para investor harus memperhatikan sarana-sarana lain yang lewat mana mereka dapat memberi dukungan kepada para petani apabila keuntungan proyek yang diprediksi gagal terlaksana. Ini adalah suatu bidang penting untuk para investor untuk dipertimbangkan karena resiko potensial

<sup>19</sup> Untuk pembahasan lebih jauh berdasarkan pengalaman dari yurisdiksi yang berbeda lihat Eaton dan Shepherd (2001, 66, 103).

terhadap mata-pencahanian dapat menjadi penghalang besar kepada petani-petani subsistensi yang mempertimbangkan bekerjasama dengan seorang investor.<sup>20</sup>

**Kapasitas Organisasional dan Manajemen Investor**  
Seperti sudah dibahas sehubungan dengan kontrak kerjasama pertanian (Eaton forthcoming), anggota masyarakat desa berhak atas informasi tentang latar belakang keuangan dan kemampuan teknis investor sebelum bekerjasama dengan mereka dan para investor harus siap untuk menyediakan ini. Kegagalan investor untuk sungguh-sungguh memperhatikan semua persoalan operasional sehari-hari bisa membahayakan kelangsungan hidup proyek. Variasi-variasi yang tidak teruji pada siklus penanaman biasa, penyediaan perlengkapan yang tidak sesuai karena kurangnya percobaan di lapangan, dan kelalaian dalam mengumpulkan hasil panen pada waktunya karena komunikasi yang tidak memadai semuanya merupakan sarana dimana rasio laba modal / returns on investment yang diberikan oleh anggota masyarakat untuk proyek tersebut dapat terancam oleh aksi yang tidak tepat atau tidak ada aksi dari seorang investor. Contoh-contoh ini, yang diambil dari kerjasama antara para investor dan masyarakat-masyarakat dalam konteks Timor-Leste,<sup>21</sup> diuraikan dalam Tabel 1 (di bawah).

Tabel 2: Contoh Praktek Manajemen Investor yang Buruk Didokumentasi dalam Konteks Timor-Leste.

<b>Contoh 1:</b> <b>Kurangnya perhatian terhadap siklus musiman</b>	Pada permulaan proyek investor memperkenalkan sebuah model pertanian yang baru dari negara luar. Pegawai ekstensi sudah memberi instruksi kepada petani di beberapa tempat untuk mempersiapkan tanah dan menanam pada bulan Januari daripada di awal musim hujan (November/Desember) seperti biasa. Beberapa petani mempertanyakan instruksi itu tetapi tetap menanam pada bulan Januari seperti yang diminta. Tetapi, di salah satu tempat panen gagal, karena kekurangan air menjadi faktor penghambat utama.
<b>Contoh 2:</b> <b>Pemberian perlengkapan yang tidak cocok dan kurangnya perhatian terhadap aspek kepemilikan tanah</b>	Investor meminta para petani untuk melakukan pembersihan lahan terlebih dahulu guna mempersiapkan tanah untuk beberapa tahap pengolahan menggunakan traktor sebelum menanam. Namun, lahan tersebut sebelumnya tidak pernah dipakai untuk penanaman intensif dan mesin-mesin tidak memadai untuk mengerjakan pekerjaan tersebut (sebuah faktor yang seharusnya ditunjukkan melalui sebuah evaluasi menyeluruh). Karena kegagalan mekanis yang terjadi sekarang, hanya satu per tiga dari lahan yang telah disiapkan sebagian untuk penanaman yang ditanam, mengikis kepercayaan masyarakat dalam proyek tersebut dan mengacam rencana-rencana untuk perluasan proyek.
<b>Contoh 3:</b> <b>Gagal untuk mengumpulkan hasil panen pada waktunya</b>	Kurang baiknya komunikasi dan pemahaman atas tanggung jawab dan peran yang terjadi antara investor dan masyarakat berarti bahwa masyarakat tidak mengerti bahwa sebenarnya mereka yang bertanggung jawab untuk panen produksi tersebut. Akibatnya, masyarakat tidak melakukan panen produksi tepat waktu dan banyak tanaman menjadi rusak. Jadi kedua pihak yang rugi karena komunikasi yang buruk dan pemahaman atas peran masing-masing. Setelah insiden ini, perusahaan tersebut tidak bisa melanjutkan proyek disebabkan oleh perlawanan masyarakat (walaupun proyek tersebut dapat dilanjutkan lagi nanti).

mempertimbangkan bekerjasama dengan seorang investor.<sup>20</sup>

#### Membayar Perempuan untuk Pekerjaan Mereka

Pengalaman dengan proyek-proyek agribisnis di Timor-Leste saat ini menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat secara rutin dalam pekerjaan sebagai anggota keluarga petani, tetapi kadang-kadang tidak diikutsertakan bukan hanya dari pelatihan dan kesempatan membuat keputusan tetapi juga dari menerima pembayaran langsung atas pekerjaan mereka. Penyisihan perempuan dari berbagai bidang seperti ini, dipahami telah membawa kepada sejumlah kesulitan yang dialami oleh proyek-proyek. Yang tampak jelas, adalah bahwa dengan membayar langsung kepada perempuan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan dalam proyek agribisnis tersebut, para investor akan meningkatkan komitmen para pekerja perempuan terhadap proyek tersebut. Selain itu, dengan membayar langsung kepada perempuan, para investor bisa memberi kontribusi untuk meningkatkan status perempuan dalam keluarga, suatu pengembangan yang berpotensi untuk meningkatkan penghasilan keluarga.<sup>29</sup> Oleh sebab itu, para investor harus membayar langsung kepada perempuan atas pekerjaan mereka dan membayar mereka di dalam masyarakat mereka, karena kewajiban keluarga dapat mencegah perempuan untuk bisa keluar dari dalam masyarakatnya untuk mencari uang. Dengan mempertimbangkan masuknya teknologi seperti perbankan telefon selular mungkin bisa menghadirkan kesempatan baru untuk transfer uang yang berhubungan dengan kerjasama pertanian di masa mendatang, para investor harus memberikan perhatian khusus untuk memastikan bahwa pembayaran ditransfer kepada para penerima yang dimaksud.

#### Memberi Manfaat kepada Masyarakat Luas

Selama penelitian yang menjadi masukan untuk pedoman ini beberapa *katuas*, atau orang tua mengungkapkan kekecewaan bahwa meskipun mereka telah memainkan peran sebagai pemimpin masyarakat dalam memfasilitasi kerjasama antara seorang investor dengan anggota masyarakat, tetapi manfaat dari kerjasama itu hanya dinikmati oleh semua yang terlibat langsung dalam proyek tersebut. Ini menyoroti pentingnya dalam konteks sosial dari *suco*, untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat secara luas ketika merencanakan dan melakukan suatu kerjasama. Sejauh mana strategi bisa diimplementasikan untuk memberi manfaat kepada masyarakat luas akan berbeda sesuai skala dan sifat proyek, tetapi pemikiran harus diberikan pertama-tama kepada manfaat yang dapat diberikan dengan biaya tambahan sedikit atau tanpa biaya tambahan atau ketidaknyamanan. Ini dapat termasuk penyampaian saran eksensi kepada audiensi luas yang terlibat secara langsung di dalam proyek tersebut, atau bila mungkin membeli produksi tambahan dari yang diproduksi sesuai kontrak, oleh sebab itu sediakan pasar untuk anggota masyarakat. Pelatihan yang lebih terspesialisasi di beberapa bidang untuk mengurangi kebutuhan akan sumber tenaga kerja dari daerah lain juga penting untuk dipertimbangkan, dan temuan-temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelatihan dalam pengoperasian dan pemeliharaan traktor dan mesin-mesin yang lain terbukti populer. Investor harus berhati-hati dalam melibatkan perempuan dalam program-program pelatihan teknik, dan hindari membuat asumsi-asumsi tentang pekerjaan apa yang bisa dilakukan oleh 'laki-laki' atau 'perempuan'. Dalam diskusi-diskusi yang dilakukan dengan anggota masyarakat selama persiapan pedoman-pedoman ini, masyarakat mengatakan bahwa jika mendapat kesempatan, mereka akan bersedia untuk partisipasi dalam kerjasama dengan investor setempat untuk rehabilitasi jalan. Anggota masyarakat mengatakan mereka bersedia untuk berpartisipasi dalam sebuah bentuk kesepakatan kerja dibayar dengan makanan. Minimal, masyarakat berharap

<sup>20</sup> Untuk informasi lebih jauh mengenai resiko dan kendala-kendala yang berhubungan dengan kerjasama agribisnis, lihat Eaton (2011).

<sup>21</sup> Berdasarkan pada penelitian J4P di tahun 2009 dan penelitian yang dilakukan J4P pada 2010 bekerjasama dengan Fundasaun Haburas.

<sup>29</sup> Sebagaimana diuraikan dalam sebuah laporan terkini dari FAO (FAO 2011, 43), "bukti dari Africa, Asia dan Amerika Latin secara konsisten menunjukkan bahwa keluarga-keluarga mendapat keuntungan apabila para wanita memiliki status yang lebih tinggi dan kekuasaan di dalam keluarga. Meningkatnya kontrol atas pendapatan memberikan para wanita sebuah posisi tawar-menawar atas keputusan-keputusan ekonomi mengenai konsumsi, investasi dan produksi. Apabila para wanita memiliki lebih banyak pengaruh atas keputusan-keputusan ekonomi, maka keluarga-keluarga mereka mengalokasikan lebih banyak pendapatan atas makanan, kesehatan, pendidikan, pakaian anak-anak dan nutrisi anak-anak."

kadang mencapai 60 sen per kilogram atau lebih) perusahaan mengatakan bahwa ia masih bisa menjamin minimum lima sen per kg lebih banyak daripada pembeli-pembeli lain.<sup>27</sup>

Anggota masyarakat kemungkinan akan tertarik kepada kemitraan dengan seorang investor karena mempunyai prospek mendapat akses ke teknologi baru dan pasar, pengembangan pengetahuan dan keahlian baru, dan meningkatkan pendapatan kas mereka. Pengalaman di Timor-Leste saat ini menunjukkan bahwa karena pasokan uang sangat sulit dalam ekonomi desa, yang sebagian besar subsistensi, maka penyebaran pembayaran sepanjang siklus panen layak dipertimbangkan. Meskipun kadang bukan suatu ciri yang umum dari beberapa model agribisnis, penyebaran pembayaran tersebut apabila mungkin (terutama pada saat-saat penting yang terkait dengan pembersihan rumput, penanaman, penyiraman dan panen) mungkin dapat memberi kontribusi supaya para petani tetap berminat terhadap proyek.

#### Pentingnya Pembayaran Langsung dan Adil kepada Peserta Anggota Masyarakat

Seperti sudah dibahas di atas pada bagian Komunikasi dan Extension, rantai komunikasi yang panjang dan kaku antara para investor dan para petani seprtinya tidak akan membawa kepada hasil yang sukses karena penyiaran informasi yang kurang baik dan kurangnya kesempatan untuk klarifikasi. Demikian pula, sehubungan dengan distribusi keuntungan, saluran-saluran yang diperlukan dan tidak langsung dengan menggunakan para perantara akan meningkatkan resiko isu-isu transparensi (lihat Tabel 5 di bawah). Bahkan koperasi masyarakat, menurut data dari lapangan yang menjadi sumber pedoman ini, tidak kebal terhadap penyalagunaan keuangan dan masalah transparansi. Oleh sebab itu, untuk menghindari penyimpangan pembayaran yang beresiko mengikis komitmen petani-petani individual kepada siapa proyek itu bergantung agar sukses, para investor sangat ditekankan untuk melakukan regim pembayaran langsung dan transparan supaya para peserta mengetahui mereka mendapat kompensasi yang adil atas input mereka.

#### Tabel 4: Transparansi di Tingkat Lokal

Siklus tanaman telah sukses, dan menghasilkan 13,248 kg panen dalam contoh ini dari distrik Baucau. Bagian petani untuk hasil ini adalah US\$ 3.500, yang dibayar oleh investor kepada Koordinator Petani. Ini harus membagi kepada 41 petani yang telah berpartisipasi (beberapa orang dengan keluarganya) dalam proyek tersebut. Pembagian untuk tiap -tiap petani seharusnya sekitar US\$300 tetapi tujuh petani hanya menerima US\$ 10-20. Para petani ini semuanya berada dalam satu Kelompok Petani dan pendapatan yang didapat untuk pekerjaan mereka sangat rendah (membersihkan lahan, penanaman, penyiraman, dan panen) yang telah mereka berikan kepada proyek tersebut. Situasi tersebut menyebabkan ketegangan antara para petani dan Koordinator Petani dan chefe de suco dan para ketua adt perlu mengambil langkah untuk membantu mencari solusi. Untuk panen berikutnya, distribusi pembayaran kepada para petani disaksikan oleh Administrator Distrik, Administrator Sub-Distrik, wakil-wakil polisi, wakil-wakil investor dan seorang Pastor Katolik. Tingkat pengawasan ini mungkin berlebihan ketika masyarakat Timor-Leste sudah meningkatkan pengalaman berdagang, tetapi ini menunjukkan pentingnya transparensi, dan pentingnya kelehatian ada transparensi, dalam kaitan dengan kerjasama dengan anggota masyarakat saat ini.<sup>28</sup> Dalam kasus ini, masalah awal bisa dihindari jika sejak awal pembayaran dilakukan secara langsung kepada para petani, bukan kepada kelompok.

Pada contoh lain karena manajemen yang kurang baik pada pihak investor, seperti menanam di luar musim, kemungkinan bisa terjadi ganti rugi kepada petani, atau paling tidak penghapusan hutang para petani kepada investor yang berpatokan pada kesepakatan kontrak kerja pertanian.

#### Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Investor harus pastikan bahwa para petani memiliki keahlian yang diperlukan untuk menjalankan peralatan dan menangani perlengkapan secara aman, dan memberikan pelatihan dan perlindungan perseorangan yang tepat. Harus memberikan perhatian khusus kepada bahan kimia, termasuk memberikan perhatian untuk wanita hamil dan menyusui supaya tidak menimbulkan bahaya kimia dan bahwa fasilitas penyiraman air darurat harus selalu tersedia dekat fasilitas-fasilitas pencampuran bahan kimia. Pengalaman petani di Timor-Leste baru-baru ini menunjukkan bahwa mencampur dan menggunakan bahan kimia dengan konsentrasi yang benar dapat mendatangkan tantangan yang serius. Sebab itu, ada alasan baik supaya pencampuran dan penggunaan bahan kimia sebaiknya dilakukan hanya oleh tim-tim khusus yang sudah terlatih.<sup>22</sup>

### 1.3 Komunikasi dan Penyuluhan

Saluran-saluran komunikasi sangat penting untuk membangun hubungan baik dan kepercayaan antara para investor dan anggota masyarakat. Kepercayaan di antara semua pihak itu sendiri diajukan (Doria n.d.) sebagai sebuah ciri inti dari kolaborasi agribisnis yang sukses. Melalui saluran komunikasi yang efektif inilah instruksi-instruksi dan pelatihan/penyuluhan pertanian dapat diberikan untuk para petani, dan lewat mana para petani bisa mendapat klarifikasi dan memberikan umpan balik sehubungan dengan masalah-masalah teknis dan keprihatinan lain dan keluhan-keluhan yang berhubungan dengan sebuah proyek. Rantai suplai perdagangan agribisnis sering sekali menghendaki spesifikasi produk yang tepat dan semua permintaan ini tidak akan dilaksanakan pada sebuah ekonomi pedesaan tradisional secara luas tanpa perhatian detail kepada saluran-saluran komunikasi dan penyuluhan. Timor-Leste dikenal dengan beragam bahasa yang signifikan, dengan lebih dari 17 bahasa<sup>23</sup> dan sejumlah daerah dapat berbicara banyak bahasa. Para Investor harus perhatikan hal ini ketika menyeleksi pegawai lapangan.

#### Bahaya-bahaya Rantai Komunikasi yang Panjang dan Tidak Langsung

Sebagaimana dapat dilihat pada contoh-contoh yang telah dibahas seperti siklus penanaman, kerusakan perlengkapan dan pengumpulan hasil panen, semakin cepat masalah-masalah kecil atau rutin dapat diselesaikan maka semakin kecil peluang masalah operasional rutin yang perlu diselesaikan akan berkembang menjadi besar yang berdampak terhadap proyek dan hubungan antara berbagai pihak. Rantai komunikasi/ekstensi yang panjang dan tidak langsung tidak akan efektif terutama pada tahap-tahap awal sebuah proyek ketika peserta anggota masyarakat dan mungkin investor juga tidak familiar dengan sistem. Informasi yang disalurkan melalui rantai komunikasi yang panjang mungkin tidak akurat dan rantai komunikasi yang panjang bisa menghambat petani dalam mengklarifikasi secara mudah bidang-bidang ketidaktentuan. Seperti dibahas di bawah pada bagian Distribusi Manfaat dalam Masyarakat, rantai komunikasi yang panjang juga bisa meningkatkan potensi terjadinya korupsi dan manipulasi yang bisa membahayakan keuntungan dan mengikis motivasi dan komitmen mereka terhadap proyek tersebut. Studi kasus yang dijelaskan dalam Tabel 2 dibawah, diambil dari pengalaman di Timor-Leste, yang menyoroti beberapa dari bahaya-bahaya yang berhubungan dengan rantai komunikasi yang panjang.

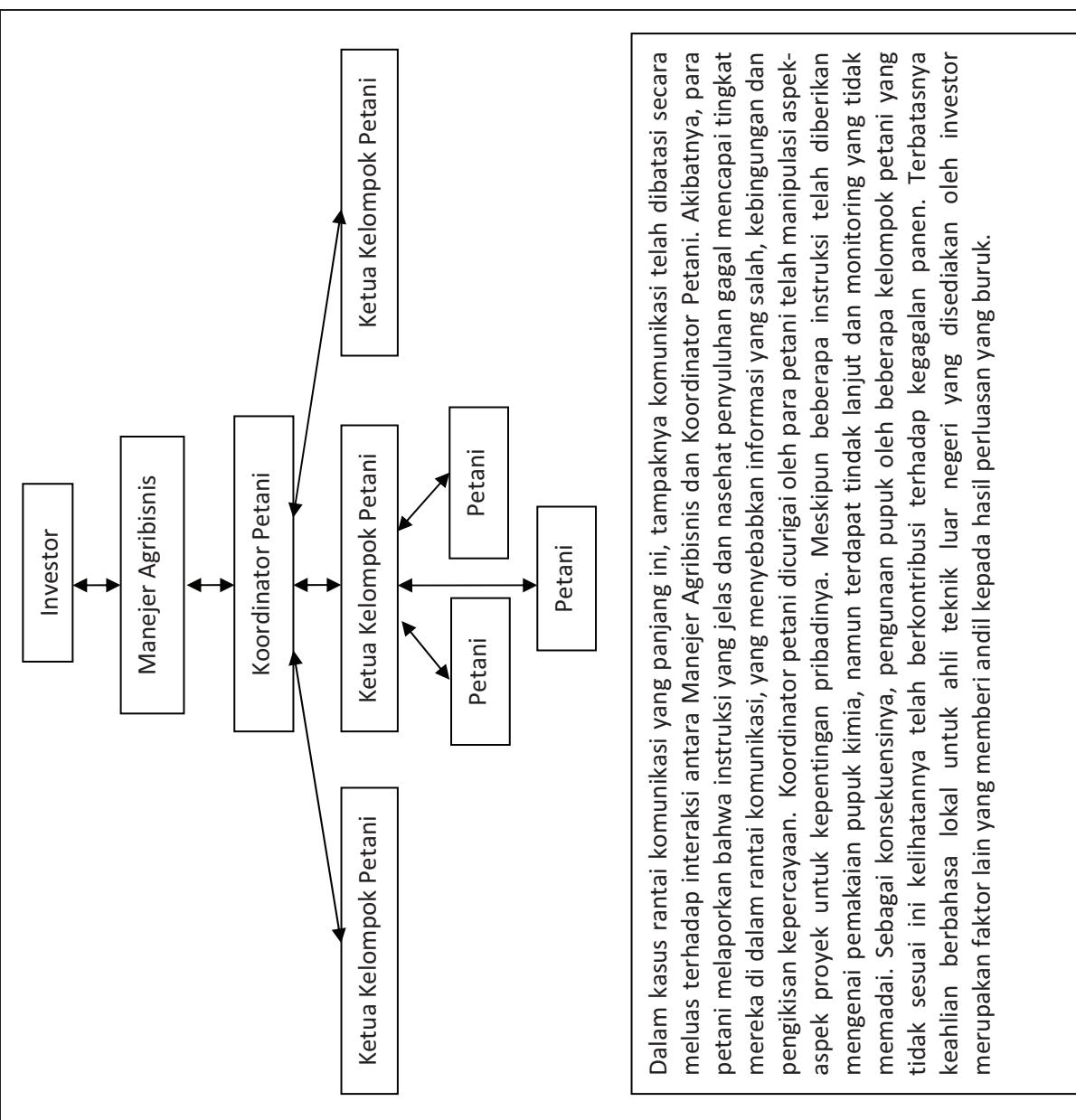
<sup>27</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 2009 oleh Jastis Blong Eriwan (JBE, bagian dari J4P). Lihat juga Nixon (2009).

<sup>28</sup> Berdasarkan pada kerja lapangan yang sudah dilakukan oleh J4P tahun 2010 berkerjasama dengan Fundasau Haburas.

<sup>22</sup> Kebijakan ini di ikuti dalam konteks yang setara di tempat lain, termasuk oleh perusahaan New Britain Palm Oil limited di Papua New Guinea.

<sup>23</sup> Untuk rinciannya lihat Wurm dan Hattori (1981).

**Tabel 2: Kelemahan dari Rantai Komunikasi yang Panjang dan Penyuluhan<sup>24</sup>**



lahir. Ini berarti bahwa para investor harus memiliki tanggung jawab utama dalam menyampaikan sendiri pelayanan penyuluhan. Sangat penting bahwa pelayanan penyuluhan pertanian memadai untuk kebutuhan proyek. Meskipun rasio pekerja penyuluhan terhadap petani sangat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor,<sup>25</sup> kurangnya pengalaman dalam hal pertanian intensif dalam konteks Timor-Leste berarti bahwa pelayanan penyuluhan harus lebih intensif daripada kurang intensif. Untuk alasan-alasan yang telah digambarkan dalam Tabel 3 di atas, harus dilakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa target aktifitas penyuluhan diberikan kepada semua yang terlibat langsung dalam proyek tersebut, termasuk perempuan.

#### 1.4 Distribusi Keuntungan

##### Membuat Partisipasi Berimanfaat untuk Petani

Seperti sudah dibahas di dalam semua pedoman ini, pengembangan agribisnis berdasarkan kontrak di Timor-Leste masih dalam tahap dini dan contoh-contoh konkret pelanggaran dari para petani (melibatkan penjualan hasil panen kepada pembeli lain) bukan tidak biasa. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran, dimana investor kehilangan setiap bantuan pertanian telah memberi andil kepada proses produksi (contoh bibit, pupuk, biaya-biaya mesin dan biaya pelatihan) telah berkontribusi untuk proses produksi termasuk kurangnya kepercayaan dan kemauan baik antara para investor dan para petani, kurangnya komunikasi antara investor dan para petani, dan tidak adanya insentif harga atau intensif lain yang mendorong para petani untuk menjual kepada investor dari pada pembeli-pembeli lain. Dalam hal terakhir akal sehat dan pengalaman menunjukkan bahwa suatu kontrak agribisnis ‘hanya bisa berkelanjutan apabila (kedua) partner merasa bahwa mereka sama-sama untung melalui kerjasama ini...dan...memandang hal tersebut sebagai sumber pendapatan - keuangan atau sebaliknya - yang tidak dapat ditandingi oleh alternatif terbaik berikutnya.’ (Silva 2005, 22) Oleh sebab itu, sangat penting bagi para investor yang memiliki prospek baik untuk mempertimbangkan strategi-strategi yang bisa memberi motivasi kepada para petani untuk mempertahankan kerjasama mereka dengan para investor. Seperti sudah diuraikan dalam Tabel 4, sertifikasi organik adalah satu cara di mana hal ini telah tercapai, dengan menaikkan harga di mana para petani akan menerima dengan menjual kepada seorang investor yang telah memfasilitasi sertifikasi organik untuk hasil panen mereka.

**Tabel 3: Pemberian Insentif untuk para Petani**

Sebuah perusahaan kemitraan organik yang berkantor pusat di distrik Baucau menunjukkan sebuah contoh mengenai bagaimana memberikan suatu insentif harga kepada para petani untuk menjual kepada perusahaan mereka dari pada kepada pembeli-pembeli lain. Dalam operasi sebagai sebuah perusahaan dagang kecil sejak 1990-an, perusahaan itu mendapat dukungan dari beberapa organisasi internasional<sup>26</sup>, untuk memasuki bidang pertanian organik. Sekarang perusahaan tersebut adalah salah satu dari sejumlah perusahaan di Timor-Leste (yang lain bergerak dalam perdagangan kopi) yang mensponsori sertifikasi organik di atas tanah pertanian masyarakat. Studi kasus ini menunjukkan bahwa investasi dalam sertifikasi organik dapat mengikat para investor dan para petani dalam suatu hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam kasus ini, bonus di mana perusahaan bisa membayar untuk hasil panen yang berasal dari lima suco di mana perusahaan telah mengatur sertifikasi organik berarti bahwa para petani akan menjual kepada mereka di luar keuntungan pribadi. Pada harga-harga 2009, perusahaan itu sanggup membayar para petani 100 persen lebih untuk kemitra yang sudah disertifikasi secara organik dari pada yang bisa didapatkan para petani dari pembeli-pembeli lain. Pada saat di mana permintaan kemitra meningkat (kadang-

##### Pentingnya Komunikasi dan Penyuluhan Langsung dan Efektif

Kebalikan dari rantai komunikasi yang panjang, para investor harus mencari jalur komunikasi selansung mungkin, dan berusaha untuk bekerja lebih dekat dengan peserta anggota masyarakat. Ini artinya mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi penyuluhan kepada perempuan dan juga kepada laki-laki. Dalam banyak kasus perempuanlah yang akan melakukan pekerjaan, jadi tidak menghadirkan mereka dalam proses komunikasi dan penyuluhan akan berarti bahwa informasi tidak mencapai orang-orang yang bersangkutan. Untuk menghindari situasi di mana ahli-ahli teknik yang sangat berkualifikasi tidak dapat menyampaikan informasi kepada para petani karena kesulitan bahasa, maka investor harus memastikan bahwa setiap pegawai extension mempunyai keahlian bahasa yang sesuai.

##### Tanggung Jawab atas Penyampaian Penyuluhan

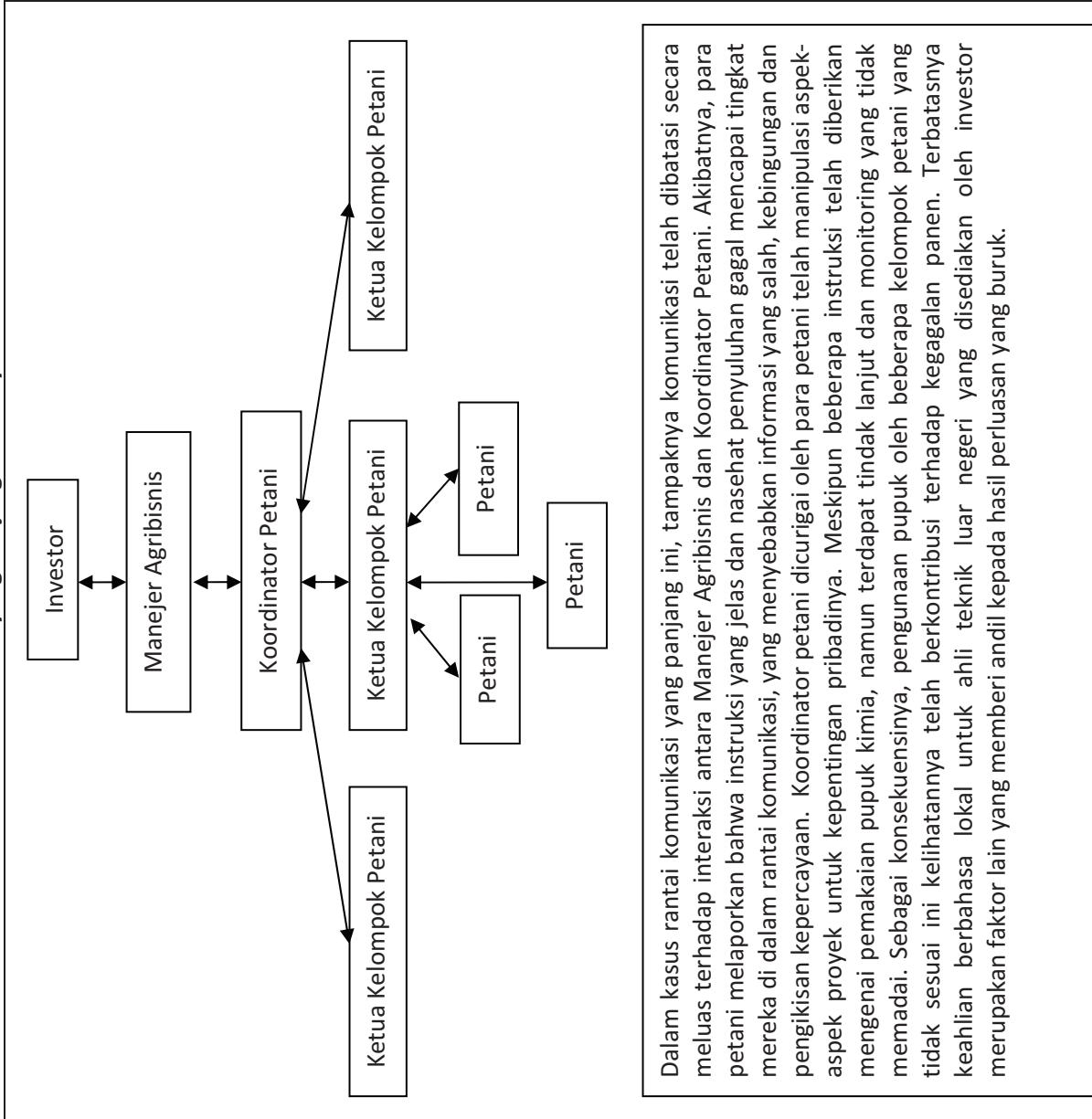
Seperti sudah didiskusikan pada Bagian 2 mengenai Pembangunan Desa dan Sektor Swasta di Timor-Leste, dinas pelayanan penyuluhan Kementrian Pertanian dan Perikanan berada dalam kondisi baru

<sup>24</sup> Berdasarkan pada kerja lapangan tahun 2010 yang dilakukan oleh J4P berkerjasama dengan Fundasaun Haburas.

<sup>25</sup> Eaton dan Shepherd (2001, 95-96) mengacu kepada rasio pekerja ekstensi untuk petani bervariasi dari 1:55 sampai 1:500.

<sup>26</sup> Termasuk Universitas Hawaii dan GTZ

Tabel 2: Kelemahan dari Rantai Komunikasi yang Panjang dan Penyuluhan<sup>24</sup>



lahir. Ini berarti bahwa para investor harus memikul tanggung jawab utama dalam menyampaikan sendiri pelayanan penyuluhan. Sangat penting bahwa pelayanan penyuluhan pertanian memadai untuk kebutuhan proyek. Meskipun rasio pekerja penyuluhan terhadap petani sangat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor,<sup>25</sup> kurangnya pengalaman dalam hal pertanian intensif dalam konteks Timor-Leste berarti bahwa pelayanan penyuluhan harus lebih intensif daripada kurang intensif. Untuk alas-an-alasan yang telah digambarkan dalam Tabel 3 di atas, harus dilakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa target aktifitas penyuluhan diberikan kepada semua yang terlibat langsung dalam proyek tersebut, termasuk perempuan.

## 1.4 Distribusi Keuntungan

## Membuat Partisipasi Bermanfaat untuk Petani

Seperti sudah dibahas di dalam semua pedoman ini, pengembangan agribisnis berdasarkan kontrak di Timor-Leste masih dalam tahap dini dan contoh-contoh konkret pelanggaran dari para petani (melibatkan penjualan hasil panen kepada pembeli lain) bukan tidak biasa. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran, dimana investor kehilangan setiap bantuan pertanian telah memberi andil kepada proses produksi (contoh bibit, pupuk, biaya-biaya mesin dan biaya pelatihan) telah berkontribusi untuk proses produksi termasuk kurangnya kepercayaan dan kemauan baik antara para investor dan para petani, kurangnya komunikasi antara investor dan para petani, dan tidak adanya insentif harga atau intensif lain yang mendorong para petani untuk menjual kepada investor dari pada kepada pembeli lain. Dalam hal terakhir akal sehat dan pengalaman menunjukkan bahwa suatu kontrak agribisnis ‘hanya bisa berkelanjutan apabila (kedua) partner merasa bahwa mereka sama-sama untung melalui kerjasama ini...dan...memandang hal tersebut sebagai sumber pendapatan - keuangan atau sebaliknya - yang tidak dapat ditandingi oleh alternatif terbaik berikutnya.’ (Silva 2005, 22) Oleh sebab itu, sangat penting bagi para investor yang memiliki prospek baik untuk mempertimbangkan strategi-strategi yang bisa memberi motivasi kepada para petani untuk mempertahankan kerjasama mereka dengan para investor. Seperti sudah diuraikan dalam Tabel 4, sertifikasi organik adalah satu cara di mana hal ini telah tercapai, dengan meningkatkan harga di mana para petani akan menerima dengan menjual kepada seorang investor yang telah memfasilitasi sertifikasi organik untuk hasil panen mereka.

Tabel 3: Pemberian Insentif untuk para Petani

Sebuah perusahaan kemiri organik yang berkantor pusat di distrik Baucau menunjukkan sebuah contoh mengenai bagaimana memberikan suatu insetif harga kepada para petani untuk menjual kepada perusahaan mereka dari pada kepada pembeli-pembeli lain. Dalam operasi sebagai sebuah perusahaan dagang kecil sejak 1990-an, perusahaan itu mendapat dukungan dari beberapa organisasi internasional<sup>26</sup>, untuk memasuki biddang pertanian organik. Sekarang perusahaan tersebut adalah salah satu dari sejumlah perusahaan di Timor-Leste (yang lain bergerak dalam perdagangan kopi) yang mensponsori sertifikasi organik di atas tanah pertanian milik masyarakat. Studi kasus ini menunjukkan bahwa investasi dalam sertifikasi organik dapat mengikat para investor dan para petani dalam suatu hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam kasus ini, bonus di mana perusahaan bisa membayar untuk hasil panen yang berasal dari lima *suco* di mana perusahaan telah mengatur sertifikasi organik berarti bahwa para petani akan menjual kepada mereka di luar keuntungan pribadi. Pada harga-harga 2009, perusahaan itu sanggup membayar para petani 100 presen lebih untuk kemiri yang sudah disertifikasi secara organik dari pada yang bisa didapatkan nara netani dari rembeli-nembelli lain. Bada saat di mana permintaan kemiri meningkat (kadang-

## Pentingnya Komunikasi dan Penyelesaian Lanjut dalam Efektif

Kebalikan dari rantai komunikasi yang panjang, para investor harus mencari jalur komunikasi selansung mungkin, dan berusaha untuk bekerja lebih dekat dengan peserta anggota masyarakat. Ini artinya mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi penyuluhan kepada perempuan dan juga kepada laki-laki. Dalam banyak kasus perempuanlah yang akan melakukan pekerjaan, jadi tidak menghadirkan mereka dalam proses komunikasi dan penyuluhan akan berarti bahwa informasi tidak mencapai orang-orang yang bersangkutan. Untuk menghindari situasi di mana ahli-ahli teknik yang sangat berkualifikasi tidak dapat menyampaikan informasi kepada para petani karena kesulitan bahasa, maka investor harus memastikan bahwa setiap pegawai extension mempunyai keahlian

**Tanggung Jawab atas Penyampaian Penyuluhan**  
Seperti sudah didiskusikan pada Bagian 2 mengenai Pembangunan Desa dan Sektor Swasta di Timor-Leste, dinas pelayanan penyuluhan Kementrian Pertanian dan Perikanan berada dalam kondisi baru

25 February 2001 Chamberlain et al.

Eaton dan Shep

1:55 sampai 1:500.

kadang mencapai 60 sen per kilogram atau lebih) perusahaan mengatakan bahwa ia masih bisa menjamin lima sen per kg lebih banyak daripada pembeli-pembeli lain.<sup>27</sup>

Anggota masyarakat kemungkinan akan tertarik kepada kemitraan dengan seorang investor karena mempunyai prospek mendapat akses ke teknologi baru dan pasar, pengembangan pengetahuan dan keahlian baru, dan meningkatkan pendapatan kas mereka. Pengalaman di Timor-Leste saat ini menunjukkan bahwa karena pasokan uang sangat sulit dalam ekonomi desa, yang sebagian besar subsistensi, maka penyebaran pembayaran sepanjang siklus panen layak dipertimbangkan. Meskipun kadang bukan suatu ciri yang umum dari beberapa model agribisnis, penyebaran pembayaran tersebut apabila mungkin (terutama pada saat-saat penting yang terkait dengan pembersihan rumput, penanaman, penyiraman dan panen) mungkin dapat memberi kontribusi supaya para petani tetap berminat terhadap proyek.

#### Pentingnya Pembayaran Langsung dan Adil kepada Peserta Anggota Masyarakat

Seperti sudah dibahas di atas pada bagian Komunikasi dan Extension, rantai komunikasi yang panjang dan kaku antara para investor dan para petani seprtinya tidak akan membawa kepada hasil yang sukses karena penyuluran informasi yang kurang baik dan kurangnya kesempatan untuk klarifikasi. Demikian pula, penyuluran dengan distribusi keuntungan, saluran-saluran yang diperlukan dan tidak langsung dengan menggunakan para perantara akan meningkatkan resiko isu-isu transparensi (lihat Tabel 5 di bawah). Bahkan koperasi masyarakat, menurut data dari lapangan yang menjadi sumber pedoman ini, tidak kebal terhadap penyalagunaan keuangan dan masalah transparansi. Oleh sebab itu, untuk menghindari penyimpangan pembayaran yang beresiko mengikis komitmen petani-petani individual kepada siapa proyek itu bergantung agar sukses, para investor sangat ditekankan untuk melakukan regim pembayaran langsung dan transparan supaya para peserta mengetahui mereka mendapat kompensasi yang adil atas input mereka.

Tabel 4: Transparansi di Tingkat Lokal

Siklus tanaman telah sukses, dan menghasilkan 13,248 kg panen dalam contoh ini dari distrik Baucau. Bagian petani untuk hasil ini adalah US\$ 3,500, yang dibayar oleh investor kepada Koordinator Petani. Ini harus membagi kepada 41 petani yang telah berpartisipasi (beberapa orang dengan keluarganya) dalam proyek tersebut. Pembagian untuk tiap –tiap petani seharusnya sekitar US\$300 tetapi tujuh petani hanya menerima US\$ 10-20. Para petani ini semuanya berada dalam satu Kelompok Petani dan pendapatan yang didapat untuk pekerjaan mereka sangat rendah (membersihkan lahan, penanaman, penyiraman dan panen) yang telah mereka berikan kepada proyek tersebut. Situasi tersebut menyebabkan ketegangan antara para petani dan Koordinator Petani dan chefe de suco dan para ketua adt perlu mengambil langkah untuk membantu mencari solusi. Untuk panen berikutnya, distribusi pembayaran kepada para petani disaksikan oleh Administrator Distrik, Administrator Sub-Distrilik, wakil-wakil investor dan seorang Pastor Katolik. Tingkat pengawasan ini mungkin berlebihan ketika masyarakat Timor-Leste sudah meningkatkan pengalaman berdagang, tetapi ini menunjukkan pentingnya transparensi, dan pentingnya kelihatan ada transparensi, dalam kaitan dengan kerjasama dengan anggota masyarakat saat ini.<sup>28</sup> Dalam kasus ini, masalah awal bisa dihindari jika sejak awal pembayaran dilakukan secara langsung kepada para petani, bukan kepada kelompok.

Pada contoh lain karena manajemen yang kurang baik pada pihak investor, seperti menanam di luar musim, kemungkinan bisa terjadi ganti rugi kepada petani, atau paling tidak penghapusan hutang para petani kepada investor yang berpatokan pada kesepakatan kontrak kerja pertanian.

#### Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Investor harus pastikan bahwa para petani memiliki keahlian yang diperlukan untuk menjalankan peralatan dan menangani perlengkapan secara aman, dan memberikan pelatihan dan perlindungan perseorangan yang tepat. Harus memberikan perhatian khusus kepada bahan kimia, termasuk memberikan perhatian untuk wanita hamil dan menyusui supaya tidak merugikan bahan kimia dan bahwa fasilitas penyiraman air darurat harus selalu tersedia dekat fasilitas-fasilitas pencampuran bahan kimia. Pengalaman petani di Timor-Leste baru-baru ini menunjukkan bahwa mencampur dan menggunakan bahan kimia dengan konsentrasi yang benar dapat mendatangkan tantangan yang serius. Sebab itu, ada alasan baik supaya pencampuran dan penggunaan bahan kimia sebaiknya dilakukan hanya oleh tim-tim khusus yang sudah terlatih.<sup>22</sup>

### 1.3 Komunikasi dan Penyuluhan

Saluran-saluran komunikasi sangat penting untuk membangun hubungan baik dan kepercayaan antara para investor dan anggota masyarakat. Kepercayaan di antara semua pihak itu sendiri diakui (Doria n.d.) sebagai sebuah ciri inti dari kolaborasi agribisnis yang sukses. Melalui saluran komunikasi yang efektif inilah instruksi-instruksi dan pelatihan/penyuluhan pertanian dapat diberikan untuk para petani, dan lewat mana para petani bisa mendapat klarifikasi dan memberikan umpan balik sehubungan dengan masalah-masalah teknis dan keprihatinan lain dan keluhan-keluhan yang berhubungan dengan sebuah proyek. Rantai supplai perdagangan agribisnis sering sekali menghendaki spesifikasi produk yang tepat dan semua permintaan ini tidak akan dilaksanakan pada sebuah ekonomi pedesaan tradisional secara luas tanpa perhatian detail kepada saluran-saluran komunikasi dan penyuluhan. Timor-Leste dikenal dengan beragam bahasa yang signifikan, dengan lebih dari 17 bahasa<sup>23</sup> dan sejumlah daerah dapat berbicara banyak bahasa. Para investor harus perhatikan hal ini ketika menyeleksi pegawai lapangan.

#### Bahaya-bahaya Rantai Komunikasi yang Panjang dan Tidak Langsung

Sebagaimana dapat dilihat pada contoh-contoh yang telah dibahas seperti siklus penanaman, kerusakan perlengkapan dan pengumpulan hasil panen, semakin cepat masalah-masalah kecil atau rutin dapat diselesaikan maka semakin kecil peluang masalah operasional rutin yang perlu diselesaikan akan berkembang menjadi masalah besar yang berdampak terhadap proyek dan hubungan antara berbagai pihak. Rantai komunikasi/ekstensi yang panjang dan tidak langsung tidak akan efektif terutama pada tahap-tahap awal sebuah proyek ketika peserta anggota masyarakat dan mungkin investor juga tidak familiar dengan sistem. Informasi yang disalurkan melalui rantai komunikasi yang panjang mungkin tidak akurat dan rantai komunikasi yang panjang bisa menghambat petani dalam mengklarifikasi secara mudah bidang-bidang ketidaktentuan. Seperti dibahas di bawah pada bagian Distribusi Manfaat dalam Masyarakat, rantai komunikasi yang panjang juga bisa meningkatkan potensi terjadinya korupsi dan manipulasi yang bisa membahayakan keuntungan dan mengikis motivasi dan komitmen mereka terhadap proyek tersebut. Studi kasus yang dijelaskan dalam Tabel 2 dibawah, diambil dari pengalaman di Timor-Leste, yang menyoroti beberapa dari bahaya-bahaya yang berhubungan dengan rantai komunikasi yang panjang.

<sup>27</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 2009 oleh Jastis Blong Evriwan (JBE, bagian dari J4P). Lihat juga Nixon (2009).

<sup>28</sup> Berdasarkan pada kerja lapangan yang sudah dilakukan oleh J4P tahun 2010 berkerjasama dengan Fundasaun Haburas.

<sup>22</sup> Kebijakan ini di ikuti dalam konteks yang setara di tempat lain, termasuk oleh perusahaan New Britain Palm Oil limited di Papua New Guinea.

<sup>23</sup> Untuk rincianya lihat Wurm dan Hatton (1981).

terhadap mata-pencahanian dapat menjadi penghalang besar kepada petani-petani subsistensi yang mempertimbangkan bekerjasama dengan seorang investor.<sup>20</sup>

#### Kapasitas Organisasional dan Manajemen Investor

Seperti sudah dibahas sehubungan dengan kontrak kerjasama pertanian (Eaton forthcoming), anggota masyarakat desa berhak atas informasi tentang latar belakang keuangan dan kemampuan teknis investor sebelum bekerjasama dengan mereka dan para investor harus siap untuk menyediakan ini. Kegagalan investor untuk sungguh-sungguh memperhatikan semua persoalan operasional sehari-hari bisa membahayakan kelaingsungan hidup proyek. Variasi-variasi yang tidak teruji pada siklus penanaman biasa, penyediaan perlengkapan yang tidak sesuai karena kurangnya percobaan di lapangan, dan kelalaian dalam mengumpulkan hasil panen pada waktunya karena komunikasi yang tidak memadai semuanya merupakan sarna dimana rasio laba modal / *returns on investment* yang diberikan oleh anggota masyarakat untuk proyek tersebut dapat terancam oleh aksi yang tidak tepat atau tidak ada aksi dari seorang investor. Contoh-contoh ini, yang diambil dari kerjasama antara para investor dan masyarakat-masyarakat dalam konteks Timor-Leste,<sup>21</sup> diuraikan dalam Tabel 1 (di bawah).

Tabel 2: Contoh Praktek Manajemen Investor yang Buruk Didokumentasi dalam Konteks Timor-Leste.

<b>Contoh 1:</b> <b>Kurangnya perhatian terhadap siklus musiman</b>	Pada permulaan proyek investor memperkenalkan sebuah model pertanian yang baru dari negara luar. Pegawai ekstensi sudah memberi instruksi kepada petani di beberapa tempat untuk mempersiapkan tanah dan menanam pada bulan Januari daripada di awal musim hujan (November/Desember) seperti biasa. Beberapa petani mempertanyakan instruksi itu tetapi tetap menanam pada bulan Januari seperti yang diminta. Tetapi, di salah satu tempat panen gagal, karena kekurangan air menjadi faktor penghambat utama.
<b>Contoh 2:</b> <b>Pemberian perlengkapan yang tidak cocok dan kurangnya perhatian terhadap aspek-aspек kepemilikan tanah</b>	Investor meminta para petani untuk melakukan pembersihan lahan terlebih dahulu guna mempersiapkan tanah untuk beberapa tahap pengolahan menggunakan traktor sebelum menanam. Namun, lahan tersebut sebelumnya tidak pernah dipakai untuk penanaman intensif dan mesin-mesin tidak memadai untuk mengerjakan pekerjaan tersebut (sebuah faktor yang seharusnya ditunjukkan melalui sebuah evaluasi menyeluruh). Karena kegagalan mekanis yang terjadi sekarang, hanya satu per tiga dari lahan yang telah disiapkan sebagian untuk penanaman yang ditanam, mengikis kepercayaan masyarakat dalam proyek tersebut dan mengacau rencana-rencana untuk perluasan proyek.
<b>Contoh 3:</b> <b>Gagal untuk mengumpulkan hasil panen pada waktunya</b>	Kurang baiknya komunikasi dan pemahaman atas tanggung jawab dan peran yang terjadi antara investor dan masyarakat berarti bahwa masyarakat tidak mengerti bahwa sebenarnya mereka yang bertanggung jawab untuk panen produksi tersebut. Akibatnya, masyarakat tidak melakukan panen produksi tepat waktu dan banyak tanaman menjadi rusak. Jadi kedua pihak yang rugi karena komunikasi yang buruk dan pemahaman atas peran masing-masing. Setelah insiden ini, perusahaan tersebut tidak bisa melanjutkan proyek disebabkan oleh perlawanan masyarakat (walaupun proyek tersebut dapat dilanjutkan lagi nanti).

#### Membayar Perempuan untuk Pekerjaan Mereka

Pengalaman dengan proyek-proyek agribisnis di Timor-Leste saat ini menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat secara rutin dalam pekerjaan sebagai anggota keluarga petani, tetapi kadang-kadang tidak dilikutsertakan bukan hanya dari pelatihan dan kesempatan membuat keputusan tetapi juga dari menerima pembayaran langsung atas pekerjaan mereka. Penyisihan perempuan dari berbagai bidang seperti ini, dipahami telah membawa kepada sejumlah kesulitan yang dialami oleh proyek-proyek. Yang tampak jelas, adalah bahwa dengan membayar langsung kepada perempuan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan dalam proyek agribisnis tersebut, para investor akan meningkatkan komitmen para pekerja perempuan terhadap proyek tersebut. Selain itu, dengan membayar langsung kepada perempuan, para investor bisa memberi kontribusi untuk meningkatkan status perempuan dalam keluarga, suatu pengembangan yang berpotensi untuk meningkatkan penghasilan keluarga.<sup>29</sup> Oleh sebab itu, para investor harus membayar langsung kepada perempuan atas pekerjaan mereka dan membayar mereka di dalam masyarakat mereka, karena kewajiban keluarga dapat mencegah perempuan untuk bisa keluar dari dalam masyarakatnya untuk mencari uang. Dengan mempertimbangkan masulnya teknologi seperti perbankan telefon selular mungkin bisa menghadirkan kesempatan baru untuk transfer uang yang berhubungan dengan kerjasama pertanian di masa mendatang, para investor harus memberikan perhatian khusus untuk memastikan bahwa pembayaran ditranfer kepada para penerima yang dimaksud.

#### Memberi Manfaat kepada Masyarakat Luas

Selama penelitian yang menjadi masukan untuk pedoman ini beberapa *katuas*, atau orang tua mengungkapkan kekecewaan bahwa meskipun mereka telah memainkan peran sebagai pemimpin masyarakat dalam memfasilitasi kerjasama antara seorang investor dengan anggota masyarakat, tetapi manfaat dari kerjasama itu hanya dinikmati oleh semua yang terlibat langsung dalam proyek tersebut. Ini menyoroti pentingnya dalam konteks sosial dari suco, untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat secara luas ketika merencanakan dan melakukan suatu kerjasama. Sejauh mana strategi-strategi bisa diimplementasikan untuk memberi manfaat kepada masyarakat luas akan berbeda sesuai skala dan sifat proyek, tetapi pemikiran harus diberikan pertama-tama kepada manfaat yang dapat diberikan dengan biaya tambahan sedikit atau tanpa biaya tambahan atau ketidaknyamanan. Ini dapat termasuk penyampaian saran ekstensi kepada audiensi luas yang terlibat secara langsung di dalam proyek tersebut, atau bisa mungkin membeli produksi tambahan dari yang diproduksi sesuai kontrak, oleh sebab itu sediakan pasar untuk anggota masyarakat. Pelatihan yang lebih terspesialisasi di beberapa bidang untuk mengurangi kebutuhan akan sumber tenaga kerja dari daerah lain juga penting untuk dipertimbangkan, dan temuan-temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelatihan dalam pengoperasian dan pemeliharaan traktor dan mesin-mesin yang lain terbukti populer. Investor harus berhati-hati dalam melibatkan perempuan dalam program-program pelatihan teknik, dan hindari membuat asumsi-asumsi tentang pekerjaan apa yang bisa dilakukan oleh ‘laki-laki’ atau ‘perempuan’. Dalam diskusi-diskusi yang dilakukan dengan anggota masyarakat selama persiapan pedoman-pedoman ini, masyarakat mengatakan bahwa jika mendapat kesempatan, mereka akan bersedia untuk partisipasi dalam kerjasama dengan investor setempat untuk rehabilitasi jalan. Anggota masyarakat mengatakan mereka bersedia untuk berpartisipasi dalam sebuah bentuk kesepakatan kerja dibayar dengan makanan. Minimal, masyarakat berharap atas makanan, kesehatan, pendidikan, pakaian anak-anak dan nutrisi anak-anak.”

<sup>20</sup> Untuk informasi lebih jauh mengenai resiko dan kendala-kendala yang berhubungan dengan kerjasama agribisnis, lihat Eaton (2011).

<sup>21</sup> Berdasarkan pada penelitian J4P di tahun 2009 dan penelitian yang dilakukan J4P pada 2010 bekerjasama dengan Fundasaun Haburas.

para investor akan mendukung acara tradisional berkala untuk memastikan suksesnya kerjasama agribisnis tersebut.

## Setidaknya, investor diharapkan untuk mendukung acara tradisional untuk memastikan sukses kerjasama agribisnis tersebut

Menyediakan keuntungan untuk masyarakat merupakan sesuatu yang penting dan mempekerjakan anggota masyarakat sebagai pekerja ekstensi atau anggota personel yang lain adalah hal yang biasa dalam agribisnis. Bagaimanapun, pengalaman di tempat lain mengenai kontrak pertanian telah menunjukkan ‘suatu tendensi bagi pengembangan ketergantungan secara bertahap pada perusahaan yang melakukan kontrak untuk hal-hal non-pertanian,’ (Silva 2005, 18), dan pengembangan hubungan ketergantungan yang berlebihan antara masyarakat dan investor harus dihindari.



Gambar 8-10: Seperti dalam kasus event di Baucau ini, penting bagi kerjasama agribisnis untuk dirayakan dengan pesta tradisional . (Fotos: Carlos Alves)

### 1.5 Manajemen Sengketa

Sebagaimana telah dibahas di atas pada bagian Konsultasi, Negosiasi, dan Komunikasi dan Perluasan pengalaman di tempat lain menunjukkan bahwa cara terbaik untuk mencegah sengketa tanpa menganggu kemitraan antara investor dan anggota masyarakat adalah dengan melakukan pertemuan-pertemuan rutin yang memungkinkan para petani bertemu dengan para utusan investor. Pertemuan rutin memberikan kesempatan bertukar informasi antara para petani dan investor dan mencegah timbulnya kesalahpahaman yang bisa mengarah kepada sengketa. Penting bagi kedua belah pihak untuk mengakui bahwa kemitraan agribisnis pada dasarnya merupakan *kemitraan sukarela* antara kedua belah pihak dan itu semua tergantung kepada kedua belah pihak untuk membuat kemitraan tersebut berjalan dengan baik. Kedua belah pihak harus sadar bahwa apabila mereka tidak bisa menyelesaikan jenis kesalahpahaman atau sengketa di antara mereka, maka pada kenyataannya hal ini bisa tidak terselamatkan dan kemitraan itu tidak bisa dilanjutkan. Apabila sengketa berkembang di mana tidak bisa diatasi melalui dialog antara pihak-pihak utama, atau mungkin melibatkan pihak baru, disarankan agar sistem pengadilan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir<sup>30</sup> dan bahwa para pihak menyepakati model dasar penyelesaikan sengketa yang

<sup>30</sup> Sehubungan dengan kontrak kerjasama pertanian, pengalaman internasional menunjukkan bahwa investor agribisnis dan petani jarang sekali membawa kasus mereka ke pengadilan mengenai pelanggaran kesepakatan, meskipun hal ini sama sekali tidak meniadakan pentingnya menjelaskan secara detail sifat dasar kesepakatan diantara pihak-pihak (Eaton and Shepherd 2001, 62; Doria n.d.). Dalam konteks Timor-Leste, peluang bagi satu pihak untuk menuntut pihak yang lain ke pengadilan barangkali sama sekali tidak ada kemungkinannya karena sifat sistem hukum formal yang baru didirikan dan kecenderungan menunda kasus-kasus sebelum pengadilan

bisa memfasilitasi pembatasan zona perlindungan masyarakat dan areal kepemilikan masyarakat dan menetapkan suatu kerangka untuk mengatur kerjasama antara investor-investor dari luar dan anggota masyarakat di semua daerah ini.

### Penilaian Dampak

Di mana sebuah pengembangan yang diusulkan memiliki ukuran atau sitat sedemikian sehingga ada kemungkinan terjadi dampak-dampak lingkungan dan/atau sosial yang signifikan (termasuk potensi untuk memicu sengketa tanah atau bentuk-bentuk sengketa yang lain), investor harus membentuk sebuah penilaian dampak independen baik diwajibkan maupun tidak oleh hukum. Penilaian dampak harus mengevaluasi sejauh mana perempuan dan laki-laki menggunakan areal lahan yang diusulkan untuk proyek untuk tujuan seperti tanaman pangan, akses air, panen hasil-hasil dari hutan, makanan atau obat-obatan alami. Anggota masyarakat yang menggunakan lahan untuk tujuan-tujuan tersebut kemungkinan bukan anggota kelompok-kelompok pemilik tanah utama di areal yang dimaksud tetapi kebutuhan mereka juga masih harus diperhatikan dalam rancangan proyek dan sisakan sebagian tanah kepada masyarakat untuk melanjutkan penggunaannya. Proses penilaian dampak harus mencantumkan komponen gender untuk mengevaluasi dampak potensial proyek terhadap para perempuan di dalam masyarakat. Proses penilaian dampak harus dipandang sebagai suatu kesempatan bukan hanya untuk mengurangi dampak negatif potensial tetapi juga untuk mengidentifikasi sarana-sarana di mana proyek dapat memaksimalkan dampak-dampak positif untuk anggota masyarakat, sehingga memberi kontribusi kepada pengembangan kehendak baik dan kepercayaan antara investor dan anggota masyarakat.

### Manajemen Resiko

Sukses suatu usaha agribisnis komersial bisa terancam oleh perkembangan-perkembangan termasuk kegagalan suatu hasil bumi untuk diperdagangkan, perubahan permintaan pasar, investor bankrupt atau keadaan lain yang tidak terduga. Untuk menghindari situasi-situasi di mana kesejahteraan atau stabilitas anggota masyarakat yang terlibat di dalam suatu hubungan kerjasama agribisnis dengan seorang investor dihadapkan pada suatu resiko serius melalui pengembangan semacam itu, maka para investor dan pihak-pihak lain (seperti lembaga-lembaga pemerintah atau organisasi masyarakat madani) harus benar-benar mendorong anggota masyarakat yang bekerjasama dengan seorang investor untuk mempertahankan suatu tingkat minimum produksi subsistensi. Tingkat produksi subsistensi ini harus cukup untuk mendukung mata pencarian dan stabilitas peserta proyek dan tanggungan mereka apabila terjadi kegagalan proyek.<sup>19</sup>

Gambar 7: Panen padi di Viqueque (Foto: Rod Nixon)



Asuransi hasil bumi untuk para petani kelihatan tidak tersedia di Timor-Leste untuk kurung waktu lama tetapi para investor harus memperhatikan sarana-sarana lain yang lewat mana mereka dapat memberi dukungan kepada para petani apabila keuntungan proyek yang diprediksi gagal terlaksana. Ini adalah suatu bidang penting untuk para investor untuk dipertimbangkan karena resiko potensial

<sup>19</sup> Untuk pembahasan lebih jauh berdasarkan pengalaman dari yurisdiksi yang berbeda lihat Eaton dan Shephard (2001, 66, 103).

kemampuan masing-masing investor dan petani-petani subsistensi untuk bertahan beberapa siklus panen yang gagal sangat berbeda, karena apa yang dialami hanya sebagai kerugian keuangan atau margin keuntungan yang dikorbankan bagi seorang investor dapat mendorong sekelompok petani subsistensi ke tepi jurang (lihat bagian manajemen resiko di bawah).<sup>18</sup>

#### **Menetapkan Kelayakan Pendekatan**

Untuk memaksimalkan peluang sukses dan mengurangi sejauh mungkin tingkat resiko untuk semua pihak yang berhubungan dengan pengaturan usaha bersama, maka merupakan tanggung jawab investor untuk memastikan, dengan menanggung resiko dan biaya sendiri, bahwa pendekatannya yang dimaksud layak. Ini harus dicapai dengan mencari sifat lingkungan fisik dan melakasankan percobaan-percobaan awal sebelum melibatkan petani dalam jumlah yang besar dalam sebuah usaha. Dalam membuat kesimpulan tentang kelayakan pendekatan berdasarkan pada percobaan-percobaan tersebut, para investor harus memiliki pengalaman internasional yang menunjukkan bahwa hasil-hasil dari program-program percobaan biasanya lebih besar daripada hasil-hasil kebun petani.<sup>18</sup>

**Percobaan pertanian harus digunakan untuk mengukur kapasitas lokal dan kebutuhan-kebutuhan pelatihan, dan juga kecocokan metode-metode produksi yang dimaksud**

Percobaan tidak hanya menguji dan menyempurnakan aspek-aspek pertanian secara teknik tetapi juga mengukur tingkat kapasitas anggota masyarakat (melalui, misalnya, mempekerjakan anggota masyarakat setempat dalam aktifitas percobaan pertanian) untuk memungkinkan suatu penilaian pelatihan dan kebutuhan penyuluhan.



**Gambar 6: Sebagaimana ditunjukkan oleh gambar pengeringan kopi di Ermara, skala kecil di mana produksi dan pemrosesan untuk pasar-pasar komersial berlangsung sampai saat ini berarti bahwa para investor harus berhati-hati dalam menilai tingkat pelatihan yang dibutuhkan (Foto: Edio Guterres)**

Dalam hubungan dengan evaluasi kelayakan pendekatan-pendekatan pertanianlah kebutuhan akan lahan, walaupun hanya beberapa hektar, di mana investor bisa mengontrol secara langsung menjadi sebuah masalah yang sangat penting. Sementara dalam beberapa kasus tanah pemerintah yang kosong mungkin tersedia untuk tujuan ini. Ada kemungkinan bahwa dalam kebanyakan kasus negosiasi untuk mendapat akses kepada tanah untuk percobaan atas dasar sewa jangka pendek harus dilakukan dengan anggota masyarakat. Sebagaimana telah didiskusikan pada bagian Pembangunan Desa di Timor-Leste dan Sektor Swasta (di bawah), undang-undang masa mendatang

melibatkan seorang fasilitator yang mendengarkan cerita dari kedua belah pihak dan kemudian memberikan keputusan yang mengikat, mungkin tidak memadai; sebagai gantinya model mediasi mungkin lebih cocok. Dalam hal ini, seorang mediator yang disetujui oleh kedua belah pihak kemudian akan mendorong masing-masing pihak untuk memahami posisi orang lain sehingga hasilnya disepakati sesuai dengan kebutuhan semua pihak.

Kontrak antara pihak-pihak yang membuat sebuah kesepakatan agribisnis bisa memasukkan hal-hal berikut:

- Pihak-pihak harus mengakui sifat sukarela dari kermitraan dan pentingnya bagi kedua belah pihak untuk bekerja keras guna mencegah dan menyelesaikan kesalahpahaman melalui dialog.
- Identifikasi sebuah model dasar resolusi sengketa untuk digunakan apabila masalah-masalah yang disengketakan tidak bisa diselesaikan melalui dialog. Ini bisa melalui model mediasi yang difasilitasi oleh individu atau juri yang disetujui oleh kedua belah pihak. Untuk menghindari mengorbankan komitmen para pihak untuk menyelesaikan kesalahpahaman melalui dialog, Disarankan agar fasilitator hanya bisa diidentifikasi apabila mereka dibutuhkan bukan mengidentifikasi mereka terlebih dahulu.
- Bahwa akan menggunakan pengadilan sebagai pilihan terakhir, atau yang berhubungan dengan masalah-masalah serius atau kriminal.

## **2. Pembangunan Desa di Timor-Leste dan Sektor Swasta**

### **2.1 Ekonomi Pedesaan Timor-Leste**

Timor-Leste dikenal pada masa lampau dengan sumberdaya-sumberdayanya yang kaya, dan sejarah menggambarkan bagaimana pulau Timor pada awalnya memikat perhatian para penjajah Eropa karena reputasinya sebagai sumber kayu cendana yang banyak diminati.<sup>31</sup> Meluasnya industri kopi pada abad ke-19 juga merupakan sebuah prestasi yang luar biasa, walaupun awal yang sulit dan sekarang perlu untuk rehabilitasi (dibahas di bawah).<sup>32</sup> Meskipun gambaran industri utama dari masa lampau ini, berbagai bentuk geografis pulau Timor secara historis memberikan tantangan. Tantangan-tantangan ini meliputi pola curah hujan yang tidak dapat diprediksi dan sifat aquifer alami yang dapat berubah. Berkaitan dengan karakteristiknya, kecenderungan kekeringan untuk mengakibatkan kekurangan pangan (Ormeling 1957, 21, 239-40), dan telah diamati pula bahwa untuk para penghuni awal, pola hidrologi Timor mengharuskan ‘bentuk pemukiman dan budidaya tanaman yang tersebar.’ (Fox 1988, 262).<sup>33</sup>

mencapai proporsi-proporsi yang “luar biasa” dari waktu ke waktu (Bank Dunia 2006, 19). Oleh karena itu, sangat penting mengidentifikasi saluran penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebelum mulai melakukan sebuah kesepakatan yang melibatkan investor dan anggota masyarakat. Di Timor-Leste, karena alasan-alasan seperti sifat pola pemukiman penduduk dan organisasi sosio-politik, jangkauan pemerintah secara historis terbatas, kurang percaya terhadap sistem pengadilan di masa penduduk pemerintah Indonesia dan tidak adanya akses dan tidak biasa ke pengadilan bagi banyak orang, jadi forum pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui *suco* masih dipakai secara luas di negara ini. Forum-forum suco ini cenderung menekankan pada tiga hal seperti (1) klarifikasi masalah original dan kesalahan (melalui pengujian “cerita” lengkap yang berhubungan dengan sengketa), (2) negosiasi untuk kompensasi, dan (3) rekonstruksi antara semua pihak.

<sup>31</sup> Seperti sejarawan Charles Boxer (1960, 350) mengamati, ‘iauh sebelum Vasco da Gama mengelinlingi Tanjung Harapan Baik, Timor dikenal oleh orang Cina sebagai sumber suplai kayu cendana terbaik mereka.’

<sup>32</sup> Untuk membaca lebih jauh tentang pengembangan industri kopi di paruh kedua abad 19, lihat Clarence-Smith (1992), Gunn (1999, 160-163) dan Davidson (1994, 8,90-95).

<sup>33</sup> Menurut sebuah laporan Kementrian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (MAFF), pulau Timor juga “memiliki tanah yang secara relatif tidak produktif, kesuburan rendah, dan rapuh” (Timor-Leste 2004, 1).

Saat ini, mayoritas penduduk Timor-Leste bertahan dengan budidaya tanaman subsistensi. Selain itu, produktivitas pertanian ‘sangat rendah menurut standar dunia dan regional’, dengan hasil tanaman pangan sekitar 20 sampai 35 persen dari yang dicapai di berbagai Negara Asia.<sup>34</sup> Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas termasuk rotasi tanaman minimal, petani memiliki pengetahuan teknis yang terbatas, kurangnya akses kepada varietas hasil tinggi dan bantuan seperti pupuk (Young, Santos, and Shetty 2010, 15). Selain itu, rendahnya tingkat produktivitas diperparah oleh kerugian pasca panen yang berasal dari praktik penyimpanan makanan yang buruk (Timor-Leste 2008, 17).



Gambar 11-13: Kayu cendana masih bisa ditemukan di Timor-Leste. Sebagaimana ditunjukkan oleh gambar-gambar dari distrik Covalima ini, banyak keluarga menanam kayu jati sebagai sumber kayu dan uang tunai, dan sejumah perkebunan kayu jati (dengan kualitas yang berbeda-beda) masih bertahan, yang sudah ada sejak periode pendudukan Indonesia. (Gambar: Rod Nixon)

Saat ini, inisiatif-inisiatif seperti proyek Benih Kehidupan<sup>35</sup> didukung AusAid memainkan peran penting dalam mempromosikan komoditas utama yang berpenghasilan lebih tinggi untuk meningkatkan mata pencarihan. Akan tetapi prospeknya masih tetap buruk, di mana satu evaluasi menyimpulkan bahwa ‘tidak ada peningkatan signifikan dalam produksi makanan’ terjadi selama periode 2000-2007.<sup>36</sup> Analisis lain memprediksi bahwa meskipun tingkat produksi akan meningkat, namun peningkatan produksi dapat dilampaui oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi … yang diharapkan terjadi dalam jangka menengah” (Timor-Leste 2008, 33).

#### Pentingnya Investasi Sektor Swasta

Besarnya tantangan pembangunan pertanian di Timor-Leste, dan tantangan-tantangan yang berhubungan dengan pengembangan sebuah layanan extension pertanian publik yang efektif,<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Menurut Young, Santos, dan Shetty (2010, 15), produksi tanaman pangan di tahun 2007 mendekati 70,000 ton jagung, 50,000 ton ubi kayu, 45,000 ton beras, and 34,000 ton kentang. Lihat juga RDTL (2009b, 12-14).

<sup>35</sup> Lihat <http://www.seedsofetimor.org/>. Perhatikan bahwa proyek memberikan perhatian khusus terhadap jagung, beras, kentang, ubi kayu dan kacang tanah.

<sup>36</sup> Lihat Young, Santos and Shetty (2010, 2), yang mengacu pada data Dana Moneter Internasional/International Monetary Fund (IMF) dan FAO.

<sup>37</sup> Menurut dokumentasi pemerintah (Timor-Leste 2008, 15) “MAF telah mengidentifikasi keterbatasan-keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan dan penyebarluaran mereka, dan tidak adanya sebuah sistem monitoring kinerja yang efektif sebagai kendala utama terhadap kemampuan MAF untuk mengimplementasikan program-program berprioritas tinggi di lapangan dan pelayanan kepada para petani sesuai waktu yang ditentukan.” Kesimpulan ini juga tercermati dalam hasil penelitian terbaru dari Studi Diagnostik Integrasi Perdagangan (DTIS) yang telah diselesaikan oleh Bank Dunia (2011, 73).

#### Evaluasi Terlebih Dahulu

Akhinya, meskipun konsultasi dan negosiasi dengan pemimpin-pemimpin masyarakat dan semua yang lain yang kemungkinan akan dilibatkan dalam sebuah proyek agribisnis sangat penting, namun para investor diingatkan untuk tidak mengusulkan sebuah proyek yang didefinisi dengan baik berskala penuh hingga evaluasi yang memadai atas lingkungan fisik dan sosial telah dilakukan. Lebih dikehendaki agar kelayakan pendekatan yang dimaksud diuji selama diimplementasikan melalui percobaan dan kemudian disempurnakan secara tepat. Hal ini dijelaskan dibawah pada bagian Evaluasi dan Penilaian Resiko dan Manajemen .

#### 1.2 Evaluasi dan Manajemen Resiko

Pengalaman di juridiksi-juridiksi lain menunjukkan bagaimana kegagalan melakukan percobaan menanam yang cukup dan aktifitas evaluasi yang luas, seperti penilaian terhadap kapasitas lokal, dapat menyebabkan gagal panen dan ketidakpuasan. Hal ini dapat mengecilkan hati anggota masyarakat untuk bekerjasama lebih jauh dengan para investor, kemungkinan untuk waktu yang lama. Sebagai contoh, Eaton menyebutkan sebuah kasus program pertanian kontraktan pisang yang gagal di Fiji dimana faktor-faktor yang memberi kontribusi terhadap kegagalan termasuk tanah yang tidak cocok,<sup>17</sup> dan di mana kegagalan proyek tersebut meninggalkan suatu kesan negatif kepada semua yang terlibat dan bertahan selama 40 tahun. Karena kebutuhan akan intensifikasi pertanian di Timor-Leste, dan juga keinginan supaya semua pihak mendapat keuntungan melalui usaha pembangunan desa, maka penting sekali bahwa para investor mencoba pendekatan yang mereka maksudkan untuk memastikan kelayakannya dengan konteks sosial dan lingkungan. Apabila tidak melakukan hal ini sebelum perluasan artinya menghadapkan bukan hanya investasi mereka sendiri terhadap risiko, tetapi juga terhadap mata pencarihan anggota masyarakat yang terlibat dalam proyek tersebut dan kesediaan anggota masyarakat untuk bekerjasama dengan aktor-aktor lain dari luar dari siapa mereka bisa belajar pendekatan-pendekatan baru di masa yang akan datang.

**Pastikan untuk mengevaluasi pendekatan anda sebelum melakukan perluasan dan tidak mendatangkan risiko tidak hanya terhadap investasi anda, tetapi juga terhadap mata pencarihan anggota masyarakat dan kesediaan anggota masyarakat untuk bekerjasama dengan aktor-aktor dari luar di masa yang akan datang**

#### Sifat Rapuh dari Keberadaan Subsistensi

Seperi sudah dilihat, sifat subsistensi ekonomi pedesaan, teknologi pertanian dasar yang sedang dipakai saat ini, tingkat produktivitas pertanian yang rendah dan sifat konservatif dari penduduk desa berarti bahwa perhatian khusus harus diberikan untuk evaluasi proyek-proyek di dalam konteks Timor-Leste. Paling penting untuk dicatat adalah bahwa petani-petani subsistensi di Timor-Leste memiliki suatu keberadaan yang rapuh dengan sedikit ruang untuk membuat kesalahan, karena itu mereka tidak mampu untuk menginvestasikan upaya-upaya dalam usaha pertanian yang tidak dipertimbangkan secara matang. Karena waktu dan lahan yang terbatas, partisipasi dalam proyek-proyek agribisnis berarti kemungkinan bisa mengurangi investasi untuk penanaman tanaman pangan tradisional. Karena itu, jika proyek agribisnis gagal, para petani bisa menghadapi resiko hebat terhadap mata pencarihan mereka. Walaupun transfer pendekatan-pendekatan pertanian yang baru kepada semua anggota masyarakat desa merupakan sebuah prioritas penting, namun

<sup>17</sup> Informasi terkini mengenai studi kasus ini (Eaton berikutnya) menunjukkan bahwa pupuk yang diberikan kepada para petani untuk melawan tanah tandus yang menonjol yang berhubungan dengan studi kasus ini sudah dijual untuk mendapatkan uang.

untuk gunakan sebagai lahan proyek. Lakukan ini bersama pemimpin masyarakat, pemilik tanah, dan lebih baik bersama pemilik tanah dari tempat-tempat terdekat. Perhatikan bahwa Timor-Leste belum memiliki sebuah kerangka legislatif lengkap yang mengatur tanah. Hal ini dibahas lebih lanjut dalam Bagian 2.

**Gambar 4: Memeriksa penanda batas yang disengketakan dekat Citrana, Oecusse (Foto: Rod Nixon)**

#### Pentingnya Konsultasi dengan Perempuan dan Melibatkan Perempuan

Sangat penting bagi investor untuk melakukan konsultasi dan negosiasi dengan semua pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut, tidak hanya dengan kepala keluarga laki-laki yang mungkin bukan peserta. Seperti alasan-alasan yang telah dibahas dalam pedoman-pecahman ini, mungkin perempuan menjadi kunci suksesnya proyek karena peran mereka dalam aktifitas pertanian, dan harus dilakukan segala usaha untuk melibatkan mereka dalam tahap-tahap konsultasi, negosiasi, pelatihan, pelaksanaan dan distribusi keuntungan (dibahas dibawah).<sup>15</sup>

Untuk menarik partisipasi perempuan di dalam konsultasi dan aktifitas lain diperlukan usaha ekstra dari para investor, misalnya melakukan pengaturan pengasuhan anak agar memungkinkan perempuan menghadiri pertemuan-pertemuan.

**Gambar 5: Para pesera wanita dalam kemitraan agribisnis, Baucau (Foto: Carlos Alves)**



#### Mendokumentasikan Kesepakatan

Setelah disepakati dengan autoritas lokal dan para peserta, syarat-syarat kesepakatan harus diuraikan dalam kesepakatan tertulis dengan bahasa yang sesederhana dan sejelas mungkin (diperbaharui sesering mungkin seperlunya) serta sediakan salinan dalam bahasa yang sesuai (Tetum atau Bahasa Indonesia). Kontrak-kontrak itu harus ditandatangani oleh petani-petani individu, termasuk perempuan, dan juga para wakil petani dan individu-individu lain yang relevan. Apabila investor bermaksud untuk memotong sejumlah uang dari pembayaran terakhir sebagai tebusan atas bantuan pertanian yang telah diberikan, ini harus secara jelas disebutkan di dalam kesepakatan.<sup>16</sup>

Perhatian ekstra harus diambil untuk memastikan bahwa salinan ganda kesepakatan dibagi-bagi, sebaiknya ditaruh dalam map plastik dan disimpan di tempat yang aman seperti di kantor atau rumah *chefe de suco*, kantor administrator sub-distrirk, dan tempat tinggal ketua kelompok tani. Meskipun persiapan dan distribusi kesepakatan tertulis penting, namun kunci penting untuk mengembangkan suatu hubungan kerjasama yang baik antara para investor dan anggota masyarakat adalah membangun dan memelihara saluran komunikasi yang penuh arti yang dapat diakses. Bagian ini dijelaskan lebih jauh pada Komunikasi dan Penyuluhan (dibawah).

untuk gunakan sebagai lahan proyek. Lakukan ini bersama pemimpin-pemimpin masyarakat, pemilik tanah, dan lebih baik bersama pemilik tanah dari tempat-tempat terdekat. Perhatikan bahwa Timor-Leste belum memiliki sebuah kerangka legislatif lengkap yang mengatur tanah. Hal ini dibahas lebih lanjut dalam Bagian 2.

menunjukkan bahwa sektor swasta dapat memainkan peran yang berharga dalam memperkenalkan teknologi baru, menghubungkan para petani ke pasar, dan menanam modal pada intensifikasi pertanian. Namun untuk saat ini meskipun banyak aktor sektor swasta aktif di Timor-Leste, hanya sedikit investasi sektor swasta dalam intensifikasi pertanian yang telah terjadi, meliputi tidak lebih dari beberapa ratus hektar.<sup>38</sup>

Salah satu rintangan utama bagi investasi sektor swasta dalam intensifikasi menyangkut kurangnya sarana yang telah dibangun lewat mana para investor dapat terlibat dengan anggota masyarakat dalam usaha-usaha yang produktif, karena jelas bahwa baik kesepakatan penggunaan lahan maupun kontrak tidak berperan penting dalam agribisnis di Timor-Leste. Dengan tidak adanya mekanisme kontrak yang memungkinkan para investor untuk berinvestasi dalam peningkatan produksi melalui penyediaan bahan-bahan seperti bibit, pupuk, irigasi, atau perlahan, sektor agribisnis swasta di Timor-Leste cenderung ditandai oleh sekelompok kecil pembeli yang bersaing satu sama lain untuk bagian dari panen yang terbatas, dan berkang menurut beberapa laporan. Dengan pengecualian dari perusahaan Cooperativa Cafe Timor (CCT) dan satu inisiatif sektor swasta berskala kecil (Timor Global), hampir tidak ada investasi sektor swasta dalam perluasan produksi agribisnis atau perbaikan kualitas.<sup>39</sup>

Seperti dijelaskan dalam studi Diagnostik Integrasi Perdagangan Bank Dunia (2011, 44), kurangnya investasi dalam intensifikasi terutama jelas dalam subsektor kopi, di mana sejumlah kecil perusahaan bersaing untuk membeli bagian dari 'output kopi yang stagnan' dari para petani untuk eksport:

(Salah satu) hambatan utama adalah kurangnya dukungan penyuluhan dari sektor swasta kepada para petani karena potensi masalah parasitisme/pedagang pra tunai. Ada sedikit insentif bagi sektor swasta untuk memberikan saran ekstensi kepada para petani karena manfaatnya dapat direbut oleh pesaing.

Salah seorang pedagang kopi<sup>40</sup> mengatakan bahwa 'hasil per hektar saat ini sangat rendah dan apabila ada kecenderungan untuk turun, bisa mengurangi industri kopi kami menjadi tidak relevan dalam perdagangan internasional. Sebagaimana diuraikan dalam Studi Diagnostik Perdagangan Bank Dunia sektor kopi Timor-Leste, yang terdiri lebih dari 50.000 hektar areal perkebunan, telah menjadi sumber uang tunai untuk kira-kira 67.000 keluarga diperkirakan sebesar sekitar 30 persen dari populasi (Bank Dunia 2011, 41, 46). Karena itu, jika produktivitas kopi menurun akan berdampak negatif pada pendapatan kas hampir seprtiga dari populasi. Sementara itu, investasi dalam strategi manajemen yang baik, seperti penanaman kembali dan pemangkasan diperkirakan memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas kopi di Timor-Leste sekitar antara tiga dan empat kali, dengan aliran- manfaat kepada para anggota penduduk desa.

## 2.2 Pertanian dan Tanah di Timor-Leste

### Konteks Timor-Leste

Investasi agribisnis di negara-negara berkembang merupakan sebuah bidang yang terus sukses mengikat para investor dan para petani dalam suatu hubungan yang saling mengutungkan, berdasarkan pada bonus yang bisa dibayar oleh investor untuk produksi dari lahan untuk mana telah mereka urus sertifikasi organiknya. Dalam hal ini, para petani menjual kepada investor di luar kepentigaan pribadi, bahkan tanpa kontrak, karena mereka tidak akan bisa mendapat harga yang sama dari pembeli lain.

<sup>38</sup> Terutama, beberapa contoh dari kesuksesan investasi melibatkan skema sertifikasi organik yang kelihatan sukses mengikat para investor dan para petani dalam suatu hubungan yang saling mengutungkan, berdasarkan pada bonus yang bisa dibayar oleh investor untuk produksi dari lahan untuk mana telah mereka urus sertifikasi organiknya. Dalam hal ini, para petani menjual kepada investor di luar kepentigaan pribadi, bahkan tanpa kontrak, karena mereka tidak akan bisa mendapat harga yang sama dari pembeli lain.

<sup>39</sup> Untuk pemberitahuan lengkap mengenai bidang ini yang meliputi contoh dari Afrika, lihat Eaton (2011).  
<sup>40</sup> Bobby Lae, dikutip di dalam Timor-Leste (2009a, 29).

		model-model lain). Namun pendekatan itu masih bisa digunakan sebagai suatu pengelalan atas metode-metode penanaman yang lebih intensif.
		Bagi para investor, mengamankan hak guna atas tanah pertanian akan membutuhkan negosiasi dengan masyarakat pemilik tanah (lihat Bagian 2).
<b>Manajemen Kontrak</b>	Sebuah pengaturan di mana investor mengelola tanah pertanian (masyarakat) melalui pengaturan yang dinegosiasi dengan masyarakat pemilik tanah. Pengalaman di tempat lain menunjukkan bahwa kontrak-kontrak manajemen mungkin dapat melibatkan suatu pengaturan pembagian-keuntungan dari pada pembayaran yang telah ditetapkan sebelumnya. <sup>12</sup> Dalam hal ini, pengaturan bagaimanakah kontrak dapat dilihat seolah-olah mirip dengan pengaturan bagi-hasil. <sup>13</sup>	Dalam konteks Timor-Leste, tenaga kerja lokal (masyarakat) kemungkinan akan dilibatkan oleh investor untuk bekerja pada proyek tersebut. Pembayaran atas tenaga kerja mereka bisa didasarkan pada pengaturan bagi-keuntungan, pengaturan biaya upah tenaga kerja atau keduanya. Dalam sebuah kasus kerja yang didokumentasi, para petani dibayar untuk bekerja seperti membersihkan lahan, mencabut rumput, ditambah dengan pembagian keuntungan setelah selesai masa panen. Bukti dari tempat lain menunjukkan bahwa pembayaran upah secara harian ada keuntungannya mengurangi kesalahpahaman.
<b>Pertanian Kontrakan</b>	Sebuah pengaturan di mana seorang investor menyediakan bantuan pertanian (seperti bibit unggul, pupuk, penyediaan mesin dan peralatan) dan petani menanam produk untuk dijual kepada investor. Pada umumnya harga selalu disetujui di muka sebelum produksi dan kuota agak spesifik serta spesifikasinya ditetapkan sebelum penanaman. Pembayaran kemungkinan dilakukan pada saat pengumpulan hasil panen, dikurangi biaya bantuan pertanian yang disediakan oleh investor. <sup>14</sup>	Pemilik tanah biasanya mengontrol kebanyakan tanah yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan proyek dan secara langsung mengelola seluruh kegiatan pertanian tersebut (biasanya sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam kontрак mengenai persiapan lahan, sistematiska penanaman dan penggunaan pupuk). Investor mungkin memerlukan suatu kesepakatan atas hak-penggunaan sebagian lahan untuk tujuan percobaan setidaknya untuk periode awal.

tempat tujuan dibandingkan dengan negara-negara Afrika dengan bidang besar lahan produktif, mungkin menampilkan ciri dataran sungai luas yang diperkaya per tahun oleh endapan lumpur (Funk 2010, 61). Walaupun investor diketahui telah mendekati pemerintah dalam kaitan dengan proposal pembangunan dengan skala besar sebagaimana dibuktikan Nota Kesepahaman 2008 antara pemerintah dan sebuah perusahaan agribisnis tentang sekitar 50 tahun yang dapat diperbaharui untuk 100.000 hektar 'lahan tidak produktif'<sup>41</sup>, tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa setiap usulan telah melampaui tahap yang paling awal. Pengalaman di negara-negara yang didominasi pertanian subsistensi di kawasan itu menunjukkan bahwa usaha-usaha untuk mendirikan proyek-proyek agribisnis berskala besar tanpa persetujuan dari anggota masyarakat akan menghadapi perlawanan yang besar, dan tingkat kewaspadaan yang dilakukan di Timor-Leste oleh lembaga-lembaga internasional dan organisasi-organisasi masyarakat madani dapat membantu dalam memastikan bahwa setiap proposal agribisnis sama dengan terkena pengawasan ketat. Namun, ada kekhawatiran kurangnya kejelasan hukum mengenai lahan mana yang secara potensial dapat dihibahkan oleh Pemerintah Timor-Leste untuk para investor, dan pemerintah dianggap 'berencana untuk mempercepat pengembangan tanah negara, termasuk melalui pemukiman kembali keluarga-keluarga dan pengambilahan' (ICG 2010, 16).

#### Mengakses Lahan Pertanian di Timor-Leste

Untuk mempraktekkan pertanian, para investor harus memiliki akses terhadap tanah atau mereka harus terlibat dengan mereka yang memiliki akses terhadap tanah. Di Timor-Leste, keterlibatan dengan anggota masyarakat sangat penting untuk usaha pertanian sukses karena alasan-alasan historis. Selama masa Portugis dan Indonesia, hanya sebagian kecil dari tanah itu digunakan untuk tujuan pertanian intensif dan kurang dari lima persen lahan di negara itu tampaknya sudah pernah terdaftar atau secara definitif telah ditransfer dari kepemilikan adat (Nixon 2007). Dengan demikian, ekonomi desa secara keseluruhan berdasarkan pada pertanian subsistensi dan kepemilikan adat dan/atau klaim penggunaan tanah kemungkinan tetap berlaku atas sebagian besar lahan pertanian. Bahkan tanah yang secara teknis milik negara, seperti lahan perkebunan misalnya yang sebelumnya disewakan untuk usaha, dapat berada di bawah kepemilikan adat dan/atau klaim menggunakan tanah baik sebelum atau setelah tanggal tanah itu awalnya ditransfer dari kepemilikan adat.<sup>42</sup> Pengalaman dari satu perusahaan yang dijamin sewa atas tanah perkebunan dari negara menunjukkan bahwa dalam dan dari dirinya sendiri, sewa atas tanah 'negara' dapat memberikan dasar yang tidak cukup untuk investasi agribisnis. Dalam hal ini (lihat Kotak 6 di bawah) sewa itu gagal memberikan kepemilikan atas tanah kosong karena tanah tersebut diduduki dan digunakan oleh anggota masyarakat.

#### Area Lahan

Sistem-sistem penilikan tanah di Timor-Leste rumit dan melibatkan sejumlah hak kepemilikan dan hak guna. Hak-hak ini meliputi hak masyarakat, hak keluarga, dan hak individu. Juga bukan tidak biasa bahwa tanah yang dilaporkan telah ditransfer kepemilikannya dari kepemilikan tradisional selama zaman Portugis dan Indonesia untuk tetap berada dibawah kepemilikan tradisional. Untuk menghindari kesalahpahaman, kunjungi secara fisik dan mengukur lahan tanah yang diusulkan

<sup>41</sup> Lihat <http://www.laoahamutuk.org/Agric/08Agrofuels.htm#sugarcane>

<sup>42</sup> Contoh, studi dari Clarence-Smith (1992, 11) mengenai pertanian petani penggarap kecil di Timor-Leste menunjukkan bahwa beberapa lahan kopitua berhati-hati tentang menyewa tanah pertanian 'negara'. Meskipun tanah negara secara resmi berdasarkan inklusi sejarah di perkebunan *Sociedade Agricola Patria e Trabicho* (SAPT) yang terkenal, sewa ini dikeluarkan oleh negara tanpa konsultasi dengan anggota masyarakat dari daerah yang disewa. Terbukti bahwa tanah itu tunduk pada kedua klaim baik hak pemanfaatan maupun klaim kepemilikan oleh kelompok-kelompok yang tinggal di area sewa dan

<sup>12</sup> Untuk definisi dan informasi lebih jauh lihat Vermeulen dan Cotula (2010, 29-33).

<sup>13</sup> Penelitian yang dilakukan pada tahun 2010 di Timor-Leste oleh J4P bekerjasama dengan Fundasaun Haburas telah mendokumentasi sebuah contoh mengenai seorang investor agribisnis yang bereksperimen dengan menggunakan versi pendekatan ini.

<sup>14</sup> Lihat juga online Sumber Pusat Kontrak Pertanian dari Organisasi Internasional untuk Pertanian dan Bahan panggang (FAO) di <http://www.fao.org/ag/ags/contract-farming/index-cf/en/>



namun para investor juga harus pasti untuk bertemu dan bernegosiasi, secara langsung dengan semua orang yang akan terlibat di dalam proyek tersebut setiap hari. Syarat-syarat dan kondisi pengaturan yang diusulkan harus diklarifikasi dan disetujui di tingkat ini bersama peserta-peserta aktual, beserta referensi untuk setiap bantuan pertanian di mana baik investor maupun anggota masyarakat sepakat untuk menyediakan sesuai investasi dan setiap bantuan di mana\_anggota masyarakat setuju untuk menyediakannya. Beberapa model yang mungkin tepat (mungkin dalam bentuk yang dihibriddasi) sesuai konteks Timor-Leste, diuraikan dalam Tabel 1 dibawah. Dalam hal manajemen kontrak atau pengaturan kontrak pertanian, pembayaran atau pengaturan pembagian keuntungan juga harus ditetapkan sebelum memulai aktifitas. Jika diusulkan bahwa keuntungan kepada para petani akan disesuaikan dengan fluktuasi pasar (ke salah satu arah), maka parameter-parameter realistik dari fluktuasi ini dan faktor-faktor yang akan menentukan harga akhir harus dijelaskan dengan jelas.<sup>9</sup>

Akhirnya, harus dilakukan usaha-usaha untuk membagi informasi mengenai proyek kepada anggota masyarakat yang tidak dilibatkan dalam proyek tersebut dan juga anggota masyarakat di sekitarnya. Ini sangat penting untuk memastikan pemahaman masyarakat lokal atas sifat dan jangkauan proyek dan untuk mencegah harapan mengenai manfaat-manfaat potensial yang bisa mengalir dari proyek agar tidak menjadi tidak realistik.

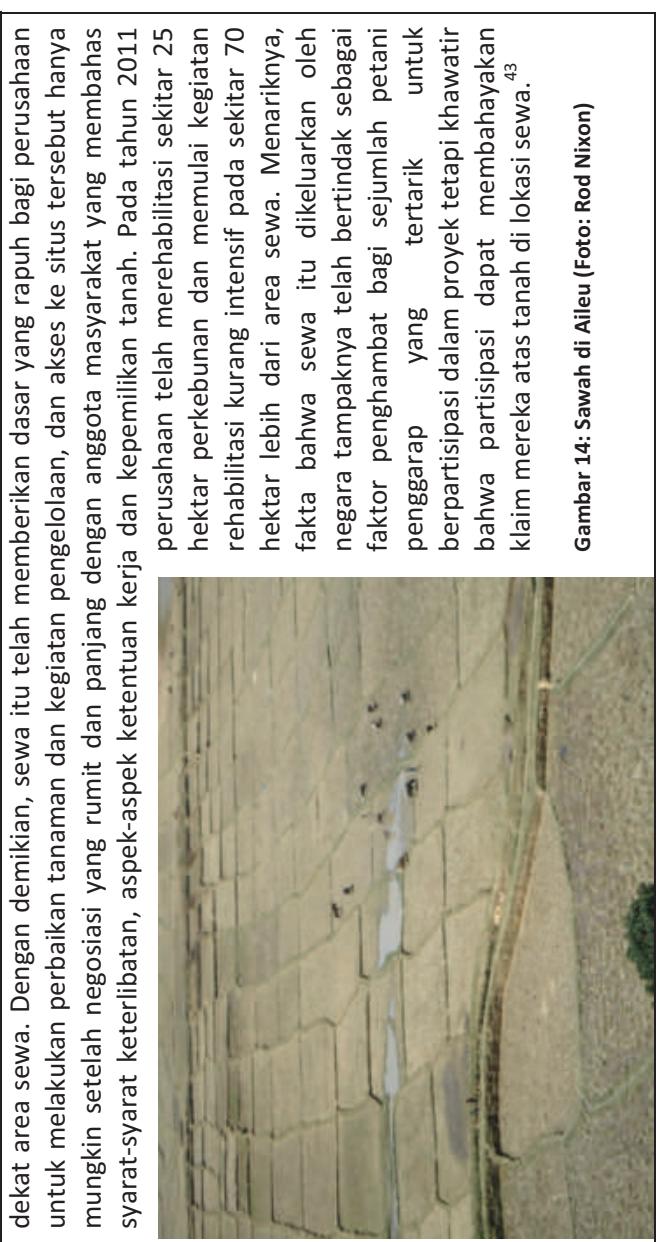
Tabel 1: Contoh-contoh Kemungkinan Model-model Agribisnis di Timor-Leste<sup>10</sup>

Model	Deskripsi	Komentar-komentar
Pasar-pasar tunai/Spot markets	Petani memproduksi di atas lahan mereka sendiri untuk dijual kepada pembeli. Tidak melibatkan kontrak dan tidak ada bantuan pertanian yang disediakan lebih dahulu oleh suatu sponsor. <sup>11</sup>	Ini adalah bentuk agribisnis yang dominan di Timor-Leste. Tidak adanya bantuan pertanian atau lain-lain dari investor merupakan faktor yang memberi andil kepada berlanjutnya tingkat produktifitas yang rendah.
Menggunakan program-program sertifikasi	Seorang investor membayar biaya sertifikasi tanaman yang ditanam oleh masyarakat tertentu. Program sertifikasi mungkin. Misalnya diarahkan untuk produksi organik atau <i>fairtrade labelling</i> .	Investasi dalam sertifikasi dapat memperkuat hubungan antara anggota masyarakat dan investor karena keduanya bisa memperoleh keuntungan dari telah meningkatnya nilai pasar produk yang sudah disertifikasi. Namun, pengaturan ini tidak harus meningkatkan produktifitas tanaman secara keseluruhan.
Periode-Tetap Kespakatan penggunaan tanah dan menyewa tenaga kerja	Investor menyewa tanah dari para anggota sebuah masyarakat berjanggung jawab sepenuhnya atas penanaman dan manajemen produksi. Investor membayar tenaga kerja lokal untuk mengolah tanah tersebut sebagai karyawan. Masyarakat pemilik tanah mendapat keuntungan dari pembayaran sewa oleh investor dan pekerja individu mendapat keuntungan dari upah kerja.	Kesepakatan penggunaan tanah, walaupun berukuran kecil, kelihatannya sangat penting digunakan sebagai model percobaan pertanian terutama sebelum pengembangan (contohnya dalam hubungan dengan proyek pertanian kontrak). Namun, dalam beberapa kasus, pendekatan bisnis mungkin terpusat secara keseluruhan pada pengolahan pertanian pada tanah sewaan.

<sup>9</sup> Indeks Pasar dilaporkan (Eaton and Shepherd 2001:14-15) sebagai ciri beberapa pengaturan pertanian kontrakan.

<sup>10</sup> Lihat juga Vermeulen and Cotula (2010: 87-97) untuk sebuah diskusi mengenai "model-model inklusif untuk investasi agribisnis," yang memandang bahwa "apa yang bisa berfungsi lebih baik secara lokal ketika masih menarik untuk para investor adalah sangat spesifik dengan konteks, dan masih tergantung pada pemilik tanah, kebijakan, budaya, sejarah dan juga pertumbuhan-pertumbuhan biofisik dan demografi."

<sup>11</sup> Lihat Simmons (2002, 3-4) untuk referensi-referensi dari aspek-aspek karakteristik pasar primer.



Gambar 14: Sawah di Aileu (Foto: Rod Nixon)

dekat area sawa. Dengan demikian, sawa itu telah memberikan dasar yang rapih bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan tanaman dan kegiatan pengelolaan, dan akses ke situs tersebut hanya mungkin setelah negosiasi yang rumit dan panjang dengan anggota masyarakat yang membasah syarat-syarat keterlibatan, aspek-aspek ketentuan kerja dan kepemilikan tanah. Pada tahun 2011 perusahaan telah merehabilitasi sekitar 25 hektar perkebunan dan memulai kegiatan rehabilitasi kurang intensif pada sekitar 70 hektar lebih dari area sawa. Menariknya, fakta bahwa sawa itu dikeluarkan oleh negara tampaknya telah bertindak sebagai faktor penghambat bagi sejumlah petani penggarap yang tertarik untuk berpartisipasi dalam proyek tetapi khawatir bahwa partisipasi dapat membahayakan klaim mereka atas tanah di lokasi sawa.<sup>43</sup>

Meskipun dalam beberapa situasi sawa atas tanah 'negara' barangkali adalah pilihan yang layak, mungkin sebagai bagian dari paket langkah-langkah, setiap keterlibatan yang sukses antara agribisnis dan masyarakat mungkin memerlukan konsultasi dan negosiasi dengan anggota masyarakat (seperti telah dibahas dalam Bagian 1). Para investor harus berhati-hati untuk memastikan bahwa perkembangan agribisnis yang diusulkan tidak akan mengganggu produksi tanaman pangan, akses ke air, atau panen hasil hutan, makanan liar atau obat-obatan. Perempuan maupun laki-laki harus dikonsultasi mengenai masalah pertahanan, sebagai perempuan mungkin menjadi pengguna utama tanah di sekitar lokasi proyek yang diusulkan.

Sebagaimana telah dibahas pada bagian Evaluasi dan Manajemen Risiko dari pedoman ini, penting dalam konteks subsistensi di Timor-Leste, untuk kelangsungan pendekatan agribisnis tertentu untuk diuji dan disetel dengan baik sebelum produksi tanaman pangan yang cukup juga akan memungkinkan kapasitas petani lokal untuk dinilai, dengan demikian memfasilitasi kebutuhan pelatihan dan tingkat dukungan ekstensi yang akan ditentukan. Jika berbagai kegiatan evaluasi akan dilaksanakan oleh investor, maka akses ke setidaknya beberapa hektar tanah melalui perjanjian penggunaan lahan dengan masyarakat pemilik lahan mungkin diperlukan, bahkan jika tahap perluasan proyek ini dimaksudkan untuk dilakukan atas dasar pertanian kontrak. Pada waktunya, (mungkin tergantung pada skala pengembangan) perjanjian penggunaan tersebut dapat tunduk kepada ketentuan tanah komunitas dari hukum tanah yang akan datang.

#### Sebuah Undang-undang Pertanahan Masa Depan

Telah diantisipasi bahwa sebuah Undang-Undang Pertanahan akan disetujui, setelah satu dekade dalam perumusan dan diskusi. Undang-undang pertanahan yang akan datang yang mengatur tanah masyarakat dapat memfasilitasi demarkasi zona perlindungan masyarakat dan areal kekayaan masyarakat dan dengan demikian memberikan dasar untuk melindungi kekayaan masyarakat dari kemungkinan pengambilan tanah secara paksa.<sup>44</sup> Yang terpenting bagi investor dan juga masyarakat,

<sup>43</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Timor Global antara 2009 dan 2011 dan penelitian lapangan dilakukan oleh J4P melalui kerjasama dengan Fundasau Haburas pada tahun 2010. Lihat juga Nixon 2009.

<sup>44</sup> Lihat khususnya Bab V Rancangan Undang-Undang Pertanahan Timor-Leste (RDTL 2010) mengenai "Zona Perlindungan dan Kekayaan Masyarakat." Pasal 22 Rancangan itu memberikan tanggungjawab kepada Negara untuk memastikan bahwa "semua praktik kebiasaan adat sesuai dengan Konstitusi dan lebih partisipatoris,

hukum dapat membentuk suatu kerangka kerja yang dapat mengatur berbagai aspek yang terkait dengan keterlibatan antara investor dan masyarakat termasuk kewajiban konsultasi, pemberian hak penggunaan kepada pihak ketiga, pertimbangan-pertimbangan sosial, lingkungan dan manajemen kekayaan alam, dan aspek-aspek penyelesaian sengketa. Untuk menghindari penundaan yang tidak perlu berkaitan dengan pengembangan berskala kecil, undang-undang dapat memberikan sistem yang terhuyung atau berjenjang di mana kewajiban investor sehubungan dengan berbagai aspek ini meningkat secara proporsional dengan ukuran pembangunan. Seperti telah dibahas di atas, satu opsi kebijakan untuk memastikan pematuhan terhadap aspek sosial dan lingkungan dalam kaitannya dengan investasi skala besar adalah agar Pemerintah Timor-Leste menuntut akreditasi wajib dengan sebuah skema sertifikasi internasional industri sukarela (lihat Lampiran di bawah) Ini bisa menjadi sarana untuk memastikan pematuhan terhadap prinsip-prinsip praktik yang baik yang diajui secara internasional dalam jangka pendek, sementara negara Timor-Leste melanjutkan proses yang lebih berlari-larut dalam mengembangkan kapasitas pemantauan dan penegakan hukum sendiri .

kemerdekaan Timor-Leste tampaknya memiliki kekuasaan ritual dalam sistem tradisional serta posisi-posisi dalam administrasi negara yang baru.<sup>3</sup> Sebagai pejabat di atas tingkat *soco*, bukan tidak biasa bagi para pejabat administrasi sub-distril dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara *soco* yang berbeda (Nixon 2008, 343), mereka juga dapat diharapkan untuk memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang masyarakat lokal termasuk pemahaman mengenai distribusi penduduk dari berbagai *soco* di dalam sub-distril tersebut. Ini sangat penting, karena pola pemukiman masyarakat *soco* biasanya berpencar dan mungkin tidak konsisten dengan batas-batas formal *soco* seperti yang digambarkan dalam peta-peta administratif.<sup>4</sup> Peran-peran historis para pejabat sub-distril di masyarakat berarti bahwa para investor harus yakin untuk bekerja erat dengan mereka dalam berhubungan dengan investasi-investasi agribisnis.

#### Kotak 1: Organisasi Sosio Politik Timor-Leste

Organisasi sosio politik formal di Timor-Leste terdiri dari tingkat nasional, 13 distrik dan 65 sub-distrik. Karena negara itu belum didesentralisasi, maka para administrator distrik dan sub-distril adalah termasuk pejabat-pejabat pemerintah pusat. Di bawahnya, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang 3/2009 tentang Kepemimpinan Masyarakat dan Pemilihan Mereka<sup>5</sup> ada ‘struktur-struktur kepemimpinan masyarakat’ yang terkait dengan 442 suco resmi (desa-desa bercirikan pola-pola pemukiman yang tersebar ).<sup>6</sup> ‘struktur-struktur kepemimpinan masyarakat’, dikelalai oleh *chefes de suco*, yang secara teknis bukan bagian sistem administrasi negara<sup>7</sup> meskipun kenyataannya dua ronde pemilihan lokal telah dilakukan sejak kemerdekaan untuk memilih *concelhos de suco* (dewan suco). *Sucos* sendiri terdiri dari berbagai (mungkin tujuh atau delapan) *aldeias* (dusun), di mana setiap *aldeias* terdiri dari sejumlah *Uma Kain* (rumah tangga atau sanak saudara) yang memiliki hak mereka sendiri atas tanah, kadang-kadang melalui keanggotaan *Uma Knua* (lineage/descent) groups spread throughout the *aldeias*). Meskipun status mereka semi-formal, *sucos* tentu saja masih merupakan tingkatan dasar dari organisasi sosial-politik di Timor-Leste.

#### Tingkat Suco

*Suco* adalah tingkat di mana konsultasi-konsultasi paling detail akan dilakukan karena di tingkat inilah seorang investor akan bekerjasama dengan semua orang yang bekerja langsung di dalam proyek. Diskusi kemungkinan akan mulai (mungkin difasilitasi dengan perkemahan oleh administrator sub-distril) dengan pertemuan-pertemuan dengan *chefe de suco*, para anggota dewan suco, dan individu-individu senior (katuas) yang secara tradisional bertanggungjawab atas pertanian, alokasi tanah dan air.<sup>8</sup> Diskusi melalui orang-orang akan sangat penting bagi kesuksesan setiap proyek, yang lain.

<sup>3</sup> Biasanya, sama halnya dengan pemimpin-pemimpin ritual, orang-orang ini adalah bekas anggota *Concelho Nacional da Resistência Timorense* (Devan Resistensi Nasional Timorese atau CNRT) dari zaman perlawanan yang memiliki administrasi bayangan yang mencerminkan pembagian negara di era-Indonesia ke dalam 13 distrik, 62 sub-distril dan 442 desa. Untuk informasi lebih jauh lihat Nixon (2008, 77,156-174,227-231).

<sup>4</sup> Metzner (1981) membahas tema ini sehubungan dengan Amarasi di Timor Barat Indonesia. Baru-baru ini, di Timor-Leste issu ini telah diberikan sejumlah perhatian antara lain oleh UNDevelopment Program, beserta yang lain.

<sup>5</sup> RDTL (2009a).

<sup>6</sup> Informasi mengenai jumlah resmi subdistril dan suco diberikan oleh Faustino Cardoso Gomes (pers. Comm., 23 Oktober 2010) dari *Comissão Nacional de Eleições* Timor-Leste (Komisi Pemilihan Umum Nasional ). Sebagaimana ditunjukkan pada website Kementerian Administrasi Negara dan Pengelolaan Wilayah Timor-Leste (lihat <http://estatal.gov.ti/English/Municipal/main.html>) ada juga suco tidak resmi di beberapa sub-distril.

<sup>7</sup> Sebagaimana diuraikan dalam Artikel 2 Undang-Undang kepemimpinan masyarakat oleh Faustino Cardoso Gomes (pers. Comm., 23 Oktober 2010) dari *Comissão Nacional de Eleições* Timor-Leste (Komisi Pemilihan Umum Nasional ). Sebagaimana ditunjukkan pada website Kementerian Administrasi Negara dan Pengelolaan Wilayah Timor-Leste (lihat <http://estatal.gov.ti/English/Municipal/main.html>) ada juga suco tidak resmi di beberapa sub-distril.

<sup>8</sup> Untuk pembahasan mengenai distribusi mengenai pertanggung jawaban terhadap manajemen sumber daya alam sehubungan dengan Dawan dari distrik Oecusse, lihat Meitzner Yoder (2005, 149-150) dan Nixon (2008, 331).

<sup>7</sup> Sebagaimana menghargai kesamaan gender,” untuk mempromosikan “kesinambungan lingkungan dan kelanjutan sosial-budaya dalam menggunakan sumber daya alam dan cara hidup tiap-tiap masyarakat local”, dan untuk melindungi “harta tidak bergerak dalam masyarakat dari spekulasi real estate.”

Draft Undang-undang Tanah Timor-Leste versi 5.

Jadi, konsep melibatkan diri dalam hubungan dagang timbal balik tanpa disubsidi oleh orang luar mungkin adalah sesuatu yang baru. Karena itu, para investor diminta untuk berhati-hati ketika menjelaskan bahwa mereka adalah perusahaan dan harus mendapat keuntungan agar bisa bertahan dalam bisnis dan terus memberikan keuntungan untuk semua anggota masyarakat yang bekerjasama dengan mereka. Dengan demikian direkomendasikan agar para investor memastikan untuk menyampaikan secara tepat mengenai tingkat pengembangan yang dimaksud dan tidak memberi ruang untuk harapan-harapan yang tidak realistik yang dapat menyebabkan ketidakpuasan. Lebih jauh, khususnya di sektor kopi, perusahaan-perusahaan mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah Portugis dan Indonesia masing-masing adalah *Sociedade Agrícola Pátria e Trabalho* (SAPT) dan P.T.Salazar. Perusahaan-perusahaan sekutu negara ini dirasa telah mempekerjakan banyak tanaga kerja, dan anggota masyarakat mungkin telah mendapat penghargaan yang tidak realistik tentang keuntungan yang dihasilkan dari kerjasama dengan sebuah perusahaan.

## Hindari memberi harapan yang tidak realistik kepada masyarakat partner

### 1.1 Konsultasi dan Pengambilan Keputusan Bijaksana

#### Tingkat Nasional

Masyarakat agribisnis di Timor-Leste relatif sangat kecil dan pendatang baru di sektor tersebut akan memperoleh manfaat apabila dihubungkan dengan operator-operator yang ada dan belajar dari pengalaman mereka tentang apa yang bekerja dan apa yang tidak.<sup>2</sup> Tidak kalah penting, operator-operator baru harus berbuat sesuatu yang dapat diterima oleh departemen pemerintah yang relevan, khususnya Kementerian Pertanian dan Perikanan (MAF), Kementrian Ekonomi dan Pembangunan, Kementrian Pariwisata, Perdagangan dan Industri (MTCI), dan Kementerian Kehakiman yang membawahi Direktorat Nasional Pertanahan dan Bangunan dan Jasa Pendaftaran Tanah. Walaupun bekerja dengan Pemerintah di Timor-Leste dapat memakan waktu yang sangat lama dan kemampuan kepegawaian negara masih berada di tahap awal pengembangan, jika semakin luas investor berhubungan dengan pejabat-pejabat relevan maka pejabat-pejabat tersebut akan banyak belajar tentang proyek, bagaimana proyek itu membawa manfaat untuk masyarakat, dengan demikian semakin banyak bantuan dan pemahaman yang mungkin diterima investor selama masa-masa sulit. Sebagai tambahan, apabila pengembangan kapasitas dilakukan terus-menerus, pegawai MAF dan lembaga-lembaga lain semakin berkemampuan untuk menyampaikan informasi teknis dan ekonomi yang akan bermanfaat untuk para investor.

#### Dalam Distrik

Di tingkat sub-nasional akan sangat penting bagi para investor untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan mereka kepada administrator distrik dan para administrator sub-distrik di semua sub-distrik di mana mereka merencanakan akan bekerja. Secara historis, melihat kembali periode paska-pasifikasi ke awal abad ke-20, tingkat administrasi sub-distrik telah memainkan sebuah peran penting sebagai penghubung antara negara dan organisasi sosial tradisional suco (lihat di bawah). Secara signifikan, generasi pertama para administrator sub-distrik yang dipilih pada masa

## Lampiran : Investasi Agribisnis di sebuah Negara Berkembang

### Kekhawatiran mengenai "Perampasan Tanah" di Negara Berkembang

Ketika investasi agribisnis sensitif dapat menghubungkan para petani ke pasar-pasar baru dan memfasilitasi transfer pengetahuan, keterampilan, dan teknologi baru, agribisnis yang tidak sensitif dapat menelantarkan masyarakat dan menghancurkan mata pencarian. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian yang lebih besar telah difokuskan pada laporan-laporan, yang sering tidak diverifikasi, mengenai tingkat peningkatan 'perampasan tanah' yang dilakukan para oleh investor-investor asing (termasuk pemerintah, kadang-kadang bertindak dalam kemitraan dengan aktor-aktor sektor swasta) di negara berkembang, dan dampak potensial pada keamanan pangan bagi masyarakat lokal. Sebuah makalah 2009 oleh Institute Penelitian Kebijakan Pangan Internasional (Braun and Meinzen-Dick 2009, 3–4) merujuk ke 'berkembang-biaknya akuisisi lahan pertanian di negara-negara berkembang oleh negara-negara lain yang berusaha untuk memastikan persediaan makanan mereka' dan merujuk ke laporan-laporan berita mengenai areal lahan pertanian yang luas yang dikatakan telah diperoleh di negara-negara berkembang pada periode 2006 - 2009. Namun, makalah ini juga mencatat, bahwa 'contoh-contoh yang didokumentasi baik masih langka, rincian tentang transaksi yang sering keruh, dan beberapa laporan yang bertentangan satu sama lain.'

Pada bulan September 2010 Bank Dunia merilis sebuah laporan yang mencakup analisis yang lebih rinci mengenai data yang sama. Berdasarkan pada laporan berita tentang akuisisi tanah yang terungkap antara Oktober 2009 dan Agustus 2009, para penulis<sup>45</sup> telah mengembangkan sebuah 'database 464 proyek, dengan informasi daerah 203 yang dengan total 46, 6 juta ha.' Meskipun para penulis menyatakan bahwa permintaan terkini untuk lahan pertanian telah sangat 'besar' berdasarkan 'perluasan tahunan rata-rata lahan pertanian global kurang dari 4 juta hektar sebelum 2008', mereka juga melaporkan perbedaan nyata antara niat investor dan hasil:

Sangat berbeda dari niat-niat yang dilaporkan, menurut laporan media sebagian besar proyek yang terdaftar baik tidak memperoleh tanah atau gagal menggunakan tanah yang telah mereka peroleh seperti yang dimaksudkan. Kenyataanya, hampir 30 persen masih dalam tahap penjajakan (yaitu, mereka belum memperoleh persetujuan pemerintah); 18 persen telah disetujui tetapi belum dimulai, lebih dari 30 persen berada pada tahap pengembangan awal, dan hanya 21 persen telah memulai ... Kegiatan pertanian yang sebenarnya, sering pada skala yang lebih kecil daripada yang dimaksudkan.

Apapun realitas empiris mengenai 'perampasan tanah' oleh orang asing di negara-negara berkembang, meningkatnya perhatian pada area telah mengimbau untuk memenuhi standar yang bertujuan untuk memastikan hasil yang baik bagi anggota masyarakat serta investor sehubungan dengan investasi agribisnis.

### Prinsip-Prinsip dan Kode Etik

Sebagai sarana menjaga kesejahteraan masyarakat, sejumlah organisasi internasional telah mengusulkan pengembangan kode etik, menentukan prinsip-prinsip, atau pedoman-pedoman yang harus diterapkan untuk pengembangan agribisnis di negara-negara berkembang. Tabel 3 (di bawah) menguraikan masukan yang relevan ke dalam pengembangan pedoman sukarela yang disediakan masing-masing oleh Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional dan Bank Dunia.<sup>46</sup> Pembaca

<sup>45</sup> Perhatikan beberapa perubahan kecil pada format saat reproduksi.

<sup>46</sup> Lebih jauh, pedoman sukarela terperinci mengenai "pemerintahan yang bertaggungjawab terhadap kepemilikan tanah dan sumber daya alam lain," berada dalam proses pengembangan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan organisasi-organisasi partnernya. Semua ini dimaksudkan agar konsisten dengan 26 kesepakatan internasional yang relevan mengenai pemerintahan yang baik dan akses terhadap tanah dan sumberdaya-sumberdaya alam. Untuk informasi lebih jauh, lihat FAO (2009).

<sup>2</sup> Untuk informasi mengenai aktor-aktor agribisnis yang ada, hubungi Kamar Dagang dan Industri Timor-Leste atau lihat database Peace Dividend Trust (PDT) di <http://timor.buildingmarkets.org/>

akan mencatat bahwa berbagai aspek sebagaimana dimaksud dalam tabel tercemin dalam pedoman untuk investasi agribisnis di Timor-Leste yang termasuk dalam dokumen ini.

**Tabel 3: Pedoman Sukarela untuk Investasi Agribisni yang Bertanggungjawab (transkripsi)**

Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional ‘Elemen-elemen penting dari sebuah kode etik untuk akuisisi tanah asing’ <sup>47</sup>	48 Prinsip-Prinsip untuk agro-investasi yang bertanggungjawab	Bank Dunia
<b>1. Transparansi dalam negosiasi.</b> Pemilik lahan lokal yang ada harus diinformasikan dan diberitkan dalam negosiasi-i-negosiasi transaksi tanah. Persetujuan bebas, yang diberikan sebelumnya , dan berdasarkan informasi merupakan standar untuk dipegakkan. Upaya khusus diperlukan untuk melindungi hak-hak masyarakat pribumi dan kelompok-kelompok etnis terpinggirkan. Media dan masyarakat madani dapat memainkan peran kunci dalam membuat informasi tersedia bagi publik.	<b>1. Menghormati hak atas tanah dan sumberdaya.</b> Hak-hak tanah yang ada dan sumber daya alam terkait diajuki dan dihormati.	
<b>2. Mengnormati hak-hak tanah yang ada, termasuk tanah tradisional dan hak-hak milik umum.</b> Bagi mereka yang telah kehilangan tanah harus diberi kompensasi dan direhabilitasi untuk memperoleh kehidupan yang setara. Standar dari Komisi Dunia untuk Bendungan menyediakan contoh mengenai kebijakan-kebijakan tersebut.	<b>2. Menjamin keamanan pangan.</b> Investasi tidak boleh membahayakan keamanan pangan tetapi memperkuatnya .	
<b>3. Berbagi manfaat.</b> Masyarakat setempat harus mendapat manfaat, tidak rugi, dari investasi asing di bidang pertanian. Sewa lebih disukai daripada kompensasi yang dibayar sekaligus karena mereka memberikan aliran pendapatan yang berkelanjutan ketika lahan yang diambil untuk keperluan lain. Pertanian kontrak atau skema-skema out-grower bahkan lebih baik karena mereka membiarkan petani kecil memegang kontrol atas tanah mereka namun tetap memberikan hasil panen kepada investor luar. Langkah-langkah eksplisit diperlukan untuk penegakan jika investasi disetujui atau kompensi tidak kunjung dibayarkan.	<b>3. Menjamin transparansi, pemerintahan yang baik, dan lingkungan yang kondusif.</b> Proses untuk kemudian membuat investasi-investasi terkait secara transparan, dipantau dan menjamin pertanggung-jawaban semua pihak yang berkepentingan secara legal, sesuai peraturan dan lingkungan bisnis yang tepat.	
<b>4. Konsultasi dan partisipasi.</b> Semuanya yang terkena dampak dikonsultasi, dan persetujuan dari konsultasi dicatat dan ditegakkan.	<b>4. Konsultasi dan partisipasi.</b> Semuanya yang terkena dampak dikonsultasi, dan persetujuan dari konsultasi dicatat dan ditegakkan.	
<b>5. Agro-investasi yang bertanggung jawab.</b> Investor memastikan bahwa proyek-proyek menghormati aturan hukum, mencerminkan praktik terbaik industri, layak secara ekonomi dan menghasilkan pembagian hasil yang bertahan lama.	<b>5. Agro-investasi yang bertanggung jawab.</b> Investor memastikan bahwa proyek-proyek menghormati aturan hukum, mencerminkan praktik terbaik industri, layak secara ekonomi dan menghasilkan pembagian hasil yang bertahan lama.	
<b>6. Kelangsungan Sosial.</b> Investasi menghasilkan dampak-dampak social dan distribusi yang diinginkan dan tidak boleh menambah kerentanan.	<b>6. Kelangsungan Sosial.</b> Investasi menghasilkan dampak-dampak social dan distribusi yang diinginkan dan tidak boleh menambah kerentanan.	
<b>4. Kelestarian lingkungan.</b> Dampak-dampak lingkungan dari sebuah proyek diukur dan langkah-langkah diambil untuk mendorong penggunaan sumber daya yang berkelanjutan sambil mengurangi risiko dampak-dampak negatif.’	<b>4. Kelestarian lingkungan.</b> Dampak-dampak lingkungan dan pemantauan yang teliti diperlukan untuk memastikan praktik-praktek produksi pertanian yang baik dan berkelanjutan yang menjaga terhadap penipisan tanah, hilangnya keanekaragaman hayati penting, peningkatan emisi gas rumah kaca, atau pengalihan signifikan air dari penggunaan lain bagi manusia atau lingkungan .	
<b>5. Patuh terhadap kebijakan perdagangan nasional.</b> Apabila keamanan pangan nasional menghadapi resiko (misalnya, apabila terjadi kemarau panjang), persediaan pangan dalam negeri harus menjadi prioritas. Investor-investor asing tidak mempunyai	<b>5. Patuh terhadap kebijakan perdagangan nasional.</b> Apabila keamanan pangan nasional menghadapi resiko (misalnya, apabila terjadi kemarau panjang), persediaan pangan dalam negeri harus menjadi prioritas. Investor-investor asing tidak mempunyai	

anggota masyarakat senior tertentu dianggap dapat berkomunikasi dengan dunia gaib, dan acara adat melibatkan para leluhur sudah merupakan suatu kebiasaan. Nenek moyang mewakili suatu pengaruh konservatif dalam arti positif, memperkuat legitimasi pola-pola pengetahuan tradisional yang terbukti efektif di masa lalu dan melindungi praktek-praktek yang bisa membahayakan kelangsungan hidup generasi sekarang dan mendatang. Dari sudut pandang para anggota masyarakat, para leluhur mungkin tidak responsif terhadap perubahan, tetapi seperti anggota generasi sekarang akan perlu (melalui acara adat) diberi informasi mengenai logika pendekatan-baru yang diusulkan para investor.<sup>1</sup>



**Gambar 1: Rumah adat seperti yang satu iri di Aileu, adalah bukti kekuatan kepercayaan lokal yang bertahan di Timor-Leste (Foto: Rod Nixon)**

Selain itu, tampaknya kontak utama dengan lembaga pembangunan dari luar yang telah dilakukan oleh banyak anggota masyarakat di masa lalu adalah melalui dukungan donor, NGO atau proyek pembangunan pemerintah (misalnya program Povo Kuda Governo Sosa atau Rakyat Menanam Pemerintah membeli).



**Gambar 2-3: Patung mantan gubernur Portugis Jose Celestino da Silva memandangi fasilitas-fasilitas perkebunan kopi SAPT yang didirkannya pada akhir abad 19. (Foto: Rod Nixon)**

<sup>1</sup> Berdasarkan diskusi dengan pemimpin-pemimpin ritual dan pemimpin-pemimpin masyarakat, terutama di distrik-distrik Oecusse dan Aileu pada periode 2002-2003.. Untuk bacaan dasar mengenai konservatisme masyarakat tradisional lihat Weber (1976[1915], 283; 1978, 227).

<sup>47</sup> Dikutip di dalam Braun dan Meinzen –Dick (2009, 3-4). Perhatikan bahwa yang original menggunakan bullet point bukan angka-angka.

<sup>48</sup> Dikutip di dalam Deiningher (2010, x).

**Pendahuluan**  
Timor-Leste membutuhkan investasi sektor swasta di bidang agribisnis. Tingkat produktifitas di Timor-Leste sangat rendah untuk standar dunia dan terdapat ruang bagi sektor swasta untuk memainkan peran penting dalam memperkenalkan teknologi-teknologi baru, menyediakan akses ke pasar dan menginvestasikan modal untuk intensifikasi produksi. Untuk alasan-alasan yang sama bahwa negara itu membutuhkan pembangunan pertanian, para investor harus memahami bahwa kehidupan di desa Timor-Leste sulit, dan difinisikan oleh pola-pola pertanian subsistensi yang mengalami transformasi minimal selama periode kolonial Portugis yang berakhir pada 1975 dan periode pendudukan Indonesia berikutnya yang berlangsung sampai 1999, dan dengan menganut beberapa prinsip utama bisa membuat perbedaan antara sebuah kerjasama sukses yang memberi manfaat kepada investor dan anggota masyarakat, dan proyek yang gagal hanya gagal menghasilkan keuntungan tetapi juga menempatkan mata pencarihan petani dalam resiko dan menghambat mereka untuk terlibat dalam kerjasama di masa mendatang dengan aktor-aktor dari luar.

Pedoman ini menggambarkan sejumlah prinsip utama sebagai bahan pertimbangan untuk para investor agribisnis, yang terlibat dalam kerjasama industri primer di daerah pedesaan Timor-Leste. Prinsip-prinsip tersebut berdasarkan pada suatu analisa pembangunan desa dan kinerja pertanian di Timor-Leste yang bersumber dari beberapa kerjasama antara investor-investor dengan anggota masyarakat selama dekade terakhir, sejak negara itu memperoleh kemerdekaannya. Analisa itu juga bersumber dari suatu tinjauan mengenai kemajuan-kemajuan dalam pemikiran internasional tentang investasi agribisnis di negara-negara berkembang dan juga pembangunan dalam konteks lokal. Dokumen ini dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama menyajikan pedoman yang dimaksudkan untuk membantu semua yang menginvestasi di bidang agribisnis di Timor-Leste atau mempertimbangkan untuk melakukan investasi seperti demikian, bagian kedua menyediakan informasi dasar tambahan yang berhubungan dengan pembangunan desa dan sektor swasta di Timor-Leste. Beberapa pertimbangan relevan untuk investasi dalam agribisnis di sebuah negara berkembang tercantum dalam sebuah Lampiran.

## 1. Pedoman Investasi Agribisnis di Timor-Leste

Penelitian yang sudah dilakukan di Timor-Leste telah mengidentifikasi sejumlah pertumbangan utama untuk kerjasama yang sukses antara para investor dan anggota masyarakat. Pengalaman dalam konteks Timor-Leste dan dalam konteks yang serupa di tempat lain menunjukkan bahwa perhatian kepada bidang-bidang ini bisa membuat perbedaan antara suatu kerjasama yang sukses dan kerjasama ini tidak hanya gagal menghasilkan bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga menghambat anggota masyarakat untuk bekerjasama dengan investor-investor pada kesempatan mendatang. Pertumbangan-pertumbangan kunci ini, yang mendapat perhatian lebih jauh di bawah, mencakup (1) konsultasi dan pengambilan keputusan yang bijaksana (2) Evaluasi dan Manajemen Resiko, (3) Komunikasi dan Penyaluhan, (4) Distribusi Keuntungan, dan (5) Manajemen Sengketa.

## Perbedaan-perbedaan dalam Pandangan Dunia dan Harapan-Harapan

Sebagai sebuah catatan pendahuluan sebelum membahas tema-tema yang telah diuraikan di atas, para investor agribisnis yang bermaksud bekerjasama dengan masyarakat pedesaan dalam proyek agribisnis harus sadar bahwa perbedaan-perbedaan pandangan dunia yang terdapat di antara para anggota masyarakat petani yang bercocok tanam hanya untuk kebutuhan sehari-hari dan dengan siapa mereka akan bekerjasama di pedesaan Timor-Leste. Meskipun para pengusaha secara pribadi sangat antusias untuk mencoba inisiatif baru, namun anggota masyarakat desa cenderung memberi nilai tinggi untuk pendekatan-pendekatan terhormat yang telah mendukung kelangsungan hidup generasi-generasi terdahulu dalam suatu situasi yang sulit. Seperti dalam masyarakat tradisional yang lain, para leluhur dianggap memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Para

hak untuk mengekspor selama terjadi krisis pangan nasional akut.'

Meskipun ditentang oleh beberapa komentator karena berbagai alasan, termasuk tetapi tidak terbatas pada sifat sukarela mereka,<sup>49</sup> kode etik dan prinsip-prinsip investasi agribisnis diyakini digunakan dalam 'mengingatkan negara dan investor-investor atas tanggung jawab mereka dan dalam menarik perhatian terhadap situasi-situasi di mana mereka tidak berlaku (Deininger et al. 2010, x). Masalah kode etik atau prinsip-prinsip juga mengundang perhatian terhadap berbagai skema sertifikasi industri sukarela yang telah dikembangkan selama beberapa dekade terakhir. Ini mendapat perhatian di bawah ini.

### Skema Sertifikasi Industri Sukarela

Munculnya gerakan konsumen etis dan perubahan legislatif di negara-negara maju telah menghasilkan pembentukan berbagai skema sertifikasi industri sukarela. Skema-skema ini biasanya mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk memenuhi praktik sosial dan lingkungan internasional yang baik, di mana pun mereka beroperasi, jika mereka ingin mencapai dan mempertahankan akreditasi. Dalam beberapa sektor, terutama hasil-hasil hutan, sertifikasi dengan skema-skema yang diakui menjadi penting bagi perusahaan yang berniat untuk mengakses pasar-pasar Barat yang menguntungkan.<sup>50</sup>

Sertifikasi industri mensyaratkan bahwa seorang operator dan/atau proyek memenuhi standar sosial dan lingkungan tertentu, idealnya sebagaimana diverifikasi oleh auditor eksternal, untuk akreditasi dengan sebuah skema industri tertentu yang harus dicapai dan dipertahankan. Sekarang ada berbagai skema yang disesuaikan untuk industri tertentu. Contoh-contoh skema sertifikasi industri utama termasuk Dewan Pengawasan Hutan/*Forest Stewardship Council* (FSC), yang dirancang untuk mempromosikan manajemen perkebunan kayu<sup>51</sup> yang berkelanjutan dan program Jaringan Pertanian Berkelaanjutan (SAN) dari Rainforest Alliance, yang memiliki standar-standar yang sesuai untuk berbagai hasil panen termasuk kopi, buah tropis dan produk lainnya.<sup>52</sup> Skema-skema sertifikasi industri tidak hanya terbatas pada tanaman dan perkebunan, dan Rainforest Alliance juga

<sup>49</sup> Borras dan Franco (2010, 9-12,32), yang memerdebatkan kebutuhan untuk mempertanyakan "akar fundamental perolehan tanah...(antara lain)...pola industrial produksi dan konsumsi makanan dan energi yang ada yang dikontrol oleh TNCs," membuat daftar alasan-alasan mengapa mereka menentang kode etik. Sebagai tambahan kemungkinan peran kode etik dalam menyokong dan memperluas "kompleks industri agrikultur dan energi global yang ada," ini meliputi kemungkinan peran keprihatinan-keprihatinan mengenai aspek-aspek hak-hak kepemilikan, keprihatinan-keprihatinan mengenai apakah transparansi yang urusan tanah akan cukup untuk produksi hasil bagi orang miskin, dan keprihatinan-keprihatinan tentang cri sukarela kode etik. Para penulis juga mengungkapkan keprihatinan tentang kemampuan kemitraan antara para investor agribisnis dan para petani untuk "mencapai skenario hasil sama-sama untung." Sementara itu, para penulis menegaskan bahwa hasil tersebut telah gagal diwujudkan "dari waktu ke waktu dan dalam beragam situasi," namun mereka tidak mengacu kepada contoh-contoh dan juga tidak mengutip sumber-sumber. Untuk pembahasan lebih jauh tentang tema ini lihat juga Palmer (2010).

<sup>50</sup> Sebagai contoh, diikuti amandemen pada tahun 2008, US Lacey Act kini melarang impor dan perdagangan produk hutan (termasuk kayu) kayu ilegal di setiap negara berdaulat. Dalam menanggapi perkembangan ini (dan pengaruh pasar konsumen informasi yang mendukung undang-undang tersebut), bisnis berurusan dalam produk hutan berada di bawah tekanan untuk menunjukkan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan standar sosial dan lingkungan internasional. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Elson (2008) dan Deininger et al. (2010, 97).

<sup>51</sup> Lihat [www.fscus.org](http://www.fscus.org)

<sup>52</sup> Lihat <http://www.rainforest-alliance.org/>

mempeliki sebuah program pariwisata yang berkelanjutan.<sup>53</sup> Ada pula skema sertifikasi untuk industri perikanan lepas pantai, dan *Marine Stewardship Council*<sup>54</sup> menawarkan sebuah program sertifikasi untuk kegiatan-kegiatan penangkapan ikan komersial berkelanjutan.<sup>55</sup>

Sejauh ini, pengalaman sertifikasi internasional telah bervariasi. Informasi Bank Dunia menunjukkan bahwa dalam hal produksi minyak kelapa sawit, misalnya, untuk mana sertifikasi kini dimungkinkan melalui Meja Bundar tentang Minyak Kelapa Sawit Berkelaanjutan (RSPO), menerapkan kriteria hak-hak tanah masyarakat 'untuk operasi yang sebenarnya menjadi sulit dan kontroversial'. Program-program sertifikasi lain, terutama *Forest Stewardship Council*, tampaknya memperoleh sukses yang jauh lebih besar. Fitur utama yang tercatat dalam studi Bank Dunia adalah bahwa agar program-program sertifikasi menjadi berarti, mereka harus mencantumkan ketentuan-ketentuan untuk 'verifikasi independen atas kepatuhan' sesuai standar-standar (Deininger et al. 2010, 15, 97–98).

Sertifikasi Industri Sukarela ini masih dalam masa pertumbuhan dan pada sisi positif, sedang diambil tindakan-tindakan untuk memberikan pengakuan kepada skema-skema yang telah terbukti kuat. Organisasi yang mengesahkan para pemberi sertifikasi termasuk Akreditasi Sosial dan Lingkungan Internasional yang relatif baru dan Aliansi Pemberian Label /Labelling Alliance (ISEAL)<sup>56</sup> dan Organisasi Standar Internasional.<sup>56</sup> Pemberi sertifikasi pertama, ISEAL, sampai saat ini telah menerima sepuluh skema sertifikasi sebagai 'anggota penuh', dengan anggota-anggota tambahan lain sebagai 'asosiasi' dan 'afiliasi'.

Munculnya skema sertifikasi sukarela dan meningkatnya penggunaan skema-skema ini oleh industri memberikan kepada pemerintah negara-negara berkembang pilihan untuk memperkenalkan sertifikasi wajib dengan skema yang sesuai untuk jenis-jenis investasi tertentu (mungkin skema-skema yang melebihi luas lahan yang ditentukan atau tingkat modal yang telah ditentukan). Bahkan jika Pemerintah Timor-Leste memutuskan untuk tidak memerlukan sertifikasi dengan skema-skema sertifikasi industri internasional, para investor masih akan bijaksana untuk mempertimbangkan sertifikasi, tidak hanya sebagai sarana menunjukkan komitmen untuk aspek-aspek manajemen sosial dan lingkungan tetapi juga berpotensi untuk memaksimalkan pilihan-pilihan ekspor untuk produk mereka.

<sup>53</sup> Lihat <http://www.rainforest-alliance.org/tourism.cfm?id=main>

<sup>54</sup> Lihat <http://www.msc.org/>

<sup>55</sup> Lihat [www.isealliance.org](http://www.isealliance.org)

<sup>56</sup> Lihat [www.iso.org](http://www.iso.org)

<b>Penyuluhan</b>	<p>Apakah staf komunikasi/penyuluhan memiliki akses ke fasilitas transport (contohnya sepeda bermotor) dan bahan bakar yang cukup untuk melakukan pekerjaan mereka?</p> <p>Apakah sudah ada program pemantauan untuk meyakinkan bahwa staf komunikasi/penyuluhan menjalankan tugas mereka?</p> <p>Apakah aspek bahasa dan tingkat melek huruf sudah diperhitungkan sehubungan dengan desain program komunikasi dan penyuluhan dan perekrutan staf?</p> <p>Apakah ada ketentuan-ketentuan khusus untuk memungkinkan anggota masyarakat perorangan untuk mengadu/keluhan kepada manajemen senior jika diperlukan?</p>
<b>Distribusi Keuntungan</b>	<p>Apakah kerjasama memiliki nilai yang cukup kepada peserta anggota masyarakat bahwa mereka akan tetap berkomitmen terhadapnya?</p> <p>Apakah kerjasama yang ada memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan baru, teknologi dan bantuan lain, dan pasar?</p> <p>Apakah telah dirancang sarana-sarana untuk memberi kompensasi secara langsung kepada peserta proyek perorangan?</p> <p>Apakah peserta perempuan akan menerima kompensasi secara langsung atas kontribusi mereka terhadap proyek?</p> <p>Apakah pertimbangan telah diberikan kepada sarana-sarana dengan mana manfaat-manafaat tambahan dari kerjasama dapat mengalir ke masyarakat?</p> <p>Apakah upacara-upacara adat akan didukung secara berskala untuk mempertahankan niat baik di antara masyarakat?</p>
<b>Manajemen sengketa</b>	<p>Pertemuan rutin antara seorang investor dan anggota masyarakat dapat memfasilitasi pertukaran informasi dan menghindari berkembangnya kesalahpahaman dan sengketa. Apakah telah dilakukan pengaturan luas untuk pertemuan yang telah dibuat?</p> <p>Apakah telah diidentifikasi model dasar penyelesaian sengketa (non-pengadilan) dan telah disepakati antara investor dan anggota masyarakat termasuk perempuan?</p>

### Penekanan pada Petani Kecil



**Gambar 15: Petani wanita di Oecusse (Foto: Rod Nixon)**

Sebuah hasil lebih lanjut dari meningkatnya kekhawatiran tentang dominasi korporasi pertanian dan marginalisasi masyarakat dari lahan pertanian telah meningkatkan minat dalam bentuk pertanian komersial yang tidak mengusur masyarakat dan di mana petani memiliki sebuah peran.<sup>57</sup> Dari perspektif investor, ini belum tentu merugikan kinerja ekonomi, karena sementara pertanian rakyat mungkin kurang produktif dibandingkan peternakan skala besar secara keseluruhan, bisa lebih efisien dalam hal biaya pengeluaran (Deininger et al. 2010, 24).

Sebagai sarana memajukan pertanian komersial dengan masuknya petani penggarap kecil, kontrak pertanian telah menjadi pusat perhatian.<sup>58</sup> Pengaturan pertanian kontrak dapat mengambil berbagai bentuk yang berbeda, dari pengaturan informal ke perkembangan perkebunan inti yang kompleks,<sup>59</sup> dan sejumlah publikasi memberikan analisis tentang manfaat dan risiko masing-masing untuk pengaturan pertanian kontrak dari perspektif-perspektif para investor dan para petani (Eaton dan Shepherd 2001; Silva 2005; Vermeulen dan Cotula 2010).

<sup>57</sup> Lihat, misalnya, Vermeulen dan Cotula (2010) dan Cotula dan Leonard (2010).

<sup>58</sup> Seperti yang didefinisikan dalam Tabel 1 dokumen ini, pengaturan pertanian biasanya melibatkan suatu pengaturan di mana investor memberikan input (seara potensial berupa bibit tanaman, pupuk, dan pemberian mensin atau pelatihan) dan petani mengolah hasil pertanian untuk dijual kepada investor. Harganya sering disetujui sebelum produksi dan kuota-kuota dan spesifikasi-spesifikasi harus ditetapkan. Pembayaran kelihatannya akan diakukan pada masa pengumpulan hasil panen, lalu dikurangi dengan biaya input-input yang disediakan oleh investor.

<sup>59</sup> Variasi-variasinya digambarkan secara rinci dalam Eaton dan Shepherd (2001).

## Referensi-referensi

- Archer, C. H., "Report on Portuguese Timor." In *Australian Archives, "Relations with Portuguese Timor, Appointment of Commonwealth Representative, Occupation of Portuguese Timor, 1940-1941,"* Series A816 n° 19/301/822.
- Barrow, Christopher J. 2000. *Social Impact Assessment: An Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Borrás, Saturnino M. Jr., and Jennifer Franco. 2010. "Towards a Broader View of the Politics of Global Land Grab: Rethinking Land Issues, Reframing Resistance." Initiatives in Critical Agrarian Studies (ICAS) Working Paper Series 001, Transnational Institute, Amsterdam.
- Boxer, Charles R. 1960. "Portuguese Timor: A Rough Island Story: 1515-1960." *History Today* 10 (5): 349–55.
- Braun, Joachim von, and Ruth Meinzen-Dick. 2009. "'Land Grabbing' by Foreign Investors in Developing Countries: Risks and Opportunities." International Food Policy Research Institute Policy Brief 13, IFPRI, Washington, DC.
- Clarence-Smith, W. G., 1992. "Planters and Small Holders in Portuguese Timor in the Nineteenth and Twentieth Centuries." *Indonesia Circle*, no. 57, London, available at <http://www.gov.east-timor.org/MAFF/ta000/TA051.pdf>.
- Cotula, Lorenzo, and Rebeca Leonard, eds. 2010. "Alternatives to Land Acquisition: Agricultural Investment and Collaborative Business Models." International Institute for Environmental Development, London, available at <http://pubs.iied.org/12567/IED.html>.
- Davidson, Katharine G. 1994. "The Portuguese Colonisation of Timor: The Final Stage, 1850 – 1912." PhD diss., University of New South Wales.
- Deininger, Klaus, Derek Byerlee, Jonathan Lindsay, Andrew Norton, Harris Seldin, and Mercedes Stickler. 2010. *Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?* Washington, DC: World Bank.
- Doria, Marta. n.d. "Contract Farming: Legal Considerations on Contractual Design and Enforcement." Food and Agriculture Organization, Rome, available at [http://www.fao.org/fileadmin/user\\_upload/contract\\_farming/Brief\\_1\\_legal\\_aspects\\_of\\_contract\\_farming.pdf](http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/contract_farming/Brief_1_legal_aspects_of_contract_farming.pdf).
- Eaton, Charles S. 1988. "Directed Smallholder Farming in Fiji." M. Phil. thesis, University of the South Pacific, Suva. Unpublished.
- — —. Forthcoming. "Training Manual on Planning and Structuring Contract Farming Operations." Food and Agriculture Organization, Rome.
- Eaton, Charles S., and Andrew W. Shepherd. 2001. "Contract Farming: Partnerships for Growth." FAO Agricultural Services Bulletin 145, Food and Agriculture Organization, Rome.
- Elson, Dominic. 2008. "Forest Governance, Markets and Trade: Implications for Sustainability and Livelihoods." Department for International Development, London, available at [http://www.illegal-logging.info/item\\_single.php?it\\_id=916&it=document](http://www.illegal-logging.info/item_single.php?it_id=916&it=document).
- FAO (Food and Agriculture Organization). 2009. "Towards Voluntary Guidelines on Responsible Governance of Tenure of Land and Other Natural Resources." Land Tenure and Management

## Ringkasan Prinsip-prinsip Utama

	<b>Aspek</b>
<b>Konsultasi dan Mengambil Keputusan Bijaksana</b>	<p>Apakah anda telah mengkonsultasi dan memberi tahu lembaga-lembaga (nasional, sub-distrik dan suco)?</p> <p>Apakah pihak-pihak dengan siapa anda berencana untuk bekerjasama di tingkat suco sungguh-sungguh memahami pembagian tanggung jawab dan keuntungan yang berhubungan dengan proyek yang diusulkan?</p> <p>Apakah semua lahan yang berhubungan dengan proyek yang diusulkan secara fisik telah dikunjungi bersama para pemimpin masyarakat, para pemilik tanah dan para pemilik tanah di sekitarnya?</p> <p>Apakah sudah berkonsultasi dengan jumlah wanita yang signifikan dan representatif apakah mereka sudah setuju dengan proyek yang diusulkan?</p> <p>Apakah sudah melakukan negosiasi mengenai peran wanita di dalam proyek dan hal yang berhubungan dengan pelatihan dan aspek pembagian manfaat?</p> <p>Apakah aspek-aspek kunci dari proyek (siapa yang menyediakan bahan-bahan tertentu; siapa yang menerima manfaat yang mana dan bagaimana semua manfaat didistribusikan ke seluruh masyarakat) dijelaskan secara tertulis dalam bahasa yang sesuai? Apakah salinan persetujuan telah didistribusikan kepada anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proyek?</p> <p>Apakah telah diberikan perhatian kepada kegiatan komunikasi yang berkelanjutan supaya bisa dapat menyelesaikan keluhan dan kesalahpahaman sebelum berkembang menjadi perselisihan?</p> <p>Apakah sifat dan kemungkinan jumlah proyek telah dikomunikasikan kepada non-peserta dan anggota masyarakat tetangga untuk memastikan adanya pemahaman akurat mengenai sifat dari proyek dan untuk menghindari munculnya harapan yang tidak realistik?</p> <p>Apakah anda telah mencari informasi yang relevan untuk menginformasikan pendekatan anda dari semua sumber yang berpotensi, seperti Kementrian Pertanian dan Perikanan dan operator agribisnis lainnya?</p>
<b>Evaluasi dan Penilaian Resiko dan Manajemen</b>	<p>Apakah anda telah mencoba usulan proses produksi anda sehingga anda tidak menempatkan mata pencarian anggota masyarakat (dan investasi anda sendiri) pada resiko yang tidak diinginkan pada saat anda memulai produksi berskala penuh? (Perhatikanlah bahwa program percobaan biasanya lebih produktif daripada lahan garapan para petani).</p> <p>Apakah anda telah mengevaluasi kapasitas anggota masyarakat local sehingga anda dapat mengukur kebutuhan-kebutuhan pengembangan kapasitas/pelatihan dan tingkat aktivitas eskensi yang diperlukan?</p> <p>Apakah proyek yang diusulkan memiliki ukuran atau sifat tertentu yang memerlukan suatu penilaian dampak sosial/lingkungan? jika demikian, apakah sudah diidentifikasi peluang-peluang untuk memaksimalkan dampak-dampak positif, dan juga cara-cara untuk meringankan atau menghilangkan dampak-dampak negatif? Apakah sudah dipertimbangkan dampak-dampak sosial/lingkungan tertentu untuk perempuan dalam wilayah proyek tersebut?</p> <p>Apakah peserta anggota masyarakat telah dianjurkan untuk mempertahankan kelanjutan produksi sebagai jaring keamanan apabila proyek gagal untuk diwujudkan sesuai dengan hasil yang diharapkan?</p> <p>Apakah anda memiliki kemampuan teknis dan manajerial memadai untuk mengelola proyek yang diusulkan?</p>
<b>Komunikasi</b>	Apakah anda telah merancang sebuah program komunikasi dan penyuluhan

Lampiran : Investasi Agribisnis di sebuah Negara Berkembang .....	24
Kekhawatiran mengenai "Perampasan Tanah' di Negara Berkembang .....	24
Prinsip-Prinsip dan Kode Etik .....	24
Skema Sertifikasi Industri Sukarela .....	26
Penekanan pada Petani Kecil .....	28
Referensi-referensi .....	29
Perlu Informasi Tambahan atau Bantuan? .....	32

- |
- Lampiran : Investasi Agribisnis di sebuah Negara Berkembang .....24  
Kekhawatiran mengenai "Perampasan Tanah' di Negara Berkembang .....24  
Prinsip-Prinsip dan Kode Etik .....24  
Skema Sertifikasi Industri Sukarela .....26  
Penekanan pada Petani Kecil .....28  
Referensi-referensi .....29  
Perlu Informasi Tambahan atau Bantuan? .....32
- Fox, James. 1988. "The Historical Consequences of Changing Patterns of Livelihood on Timor." In *Contemporary Issues in Development*, ed. Deborah Wade-Marshall and Peter Loveday, 259–79. Darwin: Australian National University.
- Funk, McKenzie. 2010. "Will Global Warming, Overpopulation, Floods, Droughts and Food Riots Make this Man Rich? Meet the New Capitalist of Chaos." *Rolling Stone*, May 27.
- Gunn, Geoffrey C. 1999. *Timor Loro Sae: 500 Years*. Macau: Livros do Oriente.
- ICG (International Crisis Group). 2010. "Managing Land Conflicts in Timor-Leste." Asia Briefing 110, ICG, Brussels.
- Landman, J. R., and H. T. Plant. 1948. "Notes on Portuguese Timor." Pts. 1–3. *South Pacific* (Journal of the Australian School of Pacific Administration) 2 (11): 225–31; 3 (1): 1–8; 3 (2): 34–39.
- Meitzner Yoder, Laura Suzanne. 2005. "Custom, Codification, Collaboration: Integrating the Legacies of Land and Forest Authorities in Oecusse Enclave, East Timor." PhD diss., Yale University.
- Metzner, Joachim K. 1981. "Innovations in Agriculture Incorporating Traditional Production Methods: The Case of Amarasi (Timor)." Special issue, *Applied Geography and Development* 17: 89–110.
- Nixon, Rod. 2007. "Challenges for Managing State Agricultural Land and Promoting Post-Subsistence Primary Industry Development in East Timor." In *Crisis in Timor-Leste: Understanding the Past, Imagining the Future*, ed. Dennis. Shoesmith, 101–15. Darwin: Charles Darwin University Press.
- . 2008. "Integrating Indigenous Approaches into a 'New Subsistence State': The Case of Justice and Conflict Resolution." PhD diss., Charles Darwin University.
- . 2009. "Contracts, Land Tenure and Rural Development in Timor-Leste." Justice for the Poor Briefing Note 3, no. 3, World Bank, Washington, DC.
- Ormeling, Ferdinand J. 1957. *The Timor Problem: A Geographical Interpretation of an Underdeveloped Island*. Jakarta: J.B. Wolters.
- Palmer, Robin. 2010. "Would Cecil Rhodes Have Signed a Code of Conduct: Reflections on Global Land Grabbing and Land Rights in Africa." Paper presented at the African Studies Association of the UK Biennial Conference, Oxford, September 16–19.
- Silva, Carlos Arthur B. da. 2005. "The Growing Role of Contract Farming in Agric-food Systems Development: Drivers, Theory and Practice." FAO Agricultural Management, Marketing and Finance Service Paper, Food and Agriculture Organization, Rome, available at [http://www.fao.org/ag/ags-division/publications/publication/en/?dyna\\_fef%5Buid%5D=39612](http://www.fao.org/ag/ags-division/publications/publication/en/?dyna_fef%5Buid%5D=39612).
- Simmons, Phil. 2002. "Overview of Smallholder Contract Farming in Developing Countries." ESA Working Paper 02-04, Food and Agriculture Organization, Rome, available at <http://www.fao.org/docrep/007/ae023e00.HTM>.

Timor-Leste, Government of. MAF (Ministry of Agriculture and Fisheries) and MTCI (Ministry of Tourism, Commerce and Industry). 2009a. "Conference Proceedings: 1<sup>st</sup> International Conference on 'Cafe Timor,'" Hotel Timor, Dili, Timor-Leste, April 3–4.

Timor-Leste, Government of. MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries). 2004. "Policy and Strategic Framework." MAFF, Dili, Timor-Leste.

Timor-Leste, Government of. MED (Ministry of Economy and Development). 2008. "State of the Nation Report Volume IV: Sector Status Reports." National Commission for Research and Development, MED, Dili, Timor-Leste.

Timor-Leste, Government of. 2009b. "The Strategic Framework for Rural Development in Timor-Leste (2010-2020)." Dili, Timor-Leste.

Vermeulen, Sonja, and Lorenzo Cotula. 2010. *Making the Most of Agricultural Investment: A Survey of Business Models that Provides Opportunities for Smallholders*. London: Food and Agriculture Organization and International Institute for Environment and Development, available at <http://pubs.iied.org/pdfs/12566IIED.pdf>.

Weber, Max. 1915. "The Social Psychology of the World Religions." Reprinted with introduction in *From Max Weber: Essays in Sociology*, trans. and ed. H. H. Gerth and C. Wright Mills, 267–301. New York: Oxford University Press, 1976.

———. [1922] 1978. *Economy and Society*. Vol. 1. Guenther Roth and Claus Wittich, eds. Berkeley: University of California Press.

World Bank. 2006. "Strengthening the Institutions of Governance in Timor-Leste." World Bank, Washington, DC, available at <http://siteresources.worldbank.org/INTTIMORLESTE/Resources/Strengthening-Institutions-Full-report.pdf>.

World Bank. 2011. "Timor-Leste: Expanding Near-Term Agricultural Exports." World Bank Diagnostic Trade Integration Study (DTIS), World Bank, Washington, DC.

Wurm, Stephen A., and Shiro Hattori, eds. 1981. *Language Atlas: Pacific Area*. Canberra: The Australian Academy of the Humanities in collaboration with the Japan Academy.

Young, Philip, Nunos Santos, and Shobha Shetty. 2010. "Timor-Leste: Raising Agricultural Productivity: Issues and Options." Policy Note, Report 50276, World Bank, Washington, DC.

## Daftar Isi

Ringkasan Prinsip-prinsip Utama .....	iii
Pendahuluan .....	1
1. Pedoman Investasi Agribisnis di Timor-Leste .....	1
Perbedaan-perbedaan dalam Pandangan Dunia dan Harapan-Harapan .....	1
1.1 Konsultasi dan Pengambilan Keputusan Bijaksana .....	3
Tingkat Nasional .....	3
Dalam Distrik .....	3
1.2 Tingkat Suco .....	4
Area Lahan .....	6
1.3 Pentingnya Konsultasi dengan Perempuan dan Melibatkan Perempuan .....	7
Mendokumentasikan Kesepakatan .....	7
Evaluasi Terlebih Dahulu .....	8
1.4 Sifat Rapuh dari Keberadaan Subsistensi .....	8
Menetapkan Kelayakan Pendekatan .....	9
Penilaian Dampak .....	10
Manajemen Resiko .....	10
1.5 Kapasitas Organisasional dan Manajemen Investor .....	11
Kesehatan dan Keselamatan Kerja .....	12
Bahaya-bahaya Rantai Komunikasi yang Panjang dan Tidak Langsung .....	12
Pentingnya Komunikasi dan Penyuluhan Langsung dan Efektif .....	13
Tanggung Jawab atas Penyampaian Penyuluhan .....	13
1.6 1.4 Distribusi Keuntungan .....	14
Membuat Partisipasi Bermanfaat untuk Petani .....	14
Pentingnya Pembayaran Langsung dan Adil kepada Peserta Anggota Masyarakat .....	15
Membayar Perempuan untuk Pekerjaan Mereka .....	16
Memberi Manfaat kepada Masyarakat Luas .....	16
1.5 Manajemen Sengketa .....	17
2. Pembangunan Desa di Timor-Leste dan Sektor Swasta .....	18
2.1 Ekonomi Pedesaan Timor-Leste .....	18
Pentingnya Investasi Sektor Swasta .....	19
Konteks Timor-Leste .....	20
2.2 Pertanian dan Tanah di Timor-Leste .....	20
Mengakses Lahan Pertanian di Timor-Leste .....	21
Sebuah Undang-undang Pertanahan Masa Depan .....	22

**Ucapan Terima Kasih**

Penulis, Rod Nixon, ingin berterima kasih kepada Charles Eaton, Carlos Liborio Alves, Lene Ostergaard, Diana Felix da Costa, Gaspar Quintao, David Butterworth, Shaun Williams, Jun-wei Sum, Rea Abada, Saku Akmeemana Bobby Lae, Afonso de Oliveira, Fernando Egidio Amaral dan Noel de Carvalho atas saran-saran dan masukan mereka masing-masing. Pedoman ini dibuat berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh J4P antara tahun 2009 dan 2011 dan penelitian dilakukan oleh J4P pada tahun 2010 dengan bekerja sama dengan Fundasauun Haburas. Seperti yang terdapat dalam teks dokumen ini juga diinformasikan juga oleh survey literature yang berhubungan dengan pengembangan agribisnis dalam konteks di tempat lain yang setara .

**Perlu Informasi Tambahan atau Bantuan?**

**Jika anda perlu bantuan atau informasi tambahan ada beberapa tempat yang dapat anda kunjungi seperti:**

Kamar Dagang dan Industri Timor-Leste (CCITL)  
Avenida Mártires da Patria, Colmara, Dili, Telp. +670 7983007- Email: [ccitloffice@gmail.com](mailto:ccitloffice@gmail.com)  
– Website: [www.ccitl.org.tl](http://www.ccitl.org.tl)

Korporasi Keuangan Internasional /The International Finance Corporation (IFC)  
Kantor Bank Dunia, Avenida dos Direitos Humanos Lecidere,  
Dili, Timor-Leste

#### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis, Rod Nixon, ingin berterima kasih kepada Charles Eaton, Carlos Liborio Alves, Lene Ostergaard, Diana Felix da Costa, Gaspar Quintao, David Butterworth, Shaun Williams, Jun-wei Sum, Rea Abada, Saku Akmeemana Bobby Lae, Afonso de Oliveira, Fernando Egídio Amaral dan Noel de Carvalho atas saran-saran dan masukan mereka masing-masing. Pedoman ini dibuat berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh J4P antara tahun 2009 dan 2011 dan penelitian dilakukan oleh J4P pada tahun 2010 dengan bekerjasama dengan Fundasaun Haburas. Seperti yang terdapat dalam teks dokumen ini juga diinformasikan juga oleh survey literature yang berhubungan dengan pengembangan agribisnis dalam konteks di tempat lain yang setara .

**Perlu Informasi Tambahan atau Bantuan?**  
**Jika anda perlu bantuan atau informasi tambahan ada beberapa tempat yang dapat anda kunjungi seperti:**

Kamar Dagang dan Industri Timor-Leste (CCITL)  
Avenida Mártires da Patria, Colmera, Dili, Telp. +670 7983007- Email: [ccitloffice@gmail.com](mailto:ccitloffice@gmail.com)  
– Website: [www.ccitl.org.tl](http://www.ccitl.org.tl)

Korporasi Keuangan Internasional /The International Finance Corporation (IFC)  
Kantor Bank Dunia, Avenida dos Direitos Humanos Lecidere,  
Dili, Timor-Leste